

KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK PEDESAAN

(Studi di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

ANGGA AMDA PRATAMA

NIM. 105030101111032



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINSTRASI PUBLIK

MALANG

2014

MOTTO

"kesalahan di masa lalu birkanlah menjadi pelajaran

Lakukan hal yang terbaik untuk kehidupanmu sekarang

Berharap dan bermimpilah untuk kehidupan dimasa datang

Tidak ada keberhasilan tanpa ada perjuangan

Dan perjuangan membutuhkan sebuah perngorbanan"



PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 11 Juni 2014



Angga Amda Pratama

105030101111032

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik Pedesaan
(Studi Di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten
Banyuwangi)

Disusun Oleh : Angga Amda Pratama

NIM : 105030101111032

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 23 Mei 2014

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP.19520911 197903 1 002


Drs. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001

LANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 03 Juli 2014
Jam : 09.00 WIB
Skripsi atas nama : Angga Amda Pratama
Judul : Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Fisik Pedesaan (Studi di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi)
dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua



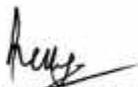
Dr. Heru Kibawanto, MS
NIP.19520911 197903 1 002

Anggota



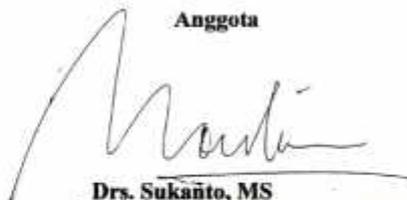
Dr. Suwondo, MS
NIP. 19530201 198010 1 001

Anggota



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP.19690524 200212 2 002

Anggota



Dr. Sukañto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001

RINGKASAN

Angga Amda Pratama, 2014, **Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik Pedesaan (Studi pada Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi)**, Drs. Heru Ribawanto, MS, Drs. Suwondo, MS, 126 Hal + xiv

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara segala urusan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada. Dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa dibutuhkan kinerja yang baik dari aparat pemerintah desa dalam mengakomodir segala kebutuhan masyarakat yang merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat desa. Salah satu bentuk pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat yaitu membangun infrastruktur fisik. Pembangunan infrastruktur fisik pedesaan dirasa sangat perlu karena bertujuan untuk mempermudah segala aktifitas masyarakat desa.

Penelitian ini mengacu pada teori pembangunan dan teori kinerja organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian yang terbagi menjadi empat yaitu kinerja aparat desa, proses pelaksanaan program, wujud pembangunan fisik dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan pedesaan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisa data di lapangan digunakan analisa interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa dalam pembangunan fisik pedesaan di Desa Parijatahwetan ini dikatakan cukup baik. Kemampuan yang baik dalam menjalankan tugas serta motivasi yang tinggi karena rasa tanggung jawabnya terhadap tugas yang menjadi kewajibannya dan kedisiplinan aparat dalam mengerjakan tugas pemerintahan desa secara tepat waktu dalam penyelesaiannya serta didukung dengan partisipasi masyarakat desa yang tinggi dalam pembangunan berdampak terhadap kelancaran dan keberhasilan pembangunan fisik pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rentan waktu lima tahun yaitu mulai dari tahun 2009-2013 Pemerintah Desa Parijatahwetan berhasil melaksanakan pembangunan sebanyak 37 pembangunan fisik yang berupa jalan, jembatan, plengsengan jalan, drainase serta infrastruktur lain yang berguna bagi masyarakat desa.

Saran yang direkomendasikan adalah pemerintah desa hendaknya bekerja lebih giat agar mampu mewujudkan pembangunan yang lebih banyak serta memberikan dorongan lebih intensif kepada masyarakat sekitar untuk ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam segala bentuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Kata kunci: Kinerja Pemerintah Desa, Pembangunan Pedesaa

SUMMARY

Angga Amda Pratama, 2014, **Government's Village Performance In The Physical of Rural Development (Study on Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi)**, Drs. Heru Ribawanto, MS, Drs. Suwondo, MS, 126 Hal + xiv

The government village is organizing the affairs of government and rural development based on the existing authority of the village. In the process of the village government needed a good performance of government officials in the village to accommodate all the needs of the community which is a form of service to rural communities. One form of village government services to the community is building a physical infrastructure. rural of development infrastructure is considered very necessary as it aims to facilitate all the activities of villagers.

This study refers to the theory of development and the theory of organizational performance. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach with a focus of research is divided into four, namely the performance of village officials, the process of implementation of the program, form of physical development and the factors supporting and inhibiting for the implementation of the rural development process. Sources of data in this study, namely primary and secondary data. While analysis of the data used in the field of interactive analysis by stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion.

Based on the findings in the field indicate that the government's performance in the physical development of rural villagers in the village is said to be quite good Parijatahwetan. Good ability in performing their duties and motivation as a sense of responsibility to his duty and task forces discipline in the village administration tasks in a timely manner and the solution is supported by the high participation of rural communities in the development of the smooth and successful impact on the physical development of rural . The results showed that the vulnerable period of five years starting from the year 2009-2013 Parijatahwetan Village Government successfully conducted a total of 37 development physical development such as roads, bridges, retaining wall, drainage and other infrastructure that is useful for villagers.

Suggestions are recommended is village government should work harder to be able to realize the construction of more and more intensive provide a boost to the surrounding community to participate actively participating in all kinds of development carried out by the village government.

Keywords: Government's village performance, Rural Development

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Fisik Pedesaan (Studi di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi)”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayahanda Agus Suprpto dan Ibunda Siswati serta adik tersayang Agung Krisna Nugraha dan Adinda Siti Nur Anisah yang sangat banyak memberikan bantuan moril, materil, arahan, nasehat dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan selama menempuh pendidikan.
2. Bapak. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak. Dr. Choirul Saleh, M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik
4. Bapak. Drs. Heru Ribawanto, MS., selaku Dosen Pembimbing I
5. Bapak. Drs. Suwondo, MS., selaku Dosen Pembimbing II
6. Bapak. Suharyono, SH. Selaku Kepala Desa Parijatahwetan dan perangkat pembantu lainnya yang memperkenankan peneliti melakukan penelitian dan membantu dalam proses penelitian di Desa Parijatahwetan
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Sonny Setiawan, Doni Winata, Rechta Kharisma Abhiseka dkk, yang telah banyak membantu memberikan masukan kepada penulis baik selama dalam mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbanggan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 15 Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kontribusi Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Pembangunan	9
1. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	9
B. Pemerintah Desa	10
1. Pengertian Pemerintah Desa	10
2. BPD (Badan Permusyawaratan Desa).....	16
3. Lembaga Kemasyarakatan.....	17
C. Konsep Kinerja	18
1. Pengertian Kinerja	18
2. Indikator Penilaian Kinerja.....	22
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja.....	26
D. Pembangunan Desa	27
1. Pengertian Pembangunan Desa	27
2. Pembangunan Fisik.....	33
3. Tujuan Pembangunan Desa	35

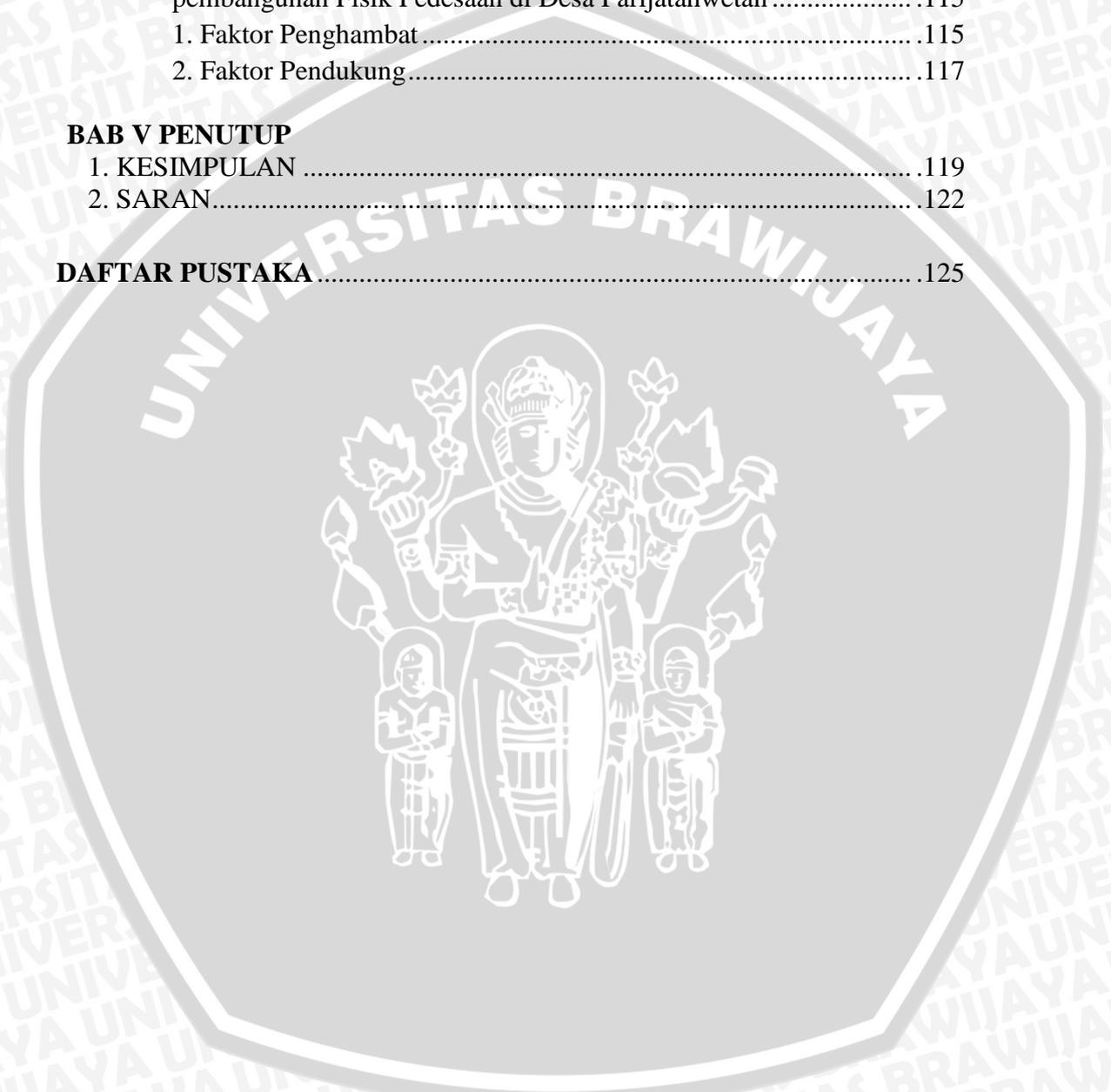
BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Lokasi dan Situs Penelitian	38
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Instrument Penelitian	43
G. Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

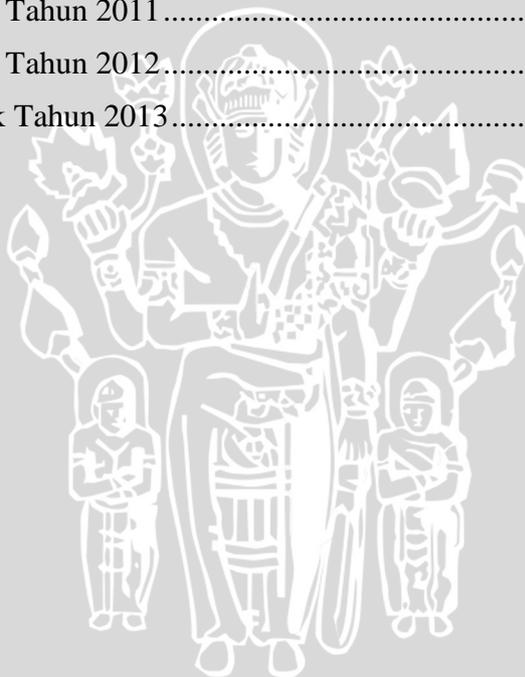
A. Tinjauan Lokasi Penelitian	47
1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi.....	47
2. Gambaran Umum Desa Parijatahwetan	49
B. Hasil Penelitian	56
1. kinerja aparat pemerintah desa.....	56
a. kedisiplinan aparat.....	56
b. kemampuan kerja aparat.....	59
c. motivasi aparat.....	62
2. Proses pelaksanaan program	64
a. Mekanisme pelaksanaan.....	64
b. Sumber dana.....	70
c. Pencairan dana.....	72
d. Mobilisasi tenaga kerja/bahan/alat.....	76
3. Realisasi.....	78
a. Wujud pembangunan fisik.....	78
b. Kemanfaatan	85
4. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik pedesaan di Desa Parijatah Wetan.....	87
a. Faktor penghambat.....	87
b. Faktor pendukung.....	89
C. Pembahasan.....	91
1. Kinerja Parat Pemerintah desa.....	91
a. Kedisiplinan Aparat	91
b. Kemampuan Kerja Aparat	94
c. Motivasi Aparat	97
2. Proses Pelaksanaan Program	99
a. Mekanisme Pelaksanaan	99
b. Sumber Dana	102
c. Pencairan Dana	105
d. Mobilisasi Tenaga Kerja/Bahan/Alat	107

3. Realisasi.....	110
1. Wujud Pembangunan Fisik.....	110
2. Kemanfaatan.....	112
4. Faktor yang Mempengaruhi dalam Proses Pelaksanaan pembangunan Fisik Pedesaan di Desa Parijatahwetan.....	115
1. Faktor Penghambat.....	115
2. Faktor Pendukung.....	117
BAB V PENUTUP	
1. KESIMPULAN.....	119
2. SARAN.....	122
DAFTAR PUSTAKA.....	125



DAFTAR TABEL

No Judul	Halaman
1. Luas Wilayah Desa Parijatahwetan Menurut Penggunaan	49
2. Jumlah Penduduk Desa Parijatahwetan Tahun 2013	50
3. Mata pencaharian penduduk desa Parijatahwetan.....	51
4. Pajak dan Retribusi Desa Parijatahwetan.....	52
5. Aparat Desa Parijatahwetan	54
6. Pembangunan Fisik Tahun 2009	79
7. Pembangunan Fisik Tahun 2010.....	81
8. Pembangunan Fisik Tahun 2011	82
9. Pembangunan Fisik Tahun 2012.....	83
10. Pembangunan Fisik Tahun 2013.....	84



DAFTAR GAMBAR

No Judul	Halaman
1. Bagan Analisis Data Model Interaktif	45
2. Peta Kabupaten Banyuwangi	48
3. Peta Desa Parijatahwetan	50
4. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Parijatahwetan ...	53
5. Kantor Kepala Desa Parijatahwetan	55
6. Mekanisme pelaksanaan pembangunan dari ADD	67
7. Bentuk pelaporan realisasi fisik pembangunan.....	68
8. Mekanisme pelaksanaan pembangunan PNPM Mandiri Pedesaan	69
9. Mekanisme pencairan dana PNPM.....	73
10. Alur pencairan dana PNPM	74
11. Pembangunan MCK di Dusun Melik.....	80
12. Pembangunan saluran tersier pertanian di Dusun Sidorejo	80
13. Pembangunan jembatan Sidodadi di Dusun Bongkoran.....	81
14. Pembangunan jalan telford di Dusun Sidorejo	82
15. Gapura Desa Parijatahwetan di Dusun Melik	83
16. Pemavingan jalan dan plengsengan jalan makam Dusun Sumberjo.....	84
17. Pemavingan Dusun Parirejo.....	132
18. Rabat beton Dusun Sumberjo	132
19. Pemavingan Dusun Sumberjo.....	132
20. Plengsengan jalan dan MCK Dusun Melik.....	133
21. Pemavingan jalan Dusun Melik	133
22. Jembatan Dusun Sidorejo	133
23. Pemavingan jalan Dusun Sidorejo	134
24. Gapura dan pagar kantor Kepala Desa Parijatahwetan.....	134
25. Pendopo Kantor Kepala Desa	134
26. Plengsengan jalan Dusun Sumberjo.....	135
27. Pemavingan jalan makam Dusun Sumberjo	135
28. Pengaspalan jalan dan plengsengan jalan Dusun Bongkoran	135
29. Pembangunan jembatan Sidodadi Dusun Bongkoran.....	136

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul	Halaman
1. Surat keterangan persetujuan riset	137
2. Surat keterangan pernah riset	138
3. LPPDes Parijatahwetan tahun anggaran 2013	139
4. Surat permohonan pencairan dana ke bupati	148
5. Surat pencairan dana ke kepala desa	150
6. Berita acara penyerahan ADD Desa Pa	151
7. Surat perintah kerja(SPJ)	152
8. Alokasi dana.....	154
9. Penyampaian LPJ bantuan keuangan desa berupa Reward PBB	156
10. Pencairan dana PNPM	155
11. Rekap rencana dan realisasi kegiatan.....	159
12. Realisasi jumlah swadaya	160



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang sangat besar, dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan wilayah yang sangat luas, untuk mengoptimalkan kekayaan alam yang ada perlu adanya infrastruktur penunjang dalam proses pelaksanaannya. Infrastruktur adalah hal yang sangat konkrit sebagai pendukung pembangunan suatu negara. Infrastruktur merupakan prasarana publik *primer* dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara, dan ketersediaan infrastruktur sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi. Pembangunan infrastruktur menjadi kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya, karena keberadaan infrastruktur sangat penting bagi pembangunan nasional.

Secara umum definisi pembangunan diartikan sebagai usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Tujuan pembangunan yang paling hakiki adalah meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat. Pembangunan fisik atau infrastruktur menurut Effendi (2002:48) yang mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi yang bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi .

Pembangunan mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upayanya untuk menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Pembangunan nasional pada dasarnya adalah berawal dari pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang dilakukan secara serasi dan terpadu, serta berdaya guna dan berhasil guna disetiap dan diseluruh kawasan pedesaan. Pembangunan pedesaan (dalam arti luas) harus terus ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan produksi pedesaan guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan berusaha, dan mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup sebagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 70% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan oleh karena itu pembangunan pedesaan harus terus ditingkatkan (Adisasmita, 2013:63)

Pembangunan pedesaan dalam proses pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Pemerintahan desa sebagai lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 tentang Desa yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam kaitannya dengan hal ini adalah pembangunan. Selanjutnya, dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa pembangunan pedesaan itu

merupakan suatu upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa adalah membangun prasarana atau infrastruktur, membangun usaha tani atau membangun pertanian.

Keberadaan prasarana fisik atau infrastruktur desa secara tidak langsung akan memberikan dampak terhadap kemajuan ekonomi masyarakat desa. Kinerja pemerintah desa yang responsif dalam memberikan pelayanan yang baik menjadi kunci keberhasilan pembangunan pedesaan. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan pembangunan yang dalam kaitannya ini adalah pembangunan prasarana fisik atau infrastruktur. Infrastruktur menjadi kebutuhan mutlak bagi masyarakat pedesaan. Dengan adanya keberadaan infrastruktur yang memadai akan berdampak positif bagi masyarakat, dimana dengan keberadaan infrastruktur seperti jalan desa yang baik akan mempermudah arus lalu lintas, jembatan berfungsi sebagai penghubung antar daerah, maupun dengan irigasi yang baik akan meningkatkan hasil pertanian, oleh sebab itu pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi harus lebih diprioritaskan. Mengingat bahwa, sebagian penduduk di desa adalah berprofesi sebagai petani, sehingga pembangunan fisik akan lebih bermanfaat sebagai penunjang aktivitas perekonomian yang ada di desa.

Pembangunan fisik merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan pedesaan, Desa Parijatahwetan merupakan salah satu desa yang ada dalam kawasan Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah sebesar 5.782,50 Km² dengan jumlah

penduduk sebesar 1.556.078 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani yaitu 45,42 %. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Banyuwangi bertempat tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian sebagai petani.

Desa Parijatahwetan merupakan salah satu desa dari 189 desa yang ada di kawasan Kabupaten Banyuwangi. Desa Parijatahwetan memiliki luas wilayah sebesar 566.363 Ha/m² dengan jumlah penduduk sebesar 5.186 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Desa ini merupakan suatu wilayah yang berada di dataran rendah dengan tingkat kesuburan tanah yang lumayan tinggi. Hal ini dibuktikan dengan produk hasil pertaniannya yang beraneka ragam, mulai dari tanaman padi, cabai, tomat, sayur mayur dan tanaman palawija lain yang tumbuh subur di daerah kawasan ini. Luas persawahan Desa Parijatahwetan yaitu sebesar 415.123 Ha/m² yang mayoritas penduduknya adalah berpencaharian sebagai petani dengan menggantungkan hidupnya di lahan persawahan sebagai ladang perekonomian mereka.

Kegiatan perekonomian masyarakat Desa Parijatahwetan yang mayoritasnya adalah petani memerlukan fasilitas prasarana penunjang seperti infrastruktur jalan sebagai akses masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya serta sebagai akses distribusi barang hasil pertanian dari sawah ke pabrik. Infrastruktur jembatan sebagai penghubung antar daerah dan antara pemukiman penduduk dengan lahan persawahan masyarakat desa yang ada di daerah seberang, karena sebagian lahan persawahan masyarakat Desa Parijatahwetan berada di desa seberang yang dipisahkan oleh sungai yang lebar dan panjang. Selain itu juga yang tak kalah

pentingnya yaitu fasilitas penunjang berupa saluran irigasi yang sangat penting bagi produksi pertanian. Prasarana fisik diatas merupakan fasilitas penunjang yang sangat mutlak dibutuhkan oleh masyarakat desa. Oleh sebab itu pembangunan dirasa sangat penting karena hal itu merupakan kebutuhan masyarakat desa yang akan berdampak bagi kelancaran kegiatan perekonomian yang ada di desa. Sehingga perlu adanya kesigapan atau responsivitas dari aparat pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Kesigapan atau responsivitas aparat pemerintah Desa Parijatahwetan sangat diperlukan terhadap kebutuhan masyarakat desa yang dalam hal ini adalah berupa kebutuhan prasarana penunjang aktifitas sehari-hari. Sikap responsif aparat pemerintah desa merupakan salah satu bentuk kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan pembangunan yang ada di desa sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat pemerintah desa, karena aparat pemerintah desa merupakan aktor dalam perumusan suatu kebijakan dan perencanaan serta pelaksana dalam proses pelaksanaan pembangunan. Selain kinerja pemerintah yang baik, peran serta masyarakat juga sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan yang ada di desa. Masyarakat desa berperan sebagai pengawas kinerja pemerintah serta dalam proses pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga peran serta masyarakat juga bisa dalam bentuk ikut berpartisipasi melakukan pembangunan. Partisipasi masyarakat untuk saling bergotong royong melakukan pembangunan tidak terlepas dari peran kinerja pemerintah Desa Parijatahwetan dalam upayanya mendorong kesadaran

masyarakat akan pentingnya pembangunan yang sangat bermanfaat dan berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian desa.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas menunjukkan betapa pentingnya kinerja aparat pemerintah desa dalam pembangunan fisik pedesaan.

Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK PEDESAAN**
(Studi di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa Parijatahwetan jika dilihat dari segi aparatnya?
2. Bagaimana proses pelaksanaan program pembangunan fisik pedesaan di Desa Parijatahwetan?
3. Apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam proses pelaksanaan program pembangunan fisik pedesaan di Desa Parijatahwetan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Desa Parijatahwetan dilihat dari segi aparatnya.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan program pembangunan fisik pedesaan di Desa Parijatahwetan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam proses pelaksanaan program pembangunan fisik pedesaan di Desa Parijatahwetan.

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Adapun kontribusi penelitian yang diharapkan yaitu :

- 1) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ilmu Administrasi dalam menambah bahan kajian perbandingan bagi yang menggunakannya.
- 2) Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai permasalahan dan juga masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan pedesaan.
- 3) Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama pemerintah desa dan masyarakat dalam pembangunan pedesaan.
- 4) Bagi penulis, berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir dan melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika ini dibuat oleh penulis agar pembaca mampu dengan mudah memahami isi dan makna yang terkandung serta memahami maksud dan tujuan

dari penyusunan skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, memberikan pengertian secara umum tentang beberapa hal yakni berisi tentang latar belakang masalah dan perumusan masalah yang diambil, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang pembahasan kinerja pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pembangunan fisik pedesaan.

BAB III: METODE PENELITIAN, membahas metode-metode yang digunakan dalam penelitian yakni jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini menguraikan tentang gambaran umum yang meliputi penyajian dan fokus pembahasan yang diperoleh selama penelitian. Penyajian data umum merupakan gambaran pada lokasi penelitian yang disusun menurut keperluan penilaian serta penyajian data fokus yang disesuaikan dengan focus penelitian kemudian membahasnya.

BAB V : PENUTUP, Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang ada secara keseluruhan disertai saran-saran yang diperlukan sehubungan dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Pembangunan

1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Istilah administrasi (*administration*) ini diartikan sebagai proses kegiatan penataan usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu menurut Thoha (1983) dalam Siswanto (1988:9). Sedangkan pengertian lain menyebutkan bahwa administrasi adalah setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian pengertian administrasi ini sebenarnya sama dengan pengertian tata usaha, yaitu proses penyelenggaraan terhadap keterangan-keterangan (informasi) yang berwujud pada aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim dan menyimpan (Siswanto,1988:9).

Administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu: pertama, tentang administrasi dan kedua, tentang pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). Dari

pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 1979: 2 - 4)

Administrasi pembangunan berperan aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, sedangkan dalam ilmu administrasi negara bersifat netral terhadap tujuan-tujuan pembangunan. Administrasi pembangunan berorientasi pada upaya yang mendorong perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik dan berorientasi pada masa depan, sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan secara efektivitas/tertib,efisien pada masing-masing unit pemerintah. Administrasi pembangunan berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (*inovation*) kearah keadaan yang dianggap lebih baik untuk suatu masyarakat di masa yang akan datang. Dalam administrasi pembangunan, aparatur pemerintah merupakan administrator dan juga bisa menjadi penggerak perubahan.

B. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Sebelum membahas tentang pengertian pemerintahan desa, perlu kiranya mengetahui tentang pengertian desa itu sendiri. Berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Tentang Desa, disebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh Mariun dalam Siswanto (1988:10), menurutnya desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat teritorial yang berpemerintahan sendiri (*otonom*). Sedangkan Widjaja (2002:44) menjelaskan pengertian desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan beberapa daerah di kabupaten. Kewenangan desa menurut Widjaja (2002:45) mencakup:

- 1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- 2) Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah.
- 3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten.

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 Tentang Desa). Penyelenggaraan pemerintah desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya (PEMENDAGRI No. 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).

Posisi pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan nasional, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2002:43)

Pemerintah desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Selain menjalankan tugasnya dalam bidang pemerintahan dan bidang pembangunan yang dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga Lembaga Kemasyarakatan Desa juga melaksanakan tugas dalam bidang kemasyarakatan, dimana dalam bidang kemasyarakatan, kepala desa dan perangkat desa berperan aktif dalam menangani tugas dalam bidang kemasyarakatan ini. Pemerintah desa turut serta dalam membina masyarakat desa, seperti yang kita ketahui pemerintah desa mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Lebih lanjut Widjaja (2002:47) mengemukakan bahwa pemerintah desa/marga terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa tersebut terdiri atas:

- a. Unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretariat desa dan perangkat tata usaha.
- b. Unsur pelaksana, yaitu pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tani desa dan urusan keamanan.
- c. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa seperti kepala dusun.

Kepala desa adalah pimpinan pemerintahan desa yang secara langsung dipilih oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (PILKADES) dan ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu bupati/walikota atas nama gubernur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada BPD dan menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Peran kepala desa menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang lebih, sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Peran kepala desa berada pada posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Terlebih bagi kepala desa yang mewakili kewenangan sendiri dalam

mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Karena tugas yang cukup berat bagi seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka kepala desa dalam menyelenggarakan otonomi daerah dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang secara bersama-sama menyelenggarakan otonomi desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Menurut Widjaja (2002:49) dalam melaksanakan fungsinya kepala desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- 2) Membina kehidupan masyarakat desa
- 3) Membina perekonomian desa
- 4) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- 5) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- 6) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
- 7) Mengajukan rancangan peraturan desa dan bersama BPD menetapkan sebagai peraturan desa.
- 8) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

Kepala desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa merupakan unsur pembantu kepala desa dalam pemerintahan desa yang dipilih atau diangkat oleh kepala desa tanpa pemilihan sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat yang memenuhi syarat dan secara formal ditetapkan dengan kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perangkat desa itu sendiri terdiri dari:

a. Sekretaris desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 202 ayat 3, menyebutkan bahwa sekretaris desa di isi oleh pegawai negeri sipil (PNS) yang

memenuhi persyaratan. Sekretaris desa yang ada selama ini yang bukan PNS secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Sekretaris desa dalam tugasnya melaksanakan pelayanan administratif kepala desa. Tugas dan fungsi sekretaris desa menurut Ndraha (1984:86) yaitu:

- 1) Membantu kepala desa dibidang organisasi pemerintahan desa dan kantor desa
- 2) Mengkoordinasikan semua pekerjaan-pekerjaan kantor desa
- 3) Melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan membuat pelaporanperiodik tentang perkembangan desa
- 4) Melaksanakan urusan keuangan
- 5) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

b. Unsur pelaksana teknis lapangan

Menurut Suwignyo (1986:189) unsur pelaksanaan meliputi, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan masyarakat, kepala urusan ekonomi pembangunan dan kepala urusan umum. Unsur pelaksana disini yang dimaksud adalah semua kepala urusan yang ada di desa. Dalam proses pertanggung jawaban unsur pelaksanaan bertanggung jawab kepada kepala desa dengan perantara sekretaris desa secara administratif. Kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usulan dan saran dari kepala desa yang bersangkutan.

c. Unsur wilayah

Unsur wilayah adalah unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa seperti kepala dusun. Setiap kepala dusun memiliki tugas dan fungsi dalam sebuah pemerintahan desa. Hal tersebut dikemukakan oleh Ndraha (1984:82) yang berpendapat bahwa kepala dusun memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu kepala desa dalam menjalankan kemakmuran desanya

- 2) Membantu kepala desa dalam rangka pelayanan masyarakat dibidang perekonomian, kerohanian, kesusilaan, kemasyarakatan, dan ketertiban serta keamanan desa
- 3) Membantu kepala desa dalam mencari dan mamajukan sumber-sumber keuangan desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa. Ada beberapa jenis hubungan antara pemerintah desa dengan BPD. Pertama yaitu, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. Kedua, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel dimana mereka bekerja bersama sama dengan bertumpu pada keyakinan dan kepercayaan serta saling menghargai satu sama lain.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No.6 Tahun 2014 pasal 55 ayat 1-3 berfungsi untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi

sebagai pengawas kebijakan. Menurut Widjaja (2002:131-132) BPD mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan, sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.
- c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- e. Bersama-sama kepala desa membentuk keputusan desa
- f. Bersama-sama kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMD)

3. Lembaga Kemasyarakatan

Selain pemerintah desa dan BPD, ada satu lagi lembaga yang juga berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Lembaga tersebut adalah lembaga kemasyarakatan. Lembaga non-pemerintah ini dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Bahwa lembaga kemasyarakatan desa pada hakekatnya merupakan mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses masyarakat agar lebih berperan aktif dalam pengelolaan pembangunan secara partisipatif, pelayanan publik, pelaksanaan demokratisasi, dan mewujudkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa (PERMENDAGRI No. 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan)

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Parijatahwetan antara lain yaitu adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Lembaga Pemberdayaan Pemerintah Desa (LPMD). Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai pendukung pemerintah desa. Tugasnya adalah membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini sebagai berikut.

1. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan;
2. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat. (UU No. 72 Tahun 2005 pasal 91 ayat 1-3 Tentang Desa)

C. Konsp Kinerja

1. Pengertian kinerja

Kinerja berasal dari kata *performance* yang berarti suatu hasil kerja atau prestasi kerja. Pendapat lain mengatakan bahwa kinerja bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung (Wibowo,2007:7). Menurut Mangkunegara (2005:67) menjelaskan bahwa kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan suatu bentuk ukuran efisiensi dan efektifitas suatu organisasi, baik itu pegawainya maupun manajernya, seberapa baik pegawai dan manajer

tersebut menjalankan tugas dan fungsinya yang merupakan tanggung jawabnya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja bisa jadi berkaitan dengan individu pelaksana, dalam arti bahwa kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor intern yang ada dalam diri individu, ini berarti berkaitan pula dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan suatu kerja. Pendapat ini terlihat dalam ulasan yang diberikan oleh Sudarto (1999:3) yang mengatakan bahwa kinerja individu adalah hasil konkrit yang dapat diukur dari hasil kerja individu (produktivitas kerja), dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam diri individu yang membutuhkan standar kerja sebagai alat ukur sehingga ukuran kinerja bersifat kualitatif dan tidak selalu mencerminkan potensi organisasi. Kinerja diukur dengan instrumen yang dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam beberapa ukuran kerja dengan instrumen yang dikembangkan dalam studi yang tergabung dalam beberapa ukuran kerja secara umum, yang kemudian diterjemahkan dalam penilaian perilaku secara mendasar yang meliputi:

- a. Kuantitas kerja
- b. Kualitas kerja
- c. Pengetahuan tentang pekerjaan
- d. Pendapat atau pernyataan yang disampaikan
- e. Keputusan yang diambil
- f. Perencanaan kerja dan,
- g. Daerah organisasi kerja.

Ukuran kerja diatas menjadi suatu acuan kinerja individu, dimana apabila seorang individu atau pegawai paham betul tentang ukuran kerja yang harus dilaksanakan oleh seorang pegawai, maka kinerja pegawai akan memberikan

suatu hasil yang baik. Untuk mendapatkan suatu hasil yang baik seorang aparat dituntut memiliki Mentalitas atau kedisiplinan yaitu sikap jiwa dan tingkah laku seseorang yang selalu menjadikan berhubungan. Menurut Prijodarminto (1994:54), Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Karena sudah menyatu dengannya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana tidak berbuat sebagaimana lazimnya.

Kedisiplinan dalam diri seseorang sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu tugas, apalagi dalam suatu pemerintahan seperti pemerintahan desa. Selain kedisiplinan, seorang aparat juga harus memiliki motivasi dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang dijelaskan oleh campbell dalam Purwanto (1992:73) yang mengatakan bahwa motivasi mencakup didalamnya arah dan tujuan tingkah laku, kekuatan respons dan kegigihan tingkah laku. Istilah tersebut mencakup sejumlah konsep dorongan (*drive*), kebutuhan (*need*), rangsangan (*incentive*), Ganjaran (*reward*), penguatan (*reinforcement*), ketepatan tujuan (*goal setting*), harapan (*expectancy*) dan sebagainya.

Motivasi yang dimiliki oleh seorang aparat pemerintah akan menciptakan suatu moralitas atau semangat kerja seorang individu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Hal tersebut berguna dalam peningkatan kualitas dan kuantitas kerjanya. Kinerja seorang aparat yang baik juga didukung oleh

kemampuan yang dimiliki oleh setiap diri aparat. Seorang pegawai memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Tujuan organisasi akan semakin mudah dicapai apabila pegawai/individu dari organisasi tersebut memiliki suatu kemampuan untuk berprestasi dalam melaksanakan tugas yang merupakan tanggung jawabnya. Kemampuan merupakan suatu potensi yang dimiliki dalam diri seseorang untuk melakukan berbagai hal. Menurut Robbins (2009:57) kemampuan merupakan kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam satu pekerjaan. Lebih lanjut Robbins (2009:57) menyatakan bahwa kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri dari dua kelompok faktor, yaitu:

- a. Kemampuan intelektual (*Intellectual Ability*), merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental (berfikir, menalar dan memecahkan masalah)
- b. Kemampuan fisik (*Physical Ability*), merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan dan karakteristik serupa.

Beberapa faktor di atas merupakan hal yang berpengaruh terhadap kinerja seorang individu. Selain kinerja individu juga terdapat kinerja organisasi. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja suatu organisasi. Menurut Nasucha (2004:107) yang mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha – usaha yang sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk

mencapai kebutuhannya secara efektif. Selanjutnya, Atmosudirdjo (2003:11) mengemukakan bahwa kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang telah ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Hubungan kinerja pegawai dengan kinerja organisasi sangat erat kaitannya, kinerja pegawai dalam sebuah organisasi mempengaruhi terhadap hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi. Baik buruknya hasil yang dicapai suatu organisasi juga ditentukan oleh kinerja pegawai organisasi itu sendiri, hal tersebut dikarenakan bahwa tercapainya tujuan organisasi tidak terlepas dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

2. Indikator Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan oleh organisasi dalam memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Informasi mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan tekanan bagi para pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-

perubahan dalam organisasi. Namun, sejauh ini informasi yang akurat mengenai kinerja birokrasi publik belum tersedia di dalam masyarakat. Terbatasnya informasi mengenai kinerja birokrasi publik adalah kompleksitas indikator kinerja, yang biasanya digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik (Dwiyanto, 2006:48)

Indikator kinerja merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan organisasi. Indikator kinerja diartikan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi. Indikator kinerja juga dapat dijadikan patokan (standar) menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai misi dan visi organisasi. Sedangkan kinerja pegawai, erat kaitannya dengan cara mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang sehingga perlu ditetapkan standar kinerja atau *performance standard*. T.R. Mitchell (1978) yang dikutip Sedarmayanti (2001:51) menyebutkan lima (5) aspek yang dijadikan indikator atau ukuran dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja seseorang, adalah :

- 1) *Quality of work*, yang terdiri dari komponen mutu hasil pekerjaan dan sikap dalam bekerja.
- 2) *Promptness*, merupakan suatu bentuk kedisiplinan yang terdiri dari komponen tingkat kehadiran dan pemanfaatan waktu luang.
- 3) *Initiative*, merupakan sebuah motivasi atau dorongan yang terdiri dari komponen tingkat inisiatif dan tanggung jawab terhadap pekerjaan.
- 4) *Capability*, merupakan sebuah kemampuan yang terdiri dari komponen kehandalan dalam menyelesaikan tugas dan pengetahuan tentang pekerjaan.
- 5) *Communication*, yang terdiri dari komponen kejujuran dalam menyampaikan pendapat dan kerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan.

Indikator kinerja diatas menjelaskan bahwa kinerja aparat bisa dikatakan baik apabila menghasilkan mutu pekerjaan dan sikap bekerja yang berkualitas.

Selain itu *promptness* yang merupakan suatu bentuk kedisiplinan sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan waktu luang yang dilakukan akan mempercepat dalam menyelesaikan segala tugas pemerintahan. Motivasi (*initiative*) yang merupakan sebuah tanggung jawab menjadi suatu dorongan bagi pegawai untuk bekerja lebih baik sehingga dapat meningkatkan keefektifan dan efisiensi dalam proses pelayanan kepada masyarakat.

Indikator diatas merupakan penilaian kinerja dalam menjalankan pemerintahan. Sedangkan untuk mengukur kinerja aparat dalam proses pelaksanaan suatu program menurut Mardiasmo (2002) terbagi menjadi lima yaitu:

- 1) Sistem perencanaan dan pengendalian
- 2) Spesifikasi teknis dan standarisasi
- 3) Kompetensi teknis dan profesionalisme
- 4) Mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar
- 5) Mekanisme sumber daya manusia

Sistem perencanaan dan pengendalian sangat berguna dalam menentukan skema insentif manajerial sebagai upaya untuk memperjelas tujuan suatu organisasi. Spesifikasi teknis dan standarisasi berguna dalam menentukan standar pelaksanaan kinerja dalam suatu program dan juga memungkinkan bagi pelaksana kegiatan untuk menentukan pilihan terbaik yang efisien dan efektif. Mekanisme ekonomi pasar dan mekanisme ekonomi akan membantu menentukan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik untuk mencapai target sasaran yang telah disepakati bersama. Sedangkan untuk mekanisme sumberdaya

berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut, selain bermanfaat sebagai upaya meningkatkan keefektifan juga sebagai bentuk pemberdayaan bagi masyarakat agar lebih terampil dalam berbagai hal.

Indikator penilaian kinerja aparat tidak hanya dalam proses pelaksanaan melainkan juga dalam hasil yang diperoleh (*output*). Menurut Zeithaml, Parasuraman dan Berry dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005:175) menjelaskan tentang indikator yang digunakan untuk menilai kinerja organisasi, yang terdiri atas beberapa faktor berikut :

- a. *Tangibles* atau ketampakan fisik, artinya ketampakan fisik dari gedung, peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh *providers*.
- b. *Reliability* atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat.
- c. *Responsiveness* atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong *customers* dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas.
- d. *Assurance* atau kepastian adalah pengetahuan dan kesopanan para pekerja dan kemampuan mereka dalam memberikan kepercayaan kepada *customers*.
- e. *Emphaty* adalah perlakuan atau perhatian pribadi yang diberikan oleh *providers* kepada *customers*.

Dari berbagai indikator penilaian kinerja diatas menunjukkan bahwa kinerja seorang pegawai bisa dikatakan baik apabila memperoleh hasil yang berupa *output (tangibels)* atau ketampakan fisik yaitu berupa hasil ketampakan fisik yang berupa gedung, jalan, dan infrastruktur fisik lain yang dapat diwujudkan oleh para pegawai. Selain itu juga tentang responsivitas merupakan indikator kinerja yang berorientasi pada proses. Reliability dan responsivitas ini dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat .

3. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Mangkunegara(2005:67), faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja ada dua yaitu faktor kemampuan(*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*)

a. Faktor kemampuan

Secara psikologis, kemampuan(*ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (*IQ*) dan kemampuan reality (*knowledge + skill*). Artinya, pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (*the right man in the right place, the right man on the right job*)

b. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seorang pegawai dalam menghadapi situasi(*situation*) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja yang maksimal.

Faktor yang mempengaruhi kinerja juga dijelaskan oleh Amstrong dan Baron(1988) dalam Wibisono(2009:99) yang mengungkapkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja ada lima, yaitu:

- 1) *Personal factor*, ditentukan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu

- 2) *Leadership factor*, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan team leader
- 3) *Team factor*, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan sekerja
- 4) *System factor*, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi
- 5) *Contextual/situasional factor*, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kinerja sangat ditentukan oleh berbagai faktor, mulai dari kemampuan, motivasi, pemimpin serta lingkungan. Kemampuan dan motivasi yang dimiliki oleh suatu pegawai atau individu menjadi suatu acuan atau dasar bagi seorang individu dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Dorongan yang kuat dari seorang pemimpin untuk membimbing para pegawai serta dukungan dari rekan kerja menjadi faktor ekstern yang berguna dalam proses pelaksanaan kerja. Dengan dukungan yang diberikan serta bimbingan dari seorang pemimpin akan berdampak pada kualitas hasil kerja yang dicapai seorang pegawai. Faktor yang tidak kalah pentingnya yaitu faktor sistem yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan suatu tugas, dengan adanya sistem kinerja seorang pegawai akan lebih terorganisir dan tersusun rapi.

D. Pembangunan Pedesaan

1. Pengertian Pembangunan Pedesaan

Sebelum menelaah tentang pembangunan desa, maka terlebih dahulu perlu memahami pengertian dasar dari pembangunan pada umumnya. Menurut Siagian (1979:2) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-*

building). Pembangunan pedesaan mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional. Pembangunan daerah pedesaan diarahkan untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selain itu juga untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor pertanian, industri dan perdagangan antar desa dan untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.

Pembangunan pedesaan menurut UU No. 6 tahun 2014 pasal 78 ayat 1-3 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup. Pembangunan pedesaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pembangunan desa yang sebagaimana dimaksud mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Pembangunan pedesaan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. (Adisasmita,2013:63)

Kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah, untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan itu pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk seluruh rakyat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi

(wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan. Masa depan merupakan impian tentang keadaan masa depan yang lebih baik dan lebih mudah dalam arti tercapainya tingkat kemakmuran yang lebih tinggi (Adisasmita,2013:75)

Terdapat tiga prinsip pokok pembangunan pedesaan menurut Adisasmita (2013:75)

yaitu:

- 1) Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi Pembangunan. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan tersebut yaitu (a) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, (b) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (c) stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan di setiap sektor, termasuk desa dan kota, di setiap wilayah dan antar wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
- 2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan mensyaratkan setiap daerah lebih mengandalkan sumber-sumber alam yang terbaharui sebagai sumber pertumbuhan. Disamping itu setiap desa perlu memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) secara luas, memanfaatkan modal fisik, prasarana mesin-mesin, dan peralatan seefisien mungkin.
- 3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijaksanaan deregulasi, debirokratisasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Pembangunan infrastruktur pedesaan yang berupa pembangunan fisik tidak semudah membalik telapak tangan dan sekejap jadi. Pada proses pelaksanaan program pemerintah desa yang berupa pembangunan fisik ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Setelah tahapan perencanaan sudah tersusun dengan rapi dilanjutkan dengan proses pelaksanaan program. Dalam suatu pelaksanaan pembangunan diperlukan suatu mekanisme pelaksanaan atau prosedur pelaksanaan. Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996:1092), prosedur adalah cara mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkat-tingkatnya. Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan

satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan utama dari suatu organisasi. Sedangkan menurut Ismail masya (1994 : 74) yang mengatakan bahwa “Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.

Mekanisme pelaksanaan merupakan suatu prosedur atau acuan dalam pelaksanaan suatu program. Mekanisme pelaksanaan yang sudah ditetapkan oleh panitia pelaksana pembangunan itu sendiri. Dalam mekanisme pelaksanaan terdapat manajemen waktu didalamnya. Maksud dari penetapan mekanisme pelaksanaan itu sendiri diharapkan agar dalam proses pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana.

Pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya sumber dana. Sumber dana merupakan pembiayaan dalam sebuah pembangunan. Dalam sebuah pembangunan dibutuhkan dana sebagai biaya dalam proses pelaksanaan pembangunan. Pembangunan pasti membutuhkan bahan dan alat agar bangunan tersebut bisa menjadi bangunan yang memiliki fungsi dan dapat berguna dan bermanfaat. Bahan dan alat membutuhkan biaya untuk memperolehnya, oleh sebab itu dana menjadi sumber pokok dalam proses pembangunan.

Secara teori, Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari

APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
- Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
- bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- Pinjaman desa (<http://id.wikipedia.org/wiki/Desa>) diakses tanggal 4 juni 2013

APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Sedangkan menurut Siswanto (1988:66) mengatakan bahwa sumber dana dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu:

- 1) Swadaya masyarakat desa/kelurahan setempat baik berupa uang maupun tenaga
- 2) Bantuan pemerintah baik dari Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Tingkat I maupun dari Pemerintah Pusat.
- 3) Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah sumber dana diperoleh tahapan selanjutnya yaitu proses pencairan dana. Pencairan dana dilakukan disaat pembangunan telah siap dilaksanakan. Pencairan dana dalam pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI) makna atau definisi pencairan dana adalah suatu tindakan atau kegiatan menyalurkan, mengeluarkan, merealisasikan atau kegiatan menguangkan dan memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk suatu keperluan tertentu.

Proses pencairan dana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa harus disertai dengan surat perintah pencairan dana oleh pihak terkait. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 13 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, pengertian SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Dalam sebuah pembangunan tidak hanya dibutuhkan sumber dana saja, melainkan tenaga kerja, bahan dan alat. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak berjalan secara instan, melainkan membutuhkan suatu mobilisasi. Mobilisasi tenaga kerja, bahan dan alat termasuk dalam teori pengeralahan sumber daya. Mobilisasi dapat diartikan sebagai sebuah gerakan. Mobilisasi tenaga kerja merupakan sebuah gerakan sosial yang muncul karena tersedianya faktor-faktor pendukungnya, seperti adanya sumber-sumber pendukung, tersedianya kelompok koalisi dan adanya dukungan dana, adanya tekanan dan upaya pengorganisasian yang efektif serta sumber daya yang penting berupa ideologi (Fakih, 2002:xxvii)

Mobilisasi tenaga kerja/bahan/alat merupakan kegiatan mendatangkan tenaga kerja yang diperlukan (masyarakat yang terdaftar untuk bekerja) guna melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dilokasi pekerjaan. Sedangkan mobilisasi bahan dan alat adalah mendatangkan bahan (pembelian) dan alat



(sewa) yang diperlukan untuk pembangunan sarana/prasarana kelokasi pekerjaan.

Sebagai pedoman pelaksanaannya adalah daftar rencana pengadaan yang telah dibuat dan disepakati dalam musyawarah persiapan pelaksanaan konstruksi (MP2K) sebelumnya.

2. Pembangunan Fisik

Pembangunan desa memiliki ruang lingkup pelaksanaan di pedesaan, maka dapat ditegaskan bahwa pembangunan desa adalah membangun prasarana, membangun usaha tani atau membangun pertanian. Pembangunan fisik adalah kebutuhan yang sangat mutlak dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut pembangunan desa.

Wujud pembangunan fisik terdiri dari :

- 1) Prasarana perhubungan
 - a) Jalan
 - b) Jembatan
 - c) Plengsengan penahan jalan
 - d) Gorong – gorong dan lain-lain
- 2) Prasarana sosial
 - a) Poskamling
 - b) Polindes
 - c) Balai dan Kantor desa
 - d) Sekolah
- 3) Prasarana Produksi
 - a) Saluran irigasi
 - b) Waduk/bendungan
 - c) Pintu pembagi air dan lain-lain.

Menurut Adisasmita (2013: 58) yang mengemukakan sasaran umum yang harus dicapai dalam pembangunan pedesaan adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah.

- 2) Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam
- 3) Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.
- 4) Terwujudnya penguatan kelembagaan yang mencakup prosedur perencanaan yang melibatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan local yang semakin berdaya mampu.
- 5) Percepatan pertumbuhan dari desa swadaya menjadi desa swakarya dan seterusnya menjadi desa swasembada.
- 6) Peningkatan keterampilan dalam berproduksi (pertanian, industri kecil, dan lainnya) dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.

Pembangunan fisik atau infrastruktur, menurut Effendi (2002:48) yang menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi, serta agar para investor mau menanamkan modalnya di daerah, apabila tidak demikian biaya yang dikeluarkan untuk penanaman modal menjadi lebih besar dan berpengaruh pada harga produk yang dihasilkan dan tentunya akan lebih mahal dibandingkan dengan yang lain, sehingga produk yang dihasilkan tidak kompetitif.

Roda perekonomian akan berjalan jikalau tersedia sarana dan prasarana yang memadai seperti jalan dan jembatan. Tanpa adanya jalan dan jembatan sebagai infrastruktur fisik, suatu daerah akan terisolir dan secara tidak langsung kalau dibiarkan berlama-lama tidak akan mengalami kemajuan, entah itu kemajuan teknologi karena tersendatnya arus distribusi dan kemajuan sumber

daya manusianya karena hanya berkegiatan diseperti itu-itu saja. Tanpa adanya perkembangan karena sarana dan prasarana sebagai penunjang akses mereka untuk bergerak tidak tersedia. Hal inilah mengapa, pembangunan infastruktur fisik seperti jalan, jembatan dan saluran irigasi dipedesaan sangat mutlak keberadaanya. Karena semua itu adalah penunjang berjalannya roda perekonomian masyarakat pedesaan.

Pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan. Sasaran umum yang diharapkan dapat dicapai adalah pertumbuhan ekonomi pedesaan berbasis sumber daya pertanian (*agricultural resource based*) yang ditunjang oleh kegiatan sektor non pertanian dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat kecil, dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat akan menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat desa.

3. Tujuan pembangunan pedesaan

Pembangunan pedesaan memiliki dua tujuan yaitu tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang (tukajang) dan tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek (tukadek). Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang secara langsung dilakukan melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh

bagi pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek yaitu peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA).

Pada hakikatnya tujuan umum pembangunan pedesaan itu adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Tujuan pembangunan desa secara spasial dapat dirumuskan yaitu terciptanya kawasan pedesaan mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi dan bersinergi dengan kawasan-kawasan pedesaan lain melalui pembangunan komprehensif dan berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

(Adisasmita : 2013:57)



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan bagaimana penelitian untuk skripsi tersebut dilaksanakan. Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian yang digunakan harus didasarkan pada permasalahan yang dihadapi dalam sebuah penelitian, kesesuaian metode yang digunakan berpengaruh pada hasil yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Dengan metode penelitian akan diperoleh data dan informasi yang mendukung analisa dalam penulisan skripsi ini, selain itu juga akan menjadi jelas dan terfokus ruang lingkup penelitiannya. Pada hakikatnya penelitian adalah suatu pendekatan yang dilakukan dalam hal mencari kebenaran, cara mendapatkan kebenaran tersebut dilakukan melalui metode ilmiah. Dan bertujuan untuk mengontrol serat menjelaskan gejala-gejala yang teramati guna mendapatkan kebenaran yang di inginkan.

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang kinerja pemerintah desa dalam pemabangunan fisik pedesaan ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang meneliti status manusia, suatu objek, suatu situasi atau kondisi, sitem pemikiran, ataupun suatu luas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan penggunaan penelitian dengan metode deskriptif adalah berusaha untuk menggambarkan /mendeskripsikan, memaparkan berbagai fenomena sosial yang terjadi pada objek penelitian secara sistematis, faktual untuk

dianalisis dengan cermat dan mendalam. Diungkapkan oleh Sugiyono dalam Pasolong (2012: 161) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*).

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana kinerja pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan agar mencapai suatu keberhasilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan pembangunannya. Dengan demikian penelitian ini berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menginterpretasikan permasalahan serta mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut tentang kinerja pemerintah desa dalam pembangunan fisik pedesaan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berfungsi untuk memilih data yang relevan. Pada dasarnya fokus penelitian ini merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Dengan adanya penetapan fokus penelitian, maka dapat dilakukan pembatasan terhadap fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi agar penelitian yang dilakukan dapat terarah, tidak meluas dan lebih terkonsentrasi serta mendapatkan informasi yang lebih relevan dengan objek penelitian yang sedang diteliti.

Berdasarkan judul skripsi ini yaitu kinerja pemerintah desa dalam pembangunan fisik pedesaan serta rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. kinerja aparat pemerintah desa
 - a. kedisiplinan aparat
 - b. kemampuan kerja aparat
 - c. motivasi aparat
2. Proses pelaksanaan program
 - a. Mekanisme pelaksanaan
 - b. Sumber dana
 - c. Pencairan dana
 - d. Mobilisasi tenaga kerja, bahan, alat
3. Realisasi
 - a. Wujud pembangunan fisik
 - b. Kemanfaatan
4. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik pedesaan di Desa Parijatah Wetan
 - a. Faktor penghambat
 - b. Faktor pendukung

C. Lokasi dan situs penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, yang difokuskan di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono yang digunakan sebagai lokasi penelitian, dengan alasan sebagai berikut:

1. Desa Parijatahwetan merupakan suatu desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, pembangunan prasarana penunjang (pembangunan fisik) seperti prasarana jalan, jembatan, drainase dan lainnya menjadi kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan perekonomian di desa yang bermata pencaharian sebagai petani.
2. Adanya fenomena sikap yang partisipatif dari masyarakat Desa Parijatahwetan terhadap pembangunan desa yang tidak terlepas dari peran kinerja desa dalam upayanya mendorong masyarakat untuk bersikap partisipatif dalam pembangunan di desa.
3. Desa Parijatahwetan sering mendapatkan Reward berupa kucuran dana pembangunan dari pemerintah daerah karena dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak masyarakat desa parijatah wetan sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah memeberikan Reward yang berupa kucuran dana pembangunan kepada desa parijatah wetan. Hal tersebut tidak terlepas dari kinerja para aparat pemerintah desa dalam mensosialisasikan tentang pentingnya pajak bagi pembangunan nasional.

Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Situs penelitian terletak Pemerintah Desa Parijatah wetan.

D. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland dalam moleong (2004:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini , data yang diperlukan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang pertama diambil langsung dari sumbernya atau nara sumber melalui wawancara. Informasi sebagai sumber data dipilih dengan didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, yaitu:

- 1) Pemerintah desa
- 2) Masyarakat desa

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumbernya langsung melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Data yang dimaksud sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen dan arsip-arsip dilapangan desa parijatah wetan yang relevan dengan masalah dan fokus sehingga dapat dipakai sebagai pendukung dalam penelitian ini, seperti yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur fisik desa. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh adalah data mengenai pembangunan fisik desa parijatah wetan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan metode atau teknik penelitian lapangan, yaitu peneliti terjun langsung dilapangan/ditempat (obyek/subyek) penelitian, sehingga data yang diperoleh nantinya benar-benar obyektif dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk keperluan pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. *Depth interview* (wawancara secara mendalam)

Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan secara terstruktur guna menggali informasi yang factual seputar permasalahan yang berkaitan dengan kinerja aparat pemerintah desa dalam pembangunan fisik pedesaan, serta pengoptimalan tugas-tugas yang diembannya demi tercapai suatu kinerja aparat yang handal, sehingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan harapan yang diinginkan.

2. *Observasi* (pengamatan)

Metode pengamatan (observasi) dalam penelitian ini adalah pengamatan langsung di lapangan dan melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian secara sistematis terhadap obyek-obyek yang diselidiki serta mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen / arsip-arsip di lapangan yang dianggap relevan pada

lokasi dan situs penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan maksud mendapatkan data primer dan data sekunder yang digunakan dalam proses penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah atau untuk mencapai tujuan penelitian, seperti yang dikemukakan oleh Moleong sebagai berikut:

“kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisa, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrument penelitian atau alat penelitian disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.”

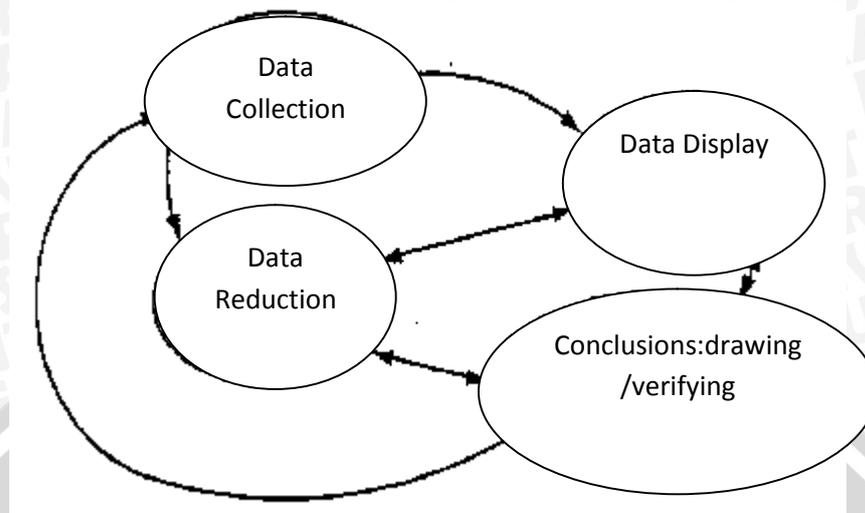
Agar data mengenai variable-variabel penelitian yang dibutuhkan bisa didapatkan, maka dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah:

1. Peneliti Sendiri, sebagai instrumen kunci karena peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitiannya.
2. Pedoman Wawancara (*interview guide*), yaitu berupa materi atau poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan narasumber. Pedoman wawancara juga berguna untuk mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.
3. Perangkat Penunjang, meliputi buku catatan, alat tulis menulis untuk mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian, serta alat bantu untuk merekam dalam proses wawancara.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution dalam Sugiono (2012:245) mengatakan *“analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun dilapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”.*

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Karena sesuai untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang akan diteliti dan sesuai dengan fokus serta teknik pengambilan data yang ada dalam penelitian ini. Dalam analisa data kualitatif ini maka analisis datanya nanti akan lebih banyak di dominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian-uraian.. Oleh karena itu dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka metode analisis datanya adalah metode analisis data kualitatif. Dengan pertimbangan bahwa penelitian ini berusaha menggambarkan mengenai situasi dan kondisi suatu kejadian yang ada di lapangan sesuai dengan apa adanya. Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1 Bagan Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Milles and Huberman dalam Sugiono(2012)

1. *Data Collection* (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data yaitu suatu langkah mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Langkah pengumpulan data dengan cara wawancara langsung, obeservasi(pengamatan) dan dokumentasi. Dari berbagai data yang diperoleh selanjtnya dikumpulkan menjadi satu.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek-proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan yang selanjutnya diverifikasi.

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari peneliti. Penyajian data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menyajikan data-data yang diperoleh dilapangan , kemudian dioalah dan disajikan secara sistematis dengan menggunakan table-tabel, gambar dan bentuk kalimat naratif atau kesimpulan kalimat , sehingga peneliti dapat melihat secara keseluruhan.

4. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan dan Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan pengumpulan data di lapangan secara lengkap selama penelitian berlangsung. Data hasil penelitian selanjutnya dikumpulkan dan dianalisa yang akhirnya akan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi data dalam metodologi penelitian kualitatif ini dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Teknik yang digunakan untuk memverifikasikan yaitu ketekunan, kecukupan refrensial, pengamatan dan pengecekan ulang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Lokasi Penelitian

1) Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang ada dalam kawasan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi berada diujung paling timur Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi dijuluki dengan sebutan “Sunrise of Java” karena letaknya diujung paling timur pulau Jawa. Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur bahkan di pulau Jawa. Luas Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 5.782,50 km². Wilayahnya cukup beragam dari dataran rendah hingga dataran tinggi yang meliputi area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%, permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya

Kabupaten Banyuwangi berbatasan dengan Kabupaten Situbondo sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Kabupaten Jember serta kabupaten Bondowoso di sebelah barat dan Selat Bali di sebelah timur. Bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Dataran yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai

sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah. Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara dimana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Administratif Kabupaten Banyuwangi terdiri atas 24 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan yaitu sebanyak 189 desa. (Admin, 2013)



Gambar 2. Peta Kabupaten Banyuwangi

Sumber: www://banyuwangikab.go.id

Gambar 2. menunjukkan bahwa keberadaan dari Kabupaten Banyuwangi diapit oleh tiga kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Jember disebelah barat, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo disebelah utara. Kabupaten Banyuwangi juga berbatasan dengan Samudera Indonesia di sebelah selatan dan Selat Bali di sebelah timur.

2) Gambaran Umum Desa Parijatahwetan

Desa Parijatahwetan merupakan satu dari 189 desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Desa Parijatahwetan terletak di Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Desa Parijatahwetan berbatasan dengan Kecamatan Rogojampi di sebelah utara, Desa Wonosobo di sebelah timur, Desa Kepundungan di sebelah selatan dan Desa Parijatahkulon di sebelah barat. Luas Desa Parijatah Wetan yaitu sebesar 566,363 Ha/m² yang terdiri:

Tabel 1. Luas Wilayah Desa Parijatahwetan Menurut Penggunaan

No	Uraian	Satuan
1	Luas Pemukiman	47.126 Ha/m ²
2	Luas Persawahan	415.123 Ha/m ²
3	Luas Kuburan	3.8 Ha/m ²
4	Luas Pekarangan	49.252 Ha/m ²
5	Perkantoran	1.82 Ha/m ²
6	Luas Prasarana umum lainnya	8.001 Ha/m ²
	Total Luas	566.363 Ha/m ²

Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013

Tabel 1. diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Desa Parijatahwetan jika dilihat dari data yang ada diatas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayahnya adalah persawahan yaitu seluas 415.123 Ha/m². Selanjutnya yaitu wilayah pekarangan 49.252 Ha/m², pemukiman 47.126 Ha/m² serta sisanya yaitu wilayah perkantoran dan prasarana umum lainnya.



Gambar 3. Peta Desa Parijatahwetan

Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013

Gambar 3. menunjukkan bahwa keberadaan Desa Parijatahwetan diapit oleh lima desa yang ada di Kecamatan Srono yaitu Desa Parijatahkulon di sebelah barat, Desa kepundungan dan Desa Sukomaju di sebelah selatan, Desa Sukonatar dan Desa Wonosobo di sebelah timur. Desa Parijatahwetan juga berbatasan dengan Kecamatan Rogojampi di sebelah utara. Jumlah penduduk Desa Parijatahwetan pada akhir tahun 2013 sebesar 8.057 jiwa yang terdiri dari 3.946 laki-laki dan 4.111 perempuan yang tersebar di lima dusun yang ada di Desa Parijatahwetan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Parijatahwetan Tahun 2013

No	Nama Dusun	Jumlah KK	L	P	Jumlah Jiwa
1	Sumberjo	586	916	929	1.845
2	Melik	390	730	762	1.492
3	Bongkoran	526	776	790	1.566
4	Parirejo	619	906	939	1.845
5	Sidorejo	447	616	634	1.250
6	Jumlah	2.568	3.946	4.111	8.057

Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013

Dari **Tabel 2.** diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Parijatahwetan tersebar secara merata di setiap dusunnya. Jumlah penduduk Dusun Sumberjo dan Dusun Parirejo berjumlah sama yaitu sebanyak 1.845 jiwa. Besarnya penduduk ke-lima dusun tersebut bermata pencaharian yang bermacam-macam. Berikut rincian tentang mata pencaharian penduduk Desa Parijatahwetan sebagai berikut:

Tabel 3. Mata pencaharian penduduk desa Parijatahwetan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	1003 orang	817 orang	1.820 orang
2	Buruh Tani	749 orang	635 orang	1.384 orang
3	Pegawai Negeri Sipil	75 orang	65 orang	140 orang
4	Perajin Industri Rumah Tangga	9 orang	3 orang	12 orang
5	Pedagang Keliling	11 orang	45 orang	56 orang
6	Peternak	8 orang	-	8 orang
7	TNI	6 orang	-	6 orang
8	POLRI	1 orang	-	1 orang
9	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	15 orang	2 orang	17 orang
10	Pengusaha Kecil dan Menengah	36 orang	42 orang	78 orang
11	Dukun Kampung Terlatih	5 orang	-	5 orang
12	Jasa Pengobatan Alternatif	3 orang	-	3 orang
13	Dosen Swasta	14 orang	-	14 orang
14	Pengusaha Besar	6 orang	-	6 orang
15	Seniman/Artis	11 orang	-	11 orang
16	Sopir	12 orang	-	12 orang
17	Tukang Becak	1 orang	-	1 orang
18	Karyawan Perusahaan Swasta	21 orang	17 orang	38 orang
19	Tukang Batu	15 orang	-	15 orang
	Jumlah			3.627 orang

Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013

Data **Tabel 3.** diatas menunjukkan bahwa dari 3.627 penduduk yang bekerja, sebagian besar penduduk Desa Parijatahwetan merupakan bermata pencaharian sebagai petani baik itu pemilik sawah maupun hanya sekedar menjadi buruh tani yaitu sebesar 3.204 penduduk dan yang lainnya PNS dan pengusaha kecil menengah. Dari sekian banyak penduduk yang ada di Desa Parijatahwetan memiliki kesadaran membayar pajak yang lumayan baik. Hal ini terbukti dari laporan pertanggungjawaban Desa Parijatahwetan yang menunjukkan tingkat prosentase pembayaran pajak yang mencapai 100%. Berikut adalah data wajib pajak dan retribusi Desa Parijatahwetan.

Tabel 4. Pajak dan Retribusi Desa Parijatahwetan

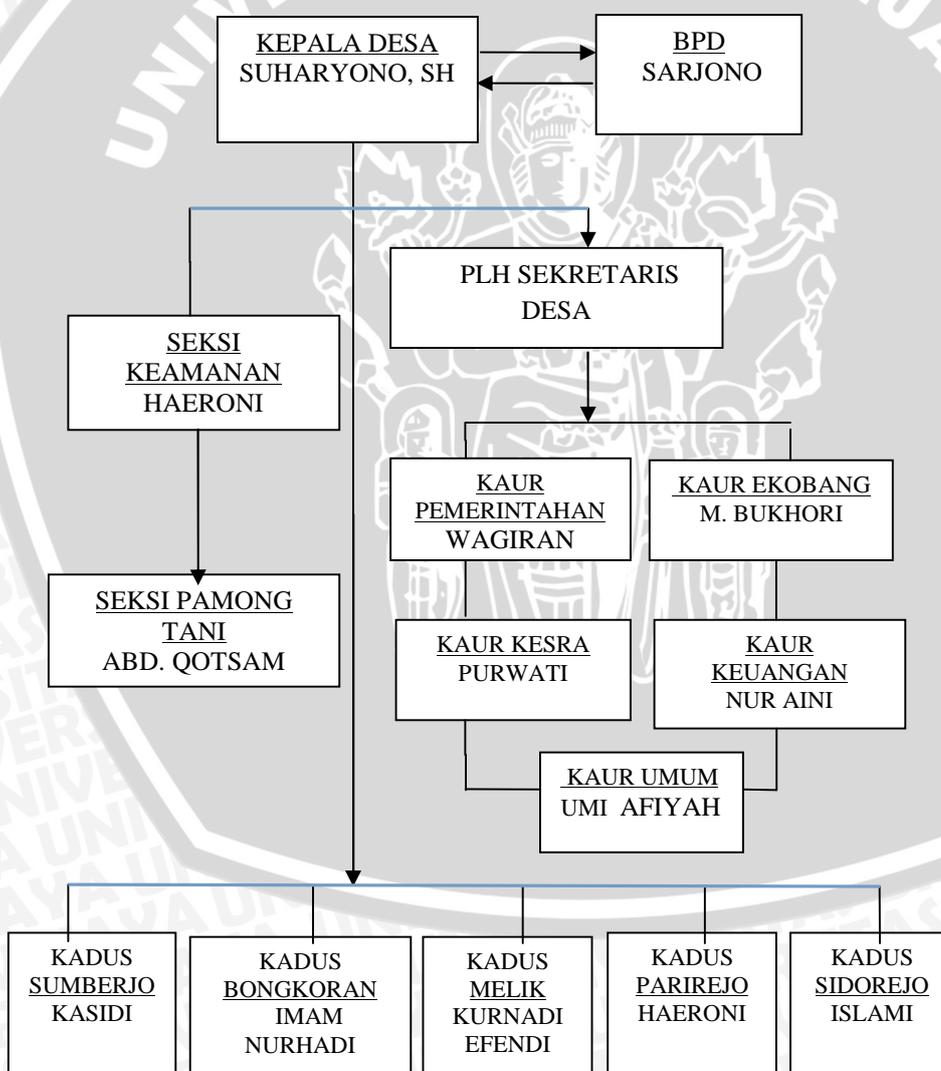
No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah wajib pajak	3.780 orang
2	Target/Baku PBB	96.117.319,-
3	Realisasi PBB	100 %
4	Jumlah Wajib Retribusi kewenangan desa	50 orang
5	Target Retribusi	450.000,-
6	Realisasi Retribusi	100 %
7	Pungutan Resmi lainnya di desa	3 jenis
8	Target Pungutan Resmi	22.494.900,-
9	Realisasi Pungutan Resmi	80 %

Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013

Dari **Tabel 4.** yang tertulis diatas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran membayar pajak masyarakat Desa Parijatahwetan sangat tinggi. Maka tidak heran jika Pemerintah Desa Parijatahwetan selalu mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berupa Reward PBB. Karena selalu mencapai 100% dalam pembayaran pajak PBB. Selain karena pencapaian target yang sesuai juga Desa Parijatahwetan mampu menempati urutan 70 besar pelunasan pajak PBB tercepat di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini tidak terlepas

dari kinerja aparat pemerintah desa yang bekerja keras dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pemerintahan Desa Parijatahwetan sendiri terdiri dari kepala desa sebagai pemimpin serta perangkat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa. **Gambar 4.** dibawah ini merupakan struktur Aparat Desa Parijatahwetan.



Gambar 4. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Parijatahwetan
Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013

Tabel 5. Aparat Desa Parijatahwetan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	SUHARYONO, SH	KEPALA DESA	S1
2	-	SEKRETARIS DESA	-
3	WAGIRAN	KAUR PEMERINTAHAN	SLTA
4	M. BUKHORI	KAUR EKONOMI PEMBANGUNAN	SLTA
5	PURWATI	KAUR KESEJAHTERAAN RAKYAT	SLTA
6	NUR AINI	KAUR KEUANGAN	SLTA
7	UMI AFYAH	KAUR UMUM	SLTA
8	KASIDI	KEPALA DUSUN SUMBERJO	SLTP
9	HAERONI	KEPALA DUSUN PARIREJO	SLTA
10	IMAM NURHADI	KEPALA DUSUN BONGKORAN	SLTP
11	KURNADI EFENDI	KAPALA DUSUN MELIK	SLTA
12	ISLAMI	KEPALA DUSUN SIDOREJO	SLTA

Sumber: Profil Desa Parijatahwetan tahun 2013

Tabel 5. menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Aparat Desa Parijatahwetan rata-rata hanya lulusan SMA. Tetapi juga terdapat lulusan sarjana yaitu Kepala Desa. Tingkat pendidikan yang rendah bukan berarti tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa meskipun tingkat pendidikan aparat desa hanya sebatas lulusan SMA, tetapi terbukti bahwa para aparat memiliki kemampuan yang bisa dikatakan sangat baik.



Gambar 5. Kantor Kepala Desa Parijatahwetan

Sumber : Data Penelitian

Pemerintah desa bukan hanya terdiri dari kepala desa dan para perangkat desa, melainkan juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai rekan kerja kepala desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai pendukung pemerintah desa. Tugasnya adalah membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini sebagai berikut.

1. Berpartisipasi dalam memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan desa.
2. Menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat.
3. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa)

Peran LPMD juga sebagai pelaksana pembangunan yang bersumber dari dana ADD berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Parijatahwetan tentang

penetapan penanggung jawab kegiatan pembangunan prasarana fisik desa. Dalam program pembangunan yang ada di desa, mulai dari yang bersumber pembiayaan pemerintah pusat, daerah maupun kabupaten, pemerintah desa hanya berperan sebagai fasilitator. Dimana pemerintah desa menetapkan program kerja tahunan pembangunan yang selanjutnya di usulkan kepada daerah. Setelah usulan diterima dan mendapatkan dana yang telah diusulkan selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada ketua LPMD sebagai pelaksana kegiatan pembangunan yang ada di desa.

B. Hasil Penelitian

1. Kinerja Aparat Pemerintah Desa

a. Kedisiplinan Aparat

Aparat pemerintah merupakan salah satu sumberdaya yang paling berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pemerintahan. Aparat pemerintah adalah kunci dari suksesnya pembanguan dalam berbagai skala, baik itu skala kecil, sedang, maupun skala besar. Kinerja dari seorang aparat pemerintah sangatlah berpengaruh, salah satunya yaitu mengenai tingkat kedisiplinan seorang aparat pemerintah.

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kinerja pegawai (individu aparat) dan kinerja organisasi. Kinerja yang berkaitan dengan individu pelaksana dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor intern yang ada dalam diri seorang individu atau aparat dan faktor ekstern yaitu lingkungan kerja. Faktor intern dalam diri individu ini salah satunya yaitu mengenai tingkat kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya.

Mentalitas atau kedisiplinan aparat akan menentukan baik buruknya hasil yang akan diperoleh oleh suatu organisasi. Seorang aparat pemerintah dituntut untuk memiliki mentalitas yang baik supaya dalam menjalankan tugasnya bisa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan suatu organisasi pemerintah. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pasti memiliki sifat yang berbeda-beda, ada yang memiliki kedisiplinan baik dan ada pula yang tidak. Ini lah yang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin yang dalam kaitannya ini seorang kepala desa untuk dapat menciptakan kedisiplinan seorang pegawainya yang disiplin.

Kepala desa sebagai seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada para bawahannya dalam semua hal yang salah satunya yaitu mengenai kedisiplinan. Bawahan yang dimaksud yaitu perangkat desa mulai dari sekretaris desa beserta yang lainnya. Perangkat Desa Parijatahwetan harus memiliki mentalitas yang cukup bagus, dan cerminan dari mentalitas tersebut yaitu kedisiplinan yang tinggi. Kedisiplinan dalam kaitannya ini mulai dari kehadirannya dikantor, kedisiplinan dalam mengerjakan tugas dan lain sebagainya.

Jika dilihat dari segi kehadirannya, Perangkat Desa Parijatahwetan bisa dikatakan baik meskipun terdapat sisi negatifnya juga. Tidak bisa dipungkiri bahwa kenyataan yang ada dilapangan setiap perangkat desa memiliki sifat dan sikap yang berbeda-beda. Seperti yang diutarakan oleh kepala desa sebagai berikut:

“Perangkat desa disini jika dilihat dari segi kedisiplinan ada baik buruknya, buruknya yaitu, perangkat desa mulai dari skretaris serta perangkat desa yang lain itu datangnya selalu tidak tepat pada waktunya dengan alasan berbagai macam, mulai dari mengurus anak atau yang lain, tetapi dalam segi lain perangkat desa sangat baik. Hal itu terlihat dari kinerjanya mengerjakan tugas-tugas pemerintahan yang selalu selesai tepat

waktu, bahkan bisa terselesaikan sebelum batas ketentuan waktu” (wawancara pada tanggal 16 april 2014)

Dari hasil kutipan wawancara diatas terlihat bahwa perangkat desa Parijatahwetan memang ada baik buruknya. Jika hanya persoalan kehadiran yang tidak tepat waktu merupakan hal yang sangat lumrah. Hampir di semua instansi selalu ada permasalahan tentang kehadiran para pegawainya, itu semua tidak bisa dipungkiri kenyataannya. Tetapi disisi lain Desa Parijatahwetan selalu mendapatkan Reward dari pemerintah daerah atas hasil kerjanya yang cukup baik. Hal ini terlihat bahwa ada sisi baiknya, meskipun para perangkat desa bermasalah dengan kehadiran tetapi mereka tidak lupa dengan tanggung jawabnya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang selalu sesuai dengan target. Pernyataan dari kepala desa diatas juga dibenarkan oleh skretaris desa parijatah wetan yang mengatakan bahwa:

“Dari segi kehadiran memang para perangkat desa selalu tidak tepat waktu, tetapi dari segi lain perangkat desa selalu disiplin waktu dalam mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik dan sesuai harapan. Sesuai harapan yang dimaksud disini yaitu hasil kerja yang bagus dan selalu tepat waktu dalam penyelesaiannya” (wawancara pada tanggal 17 april 2014)

Dengan mendengar pernyataan dari kepala desa dan sekertaris desa mengenai kedisiplinan perangkat desa tidaklah cukup tanpa melihat kondisi sebenarnya yang ada dilapangan. Pada hari ke tiga penelitian, sengaja peneliti datang lebih awal dari biasanya yaitu pukul 07.00 WIB diamana menurut informasi dari kepala desa bahwa itu merupakan jam buka kantor desa untuk melayani masyarakat. Tetapi kenyataan yang ada dilapangan memang benar adanya seperti yang diungkapkan oleh kepala desa. Banyak para perangkat desa

yang belum hadir diruangan, secara otomatis pelayanan untuk masyarakat pun belum siap, barulah setelah jam menunjukkan pukul 08.00 WIB perangkat Desa Parijatahwetan baru lengkap seluruhnya. Melihat kondisi diatas dimana yang seharusnya pukul 07.00 WIB semua aparat desa mulai kepala desa serta perangkatnya harus sudah hadir dikantor untuk melayani masyarakat tetapi hanya kepala desa yang saja yang sudah hadir. Hal ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat.

b. Kemampuan Kerja Aparat

Desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah wilayah terkecil dari program pembangunan. Pembangunan nasional pada dasarnya adalah berawal dari pembangunan pedesaan. Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah dan pembangunan nasional yang dilakukan secara serasi dan terpadu, serta berdaya guna dan berhasil guna disetiap dan diseluruh kawasan pedesaan. Dengan demikian desa merupakan unsure yang paling berpengaruh terhadap proses pembangunan dalam segala bidang. Hal tersebut dikarenakan desa langsung berhadapan dengan masyarakat dari segala lapisan.

Desa dalam proses pelayanan kepada masyarakat yang dalam kaitannya ini dalam hal pembangunan membutuhkan aparat yang yang mempunyai kemampuan baik dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemampuan seorang aparat dalam menjalankan tugas menjadi sutu acuan terhadap tingkat keberhasilan pencapaian hasil suatu organisasi pemerintahan. Sesuai dengan tugas

dan tanggung jawabnya yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, aparat desa dituntut memiliki kemampuan dan ketelatenan yang baik.

Pemerintah desa dihadapkan langsung dengan berbagai kepentingan masyarakat. Keberagaman kepentingan yang ada dalam lingkungan desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam pemenuhannya. Masyarakat selalu menginginkan pelayanan yang berkualitas dan berdaya guna terhadap kehidupan masyarakat desa. Hal ini yang menjadi acuan seorang kepala desa untuk mengangkat beberapa perangkat desa yang memiliki kemampuan dalam berbagai bidang sebagai pembantu kepala desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.

Setiap individu pasti memiliki suatu kemampuan dan kemampuan setiap individu beraneka ragam. Tetapi tidak semua individu memiliki kemampuan yang baik untuk menjalankan tugas pemerintahan. Oleh sebab itu peran kepala desa dalam memilih seorang perangkat desa sebagai pembantu dalam menjalankan tugasnya harus secara jeli. Harus orang-orang yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas yang bakal diembanya.

Kemampuan aparat yang sangat baik akan memberikan pengaruh terhadap hasil yang akan diperoleh nantinya. Kemampuan aparat pemerintah Desa Parijatahwetan bisa dikatakan sangat baik. Hal tersebut diungkapkan oleh kepala Parijatahwetan sebagai berikut:

“Kemampuan yang dimiliki perangkat Desa Parijatahwetan bisa dikatakan sangat baik, hal itu terbukti dari hasil yang diperoleh atas kinerjanya selama ini. Bahkan banyak dari perangkat desa tetangga yang datang ke kantor Desa Parijatahwetan untuk meminta bantuan untuk memberi pengajaran tentang bagaimana membuat penulisan laporan pertanggung jawaban kegiatan pembangunan, yang itu merupakan hal wajib dalam

setiap pembangunan di desa yang dananya bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah” (wawancara tanggal 17 april 2014)

Kutipan wawancara diatas senada dengan yang diungkapkan oleh sekretaris Desa Parijatahwetan yang mengungkapkan bahwa “Banyak perangkat desa tetangga yang datang ke kantor Desa Parijatahwetan untuk sekedar melihat-lihat laporan pertanggung jawaban pembangunan Desa Parijatahwetan dan meminta bantuan untuk membuat laporan desanya”

Kinerja aparat pemerintah Desa Parijatahwetan tidak dapat diragukan lagi. Dengan hasil yang telah dicapai dalam berbagai bidang yang salah satunya adalah dalam bidang pembangunan. Dengan kemampuan yang dimiliki aparat pemerintah desa selalu berupaya bagaimana caranya selalu mendapatkan Reward atau penghargaan dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Semua desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi berlomba-lomba untuk dapat memperoleh Reward yang berupa kucuran dana pembangunan yang disebut dengan Reward PBB. Seperti yang diungkapkan oleh kepala desa Parijatahwetan bahwa:

“Semua desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi berlomba-lomba menyelesaikan laporan pajak PBB nya untuk mendapatkan dana Reward. Karena dari 189 desa yang ada hanya 70-80 desa tercepat pelunasan PBB desanya yang akan mendapatkan kucuran dana Reward PBB. Desa Parijatahwetan sendiri selalu mendapatkan penghargaan dan Reward PBB, semua itu tidak terlepas dari kemampuan aparat pemerintah Desa Parijatahwetan yang sangat baik dalam menjalankan tugas” (wawancara tanggal 17 april 2014)

Kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa tingkat kemampuan kerja aparat Desa Parijatahwetan sangat baik. Hal itu terlihat dari 189 desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Desa Parijatahwetan selalu mendapatkan dana Reward setiap tahunnya. Hasil yang diperoleh tersebut berdampak terhadap perkembangan

desa, dimana selalu dilaksanakan pembangunan fisik di setiap tahunnya di Desa Parijatahwetan.

c. Motivasi Aparat

Kinerja seorang aparatur pemerintahan dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain faktor kemampuan dan kedisiplinan yang sudah dijelaskan diatas ada lagi satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas kinerja seorang aparat yaitu faktor motivasi. Motivasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dorongan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu karena kebutuhan atau mencapai suatu hal yang ingin diharapkan. Motivasi merupakan suatu hasrat yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan dirinya untuk melakukan suatu hal atau tindakan.

Berbicara mengenai motivasi, sebenarnya motivasi terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu berasal dari lingkungan maupun atasan. Hal ini menggambarkan bahwa motivasi itu tidak hanya semata-mata berasal dari dalam diri seorang aparat saja, melainkan bisa berasal dari atasan maupun rekan kerja di lingkungan organisasi tempat dia bekerja.

Motivasi perlu dimiliki oleh setiap aparat pemerintah karena berfungsi sebagai dorongan seorang aparat tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Kebutuhan yang dimiliki seorang pegawai atau aparat menjadi suatu motivasi atau dorongan agar mau bekerja dan berusaha agar dapat memenuhi segala kebutuhannya. sehingga keinginan pegawai atau aparatur dan tujuan organisasi dapat tercapai. Kebutuhan setiap individu pegawai beraneka ragam, mulai dari kebutuhan ekonomis yang

berupa uang dan kebutuhan non ekonomis yang berupa suatu *reward* atau penghargaan. Dari kebutuhan yang beraneka ragam itulah yang menjadi suatu pemicu dan dorongan seorang pegawai atau aparat pemerintah melakukan pekerjaan secara lebih giat.

Berbicara mengenai motivasi aparat, Desa Parijatahwetan memiliki aparat yang dapat dikatakan bermotivasi tinggi. Mulai dari kepala desa hingga para perangkat desa yang menjadi pembantu pekerjaan pemerintahan desa. Perangkat desa Parijatahwetan hampir kesemuanya memiliki motivasi yang tinggi dalam penyelesaian tugas-tugas pemerintahan desa. hal ini diungkapkan oleh kepala desa Parijatahwetan sebagai berikut:

“Para pegawai pemerintahan desa disini mulai dari sekretaris, kepala urusan hingga kepala wilayah yang ada di desa memiliki motivasi yang bisa dikatakan sangat tinggi, hal ini terbukti dengan hasil kerja yang diperoleh selama ini yaitu semua pekerjaan selalu dapat diselesaikan secara tepat waktu bahkan bisa selesai sebelum waktu yang telah ditentukan” (wawancara tanggal 17 april 2014)

Kutipan diatas menunjukkan bahwa hasil yang dicapai oleh Desa Parijatahwetan terbilang sangat baik. Semua itu tidak terlepas dari peran kinerja kepala desa beserta para perangkat desanya. Seorang aparat pemerintah khususnya perangkat desa memang harus dituntut memiliki sebuah motivasi yang tinggi agar memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Motivasi yang dimiliki oleh para aparat pemerintah Desa Parijatahwetan tersebut menurut kepala desa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor internal dalam diri aparat sendiri dan faktor eksternal seperti lingkungan dan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan kepadanya.

“Selain dalam diri aparat yang memiliki motivasi yang tinggi, saya juga memberikan sebuah dorongan berupa pengarahan tentang bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Selain itu perangkat

desa diberikan fasilitas berupa lahan sawah milik desa yang disebut dengan lahan “bengkok” dan berhak dikelola oleh setiap aparat desa yang dimaksudkan agar para aparat pemerintah desa menjadi lebih bermotivasi untuk melakukan pekerjaan dan hasilnya terbukti bahwa dengan strategi yang seperti itu Desa Parijatahwetan memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Mulai dari pelayanan kepada masyarakat hingga mendapatkan sebuah reward dari pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi” (wawancara tanggal 17 april 2014)

Kutipan wawancara diatas terlihat bahwa faktor eksternal juga sangat berpengaruh, seorang kepala desa sebagai seorang pemimpin wajib memberikan dorongan berupa pengarahan kepada para perangkat desa agar nantinya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara baik. Selain itu juga strategi pemerintah desa yang memberikan fasilitas yang berupa lahan “bengkok” kepada para aparat juga menjadi sebuah motivasi tersendiri. Karena dengan apa yang sudah diberikan kepada para perangkat desa diharapkan akan meberikan *feedback* berupa kinerja yang baik dan tentu pastinya jika seorang aparat memiliki sifat yang bagus akan berfikir bahwa dengan apa yang sudah didupatkannya akan semakin bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan melakukan pekerjaan secara lebih giat.

2. Proses pelaksanaan program

a. Mekanisme pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan merupakan prosedur dalam pelaksanaan suatu program. Mekanisme memiliki kedudukan yang sangat penting dalam suatu proses pembangunan. Kegiatan yang akan dijalankan kedepan harus berdasarkan mekanisme pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga proses pelaksanaan. Dengan adanya suatu mekanisme akan mempermudah proses pelaksanaan pembangunan. Mekanisme menjadi suatu acuan atau bisa disebut dengan suatu

sistem. Karena semua kegiatan yang akan dilakukan kedepannya harus berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Oleh sebab itu sebuah mekanisme pelaksanaan harus disusun dengan secara jelas, perlu perencanaan yang matang dengan melihat situasi dan kondisi sekitar di lapangan. Agar nantinya bisa meminimalisir resiko dan menghasilkan suatu pembangunan yang berkualitas dan berdaya guna bagi semua masyarakat.

Setiap pelaksanaan suatu program pasti terdapat suatu mekanisme pelaksanaan. Karena mekanisme pelaksanaan merupakan suatu acuan terhadap berjalannya suatu program. Adanya suatu mekanisme cukup membantu dalam pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien. Begitu pentingnya suatu mekanisme atau prosedur dalam pelaksanaan suatu program maka Pemerintah Desa Parijatahwetan menetapkan mekanisme atau tata cara yang jelas dalam pelaksanaan program pembangunan dan diharapkan dengan adanya suatu mekanisme pelaksanaan yang jelas akan mempermudah proses pelaksanaan suatu pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Kepala Desa Parijatahwetan yang mengatakan bahwa:

“Semua program kegiatan yang ada di desa harus berdasarkan mekanisme pelaksanaan yang telah dibuat. Mekanisme tersebut menjadi dasar/acuan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Tim pelaksana kegiatan membuat suatu mekanisme kerja yang akan dijalankan kedepan berdasarkan rencana pembangunan yang telah dibuat dan disetujui dalam musyawarah desa.”
(wawancara tanggal 17 april 2014)

Kinerja seorang kepala desa dan perangkat desa Parijatahwetan dalam suatu pembangunan hanya sebatas proses perencanaan hingga proses pencairan dana. Selanjutnya untuk proses pelaksanaan suatu program pembangunan dilaksanakan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagai lembaga yang

ada di desa yang ditunjuk oleh pemerintah desa untuk melaksanakan proses pembangunan yang ada di desa. semua hal diatas dijelaskan oleh Kepala Desa Parijatahwetan dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa memiliki beberapa program kegiatan, salah satunya yaitu program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. untuk program pembangunan, Pemerintah Desa bekerja hanya sebatas perencanaan hingga pencairan dana. Untuk proses pelaksanaan diserahkan kepada LPMD sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Meskipun pelaksana kegiatan diserahkan kepada LPMD, tetapi penanggung jawab kegiatan tetap dipegang oleh Kepala desa.”(wawancara tanggal 17 april 2014)

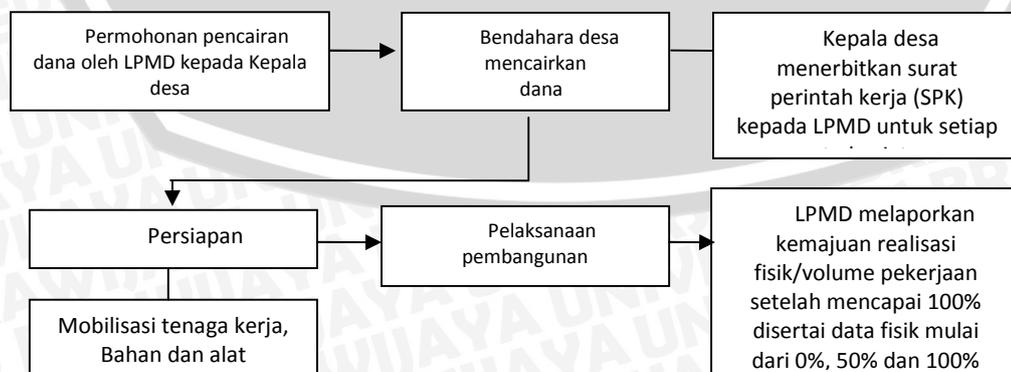
Mekanisme pelaksanaan suatu program pembangunan diawali dengan mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk tahun anggaran berjalan. Dalam forum tersebut juga dilakukan musyawarah dusun (Musdus) tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam musyawarah tersebut akan dikumpulkan beberapa usulan dari masyarakat mengenai apa saja yang perlu dibangun. Setelah usulan terkumpul baru kemudian semua usulan dari Musdus tersebut dibawa ke desa untuk dilakukan musyawarah tingkat desa yaitu Musrembangdes. dari beberapa usulan yang masuk kemudian diprioritaskan apa saja yang sekiranya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrembangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. RPJMDes juga memuat Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) tahunan yang menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan peraturan desa tentang

anggaran pendapatan dan belanja desa. Setelah mendapatkan hasil tentang apa saja yang sekiranya perlu dibangun di Desa Parijatahwetan lalu pemerintah desa membuat proposal rencana kegiatan pembangunan yang nantinya akan dijadikan bahan dalam musyawarah antar desa di kantor kecamatan.

Setiap desa memaparkan kebutuhan yang ingin dibangun di desanya. Dari sekian banyak usulan dari setiap desa lalu diprioritaskan kembali oleh pihak kecamatan. apa saja sekiranya yang paling diperlukan oleh masyarakat di Kecamatan Srono. Setelah usulan dari desa yang terpilih disetujui kemudian pihak desa membentuk suatu tim pengelola kegiatan (TPK) dan rencana pelaksanaan program pembangunan yang nantinya diajukan kepada Unit Pengelola Kecamatan (UPK) Srono. Pihak pengelola akan memberikan persetujuan atas ajuan dari desa yang terpilih dan selanjutnya pihak desa tinggal menunggu waktu pencairan dana berlangsung.

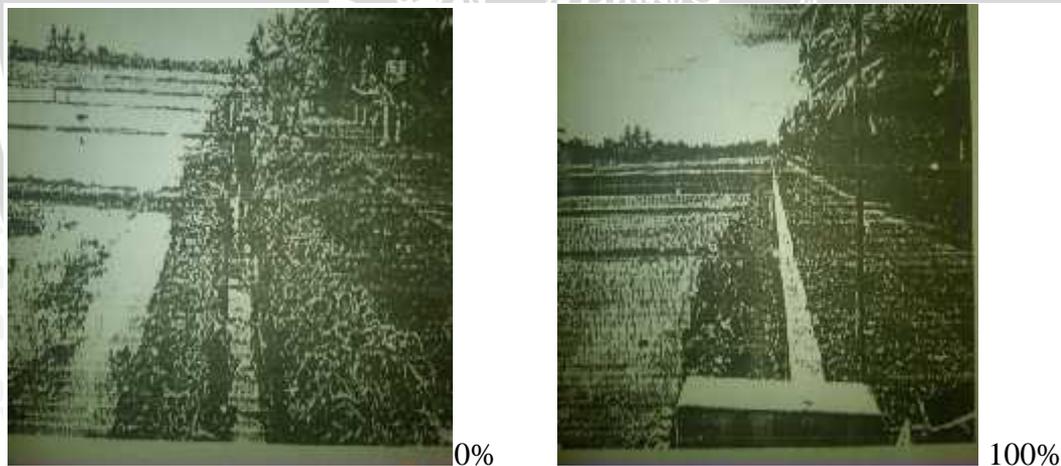
Setelah dana cair langkah selanjutnya yaitu pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan mengacu pada rencana awal yang sudah ditetapkan oleh tim pengelola kegiatan. Mulai dari mobilisasi tenaga kerja dan barang serta ketentuan waktu pelaksanaan pembangunan.



Gambar 6. Mekanisme pelaksanaan pembangunan dari ADD

Sumber: Data Penelitian

Gambar 6. Tentang Mekanisme pelaksanaan diatas menjadi acuan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dimulai dengan pencairan dana oleh Kepala desa melalui bendahara desa kepada ketua LPMD sebagai pelaksana kegiatan pembangunan dengan melampirkan surat perintah kerja (SPK), kemudian dilakukan persiapan pelaksanaan yang meliputi mobilisasi tenaga kerja, bahan dan alat. Setelah persiapan sudah selesai kemudian dilakukan pelaksanaan pembangunan berdasarkan rencana pembangunan yang telah dibuat. Setelah pembangunan dilaksanakan LPMD melaporkan kemajuan realisasi fisik pekerjaan seperti yang ada dalam **Gambar 7.** Dibawah ini yang merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Parijatahwetan yang bersumber dana dari ADD.



Gambar 7. Bentuk pelaporan realisasi fisik pembangunan

Sumber: Dokumentasi pembangunan Desa Parijatahwetan

Mekanisme pelaksanaan diatas berbeda dengan mekanisme pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari PNPM Mandiri Pedesaan. Untuk pelaksanaannya sendiri terbagi menjadi dua tahapan seperti yang tertera dalam **Gambar 6.** sesuai dengan pencairan dana yang berlangsung. Tahapan dalam

pencairan dana tersebut dimaksudkan agar supaya mempermudah penelusuran dana yang sudah alokasikan tersebut. Mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut:



Gambar 8. Mekanisme pelaksanaan pembangunan PNPM Mandiri Pedesaan

Sumber: Data Penelitian

Gambar 8. Menggambarkan mekanisme pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari PNPM. Dimulai dengan pelaksana kegiatan mencairkan dana sebesar 40% untuk melaksanakan pembangunan tahap awal. Setelah dana cair pelaksana kegiatan mulai memobilisasi tenaga kerja, bahan dan alat lalu kemudian dimulai proses pembangunan awal. Setelah pembangunan tahap awal selesai kemudian pihak pelaksana melakukan musyawarah dan membuat laporan pertanggungjawaban dari pembangunan yang dilaksanakan pada tahap awal disertai dengan dokumentasi hasil yang digunakan sebagai bahan untuk mencairkan dana yang kedua yaitu sebesar 40%. Langkah selanjutnya sama dengan yang pertama yaitu setelah pelaksanaan pembangunan tahap kedua selesai dilakukan musyawarah dan laporan pertanggungjawaban untuk dijadikan bahan untuk mencairkan dana yang ketiga yaitu sebesar 20% yang digunakan sebagai pelaksanaan pembangunan tahap akhir. Setelah pembangunan selesai dan memperoleh hasil yang sesuai dengan rencana kemudian pihak pelaksana yaitu TPK menyerahkan hasil pembangunan kepada Kepala Desa.

b. Sumber dana

Secara umum, berdasarkan peraturan perundang undangan, sebenarnya desa dapat membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri secara *bottom up*. Dimana desa terdiri dari kepala desa dan perangkatnya serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Legislatif Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Di sisi lain, sumber pembiayaan bagi pembangunan desa yang dapat diambil berdasar perundang undangan yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dari penghasilan desa yang sah (BUMdes), serta kerjasama dengan pihak ketiga.

Pembiayaan pembangunan di Desa Parijatahwetan yang bersumber dari pemerintah pusat berwujud dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), untuk dana yang bersumber dari daerah yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), Reward PBB dan swadaya murni masyarakat. Perlu diketahui bahwa dana yang bersumber dari pemerintah kabupaten yang berupa Reward PBB hanya diberikan kepada desa-desa tertentu yang tercepat dalam pelunasan pajak PBB desanya. Tidak semua desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan Reward. Besaran dana reward juga ditentukan oleh rangking pelunasan pajak desa serta besaran pajak PBB yang ada di desa tersebut.

Pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh desa kepada pemerintah, terdapat klasifikasi program pembangunan desa, misalnya untuk pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, desa dimungkinkan untuk mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, misalnya

untuk membangun infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, sekolah, pasar desa, listrik, air, dan sebagainya.

Pembangunan yang ada di desa menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya mengandalkan dari pemerintah pusat, daerah, maupun kabupaten. Desa juga memiliki pendapatan yang bisa dialokasikan untuk pembangunan. Disamping itu peran serta masyarakat juga sangat membantu, melalui dana swadaya murni masyarakat yang berupa uang dan partisipasi masyarakat untuk saling bergotong royong membangun desanya. Untuk perihal pembiayaan pembangunan desa Parijatahwetan bisa di danai dengan dana desa dan swadaya masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh kepala urusan pembangunan Desa Parijatahwetan

“Untuk pembangunan fisik di desa ini bisa di danai oleh desa sendiri dengan memakai dana pendapatan desa, itu jika besaran dana pembangunan dibawah 50 juta, tetapi jika besaran dana yang dibutuhkan dalam rencana pembangunan mencapai lebih dari 50 juta pemerintah desa mengajukan pembiayaan kepada pemerintah kabupaten” (wawancara tanggal 18 april 2014)

Dari penuturan kepala urusan pembangunan di atas menunjukkan bahwa desa sebenarnya bisa membangun desanya sendiri dengan dana pendapatan desa tanpa perlu mengajukan pembiayaan kepada pemerintah daerah atau kabupaten. Apabila rencana pembangunan mencapai lebih dari 50 juta maka desa perlu mengajukan pembiayaan kepada pemerintah daerah atau kabupaten. Hal ini juga dibenarkan oleh kepala desa Parijatahwetan yang mengatakan bahwa:

“Desa Parjatahwetan memiliki pendapatan desa yang bisa dikelola untuk dialokasikan untuk pembangunan desa sendiri. Ditambah dengan tingkat kepedulian masyarakat dalam hal pembangunan yang turut serta membantu dalam hal pembiayaan yang berupa swadaya murni masyarakat serta dalam hal ikut serta membantu proses pelaksanaan pembangunan dengan cara bergotong royong membangun suatu prasarana fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu semua bukan terjadi begitu saja, peran pemerintah

desa ikut andil dalam mengkoordinir masyarakat untuk saling bahu membahu membangun desanya demi kepentingan bersama” (wawancara tanggal 17 april 2014)

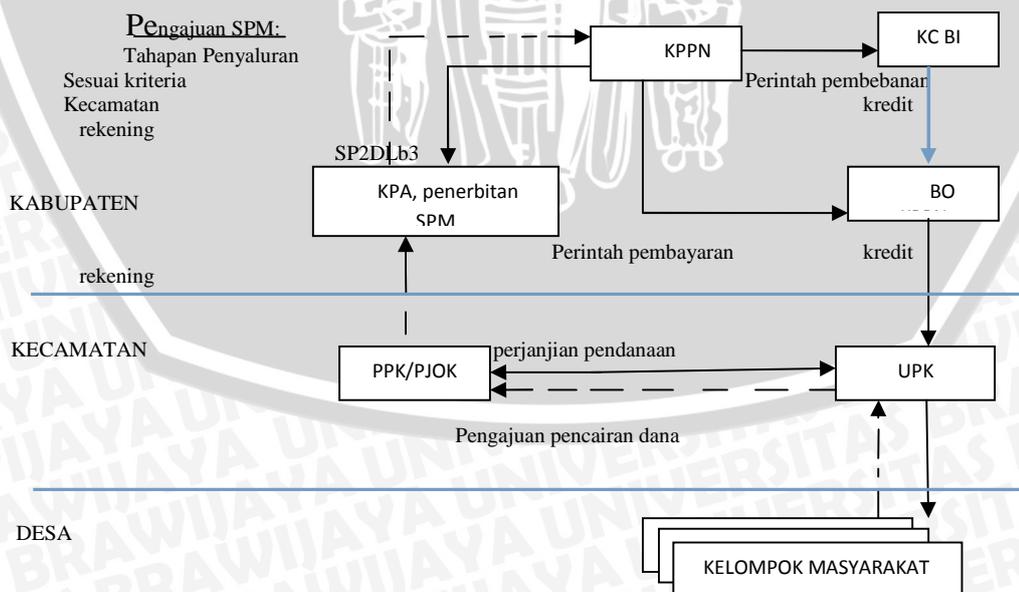
Dari data diatas menunjukkan bahwa peran serta msyarakat juga sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan suatu pembangunan yang ada di desa, mulai dari segi bantuan pembiayaan serta partisipasinya dalam proses pelaksanaan pembangunan. Semua itu tidak terlepas dari peran kinerja pemerintah desa yang selalu memberikan pelayanan yang baik serta selalu mengkoordinir masyarakatnya untuk saling bergotong royong membangun desanya demi kebaikan bersama. Kerja sama yang terjalin antara pemerintah desa dengan masyarakat yang baik akan berdampak terhadap kelancaran program pemerintahan yang dalam hal ini yaitu pembangunan. Dengan pembangunan yang terlaksana akan bermanfaat bagi masyarakat yaitu semakin lancarnya kegiatan perekonomian karena sudah ada fasilitas penunjang berupa infrastruktur fisik akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat desa.

c. Pencairan dana

Sebelum masuk dalam tahapan pelaksanaan pembangunan, langkah sebelumnya yaitu pencairan dana yang nantinya digunakan sebagai pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan. Dari berbagai sumber dana yang diterima oleh pemerintah desa dalam program pembangunan, tidak semuanya sama dalam tahapan pencairan dananya. Mulai dari yang bersumber dari pusat yang berupa PNPM, maupun dana yang bersumber dari daerah atau kabupaten yang berupa dana ADD dan Reward PBB.

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana yang turun ke desa harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan ke pusat agar memudahkan penelusuran. Pihak pelaksana, dalam hal ini staf Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di tingkat kecamatan mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pembukuan, manajemen data, pengarsipan dokumen dan pengelolaan uang atau dana secara umum, serta peningkatan kapasitas lainnya terkait dengan pengelolaan pembangunan wilayah perdesaan. Berikut ini merupakan mekanisme pencairan dana BLM dari KPPN ke UPK

Mekanisme Pencairan Dana BLM dari KPPN ke UPK



Gambar 9. Mekanisme pencairan dana PNPM

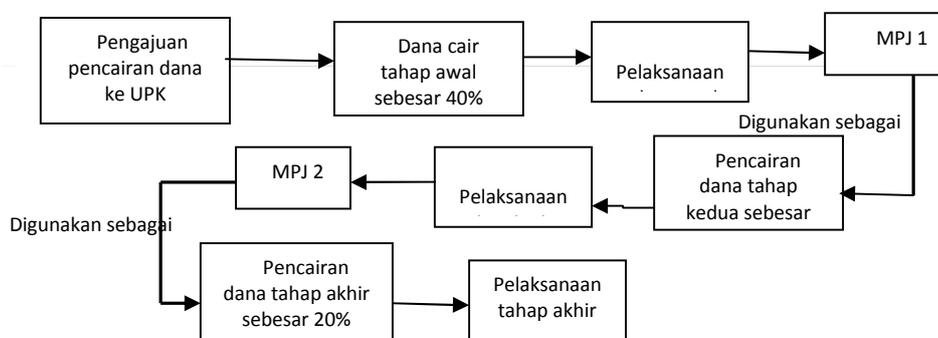
Sumber: PNPM Mandiri Pedesaan



Dari **Gambar 9**. Diatas menunjukkan bahwa dalam alur mekanisme pencairan, dana yang cair tidak 100% langsung cair semua, melainkan secara bertahap. Seperti yang dikemukakan oleh ketua LPMD yang sekaligus menjadi ketua tim pengelola kegiatan PNPM Desa Parijatahwetan sebagai berikut:

“Pencairan dana PNPM ini dilakukan secara bertahap, awalnya dana akan turun sebesar 40% sebagai dana awal sebuah pembangunan. Dengan dana sekian TPK langsung melaksanakan kegiatan pembangunan. Setelah dilaksanakan dengan melihat kondisi dilapangan, sejauhmana pembangunan yang sudah berlangsung, lalu dilakukan musyawarah pertanggungjawaban pertama (MPJ 1) yang berupa laporan kegiatan untuk dijadikan bahan dalam pencairan dana yang kedua yaitu sebesar 40%. Langkah selanjutnya jg hampir sama, yaitu setelah kegiatan dilaksanakan kemudian TPK melakukan musywarah pertanggungjawaban yang kedua (MPJ 2) sebagai bahan dalam pencairan dana yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu sebesar 20%. Selanjutnya jika pembangunan sudah selesai 100% , maka tim pengelola kegiatan (TPK) melakukan serah terima hasil pembangunan kepada pemerintah desa.” (wawancara tanggal 20 april 2014)

Kutipan diatas menunjukkan bahwa pencairan suatu dana harus melalui beberapa tahapan, tidak serta merta langsung cair semua. Pencairan dana harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban dari tim pengelola kegiatan (TPK). Pencairan dana PNPM Mandiri Perdesaan ke Kecamatan dilakukan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Berikut ini merupakan alur pencairan dana PNPM dari Rekening Kolektif ke desa.



Gambar 10. Alur pencairan dana PNPM

Sumber : Data Penelitian

Alur pencairan dana PNPM pada **Gambar 10.** diatas diawali dengan pengajuan pencairan dana ke UPK. Selanjutnya setelah dana tahap awal cair yaitu sebesar 40% kemudian dilakukan pelaksanaan pembangunan tahap awal. Progres pelaksanaan tahap awal di musyawarahkan dan kemudian dibuat MPJ 1 (musyawarah pertanggungjawaban) yang digunakan sebagai syarat pencairan dana yang kedua yaitu sebesar 40%. Tahap selanjutnya sama dengan yang pertama yaitu setelah dana cair dilakukan pelaksanaan pembangunan tahap kedua dan hasilnya dibuat MPJ 2 untuk pencairan dana yang ketiga sebesar 20%. Pencairan ini lain halnya dengan pencairan dana ADD maupun Reward yang berasal dari daerah atau kabupaten. Terdapat perbedaan antara alur pencairan dana PNPM dan dana ADD atau Reward. Untuk pencairan dana ADD dan Reward alurnya sama, yaitu setelah proposal program kegiatan pembangunan disetujui kemudian pemerintah desa membuat suatu laporan permohonan pencairan dana ADD maupun Reward kepada pemerintah kabupaten dengan besaran dana yang telah disetujui. Pemerintah desa tinggal menunggu waktu pencairan dana tersebut yang akan dicairkan melalui rekening bendahara desa, pencairan dana nya pun langsung 100%. Seperti yang dikemukakan oleh kepala urusan pembangunan Desa Parijatahwetan yaitu:

“Untuk tahapan pencairan dana pembangunan yang bersumber dari ADD maupun Reward, pemerintah desa membuat suatu laporan permohonan pencairan dana kepada pemerintah kabupaten dengan besaran dana yang telah disetujui dalam proposal kegiatan. Dana yang nantinya cair dari pemerintah kabupaten akan diserahkan kepada ketua LPMD oleh kepala desa sebagai pelaksana pembangunan yang bersumber dari dana ADD dan Reward PBB untuk digunakan sebagai bahan melaksanakan program pembangunan. Acara penyerahan dana tersebut juga disertai dengan surat pengajuan pencairan dana pembangunan oleh ketua LPMD kepada Kepala

Desa Parijatahwetan. Setelah acara penyerahan selesai, langkah selanjutnya yaitu proses pelaksanaan pembangunan.”(wawancara tanggal 18 april 2014)

Dari berbagai sumber dana yang ada diatas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara alur pencairan dana PNPM dan dana ADD atau Reward. Tetapi sebenarnya tujuannya sama yaitu untuk pembangunan. Prosedur pencairan dana yang sedemikian rupa dimaksudkan agar nantinya mempermudah penelusuran. Selain itu juga meminimalisir resiko penyelewengan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

d. Mobilisasi tenaga kerja, bahan dan alat

Salah satu faktor penentu dalam sebuah pembangunan yaitu mengenai tenaga kerja, bahan, dan alat yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Ke tiga hal diatas merupakan suatu instrumen yang sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan pembangunan dan keberadaanya pun tidak secara otomatis langsung ada, melainkan membutuhkan suatu proses. Pemerintah Desa Parijatahwetan telah membentuk suatu tim pengelola kegiatan (TPK) serta LPMD yang nantinya berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di desa. mobilisasi tenaga kerja, bahan dan alat yang diperlukan dalam proses pelaksanaan pembangunan menjadi tanggung jawab TPK dan LPMD dalam pemenuhannya.

Pemerintah desa dalam mobilisasi tenaga kerja memprioritaskan masyarakat sekitar yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat desa serta mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Desa Parijatahwetan. Seperti yang diungkapkan oleh kepala desa yang mengatakan bahwa:

“Untuk perihal tenaga kerja, pemerintah desa memprioritaskan masyarakat desa sekitar yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam pembangunan, serta memberdayakan masyarakat yang lain agar mempunyai pengetahuan dalam hal pembangunan. Selain karena bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan mengurangi tingkat pengangguran penduduk, langkah tersebut dimaksudkan agar masyarakat desa mengerti tentang program-program pemerintah desa, serta sebagai pengawas terhadap berjalannya pembangunan dan pemerintahan Desa Parijatahwetan.”(wawancara tanggal 18 april 2014)

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Parijatahwetan yang memprioritaskan masyarakat desa sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan sangat baik. Karena itu merupakan tujuan dari pembangunan pedesaan dengan memberdayakan masyarakat sekitar agar lebih terlatih dan berkemampuan lebih dalam hal pembangunan. Selain tenaga kerja factor yang berpengaruh dalam pembangunan yaitu faktor bahan dan alat yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Untuk bahan dan alat pembangunan, apa itu bahan alam maupun bahan pabrikan seperti semen, besi, dana lain sebagainya pemerintah desa melakukan lelang. Hal ini diungkapkan oleh ketua LPMD selaku pelaksana kegiatan pembangunan yang mengatakan bahwa:

“Dalam pemenuhan bahan dan alat pembangunan jika melebihi dari 15 juta, maka kami akan melakukan lelang. Kami mengundang beberapa pemilik toko material yang ada di desa ini untuk mengikuti lelang. Siapa yang bersedia memberikan harga yang termurah dan berkualitas maka itu yang kami tunjuk sebagai penyedia bahan dan alat pembangunan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pembangunan.” (wawancara tanggal 20 april 2014)

Bahan dan alat yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan memang harus memiliki mutu yang bagus, karena hal itu kan berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang dibuat. Keputusan pemerintah desa untuk melakukan lelang tersebut bisa dikatakan cukup baik, selain bisa mendapatkan

harga yang relatif lebih murah juga dapat mempermudah dalam proses mobilisasi barang dan alat yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan.

3 Realisasi

a. Wujud pembangunan fisik

Kemakmuran dan perkembangan desa identik dengan wujud pembangunan fisik desa. Tolok ukur yang dapat dilihat langsung dengan indera mata ini menjadikan aparatur desa berupaya untuk memperbaiki dan membangun kondisi fisik desa. Upaya pengembangan desa tentu saja memerlukan berbagai penambahan fasilitas umum yang diharapkan dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan dan potensi desa. Banyaknya fasilitas yang dibutuhkan masyarakat merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah desa untuk mewujudkannya. Tentu saja semua kebutuhan itu tak dapat langsung dengan serta merta terwujud, karena harus disesuaikan dengan program kerja tahunan dan APBDesa.

Pemerataan pembangunan dirasa lebih penting agar kemajuan daerah bisa serentak dan bersama-sama menikmati kenyamanan pembangunan, oleh karena itu kebutuhan yang paling mendesak lebih di utamakan. Skala prioritas, adalah sebuah kata kunci untuk membuat daftar kebutuhan dalam membangun kondisi fisik desa. Langkah untuk menentukan kebutuhan manakah yang harus didahulukan yaitu dengan cara melakukan analisis kondisi lingkungan (AKL) terhadap potensi dan prospek kesejahteraan masyarakat Desa Parijatahwetan.

Kebutuhan di suatu desa yang dalam hal ini yaitu pembangunan sangat beragam. Banyak masyarakat yang mengusulkan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum. Tetapi tidak semudah itu semua bisa terlaksana, perlu adanya

suatu proses. Perlu ada prioritas pembangunan sesuai dengan program kerja tahunan dan APBDesa yang dirasa paling dibutuhkan oleh masyarakat di waktu itu. Seperti yang diungkapkan oleh kepala urusan pembangunan Desa Parijatahwetan.

“Setiap tahunnya Desa Parijatahwetan melakukan suatu musyawarah desa, yaitu musyawarah rencana pembangunan desa (MUSREMBANGDES) yang dihadiri oleh kepala desa beserta perangkatnya dan beberapa tokoh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat. Disitu kepala desa memaparkan program kerja tahunan Desa Parijatahwetan dalam hal pembangunan disegala bidang, setelah pemaparan tentang program kerja tahunan desa selesai barulah para tokoh-tokoh masyarakat yang merupakan wakil dari sebagian masyarakat memaparkan kebutuhan prasarana fisik yang perlu dibangun di setiap kawasan desa. Banyak usulan yang terkumpul, tetapi tidak semuanya akan disetujui. Perlu ada skala prioritas, apa yang sekiranya paling dibutuhkan masyarakat disaat itu. Bukan berarti yang belum disetujui itu ditolak, semua saran tetap diterima dan dikumpulkan dibuat bahan referensi pembangunan ditahun selanjutnya” (wawancara tanggal 21 april 2014)

Berikut adalah data program pembangunan fisik yang sudah terlaksana di Desa Pariajatahwetan mulai dari tahun 2009-2013.

Tabel 6. Pembangunan Fisik Tahun 2009

N o	Pembangunan Fisik	Lokasi	Sumber Dana	Jumlah Dana
1	MCK	Dsn Melik	PNPM	116.596.500,-
2	Pembangunan Plengsengan & Gorong-gorong lapangan	Dsn Sumberjo	ADD	8.594.000,-
3	Pengerasan Jalan	Dsn Parirejo	ADD	20.514.500,-
4	Pengurangan jalan	Dsn Sidorejo	ADD	15.208.000,-
5	Rehab Kantor Desa	Dsn Sumberjo	ADD	6.571.000,-
6	Rehab Gedung TK Dharma Wanita	Dsn Parirejo	ADD	696.500,-
7	Pembangunan Plengsengan Saluran Tersier	Dsn Sidorejo	ADD	10.800.000,-

Sumber : LPJ pembangunan Desa Parijatahwetan tahun 2009

Data dalam **Tabel 6.** diatas menunjukkan bahwa Desa Pariajatahwetan pada tahun 2009 telah melaksanakan pembangunan yang berupa pembangunan MCK di

Dusun Melik dengan dana sebesar Rp. 116.596.500 yang bersumber dari PNPM dan pembangunan plengsengan tersier di Dusun Sidorejo dengan dana sebesar Rp. 10.800.000 yang bersumber dari dana ADD. Selain itu juga di tahun 2009 Pemerintah Desa Parijatahwetan telah melaksanakan pembangunan fisik yang lain seperti pengerasan jalan, pengurukan jalan serta rehap Kantor Desa dan rehap TK Dharma Wanita seperti yang tertera dalam **Gambar 11**. Dan **Gambar 12**. dibawah ini



Gambar 11. Pembangunan MCK di Dusun Melik

Sumber: Data Penelitian



Gambar 12. Pembangunan saluran tersier pertanian di Dusun Sidorejo

Sumber: Data Penelitian

Tabel 7. Pembangunan Fisik Tahun 2010

No	Pembangunan Fisik	Lokasi	Sumber Dana	Jumlah Dana
1	Pembangunan Jembatan	Dsn Bongkoran	ADD	35.000.000,-
2	Rehab TK Dharma Wanita	Dsn Parirejo	ADD	5.000.000,-
3	Pembangunan Gapura Kantor Desa	Dsn Sumberjo	ADD	19.000.000,-
4	Pembangunan jembatan(lanjutan)	Dsn Sidorejo	ADD	1.500.000,-
5	Pembangunan Plengsengan Jalan	Dsn Sumberjo	ADD	6.000.000,-
6	Pemeliharaan jalan	Dsn Bongkoran	ADD	4.890.000,-
7	Pengaspalan jalan	Dsn Bongkoran	Reward PBB	105.494.000,-
8	Pembangunan jembatan BOMO	Dsn Bongkoran	PNPM dan Swadaya Masyarakat	730.698.500,-

Sumber : LPJ pembangunan Desa Parijatahwetan tahun 2010

Data dalam **Tabel 7.** Menunjukkan bahwa pembangunan fisik di Desa Parijatahwetan pada tahun 2010 sebanyak delapan yang meliputi pembangunan jembatan di Dusun Bongkoran dengan anggaran dana sebesar Rp. 730.698.500 yang bersumber dari dana PNPM dan Swadaya masyarakat sekitar desa. Selain itu juga pembangunan yang terlaksana berupa pembangunan gapura kantor desa, rehab TK Dharma Wanita, pembangunan plengsengan dan pengaspalan jalan di Dusun Bongkoran seperti yang tertera dalam **Gambar 13.** dibawah ini

**Gambar 13.** Pembangunan Jembatan Sidodadi di Dusun Bongkoran

Sumber: Data Penelitian

Tabel 8. Pembangunan Fisik Tahun 2011

N o.	Pembangunan Fisik	Lokasi	Sumber Dana	Jumlah Dana
1	Pengurangan dan Pondasi Jembatan BOMO	Dsn Bongkoran	ADD	36.792.000,-
2	Pemavingan Jalan	Dsn Parirejo Rt.04/2	ADD	16.535.450,-
3	Pemavingan Jalan	Dsn Parirejo Rt.02/2	ADD	14.657.400,-
4	Plengsengan jalan	Dsn Bongkoran	ADD	4.920.300,-
5	Pembuatan Pintu Pagar Kantor Desa	Dsn Sumberjo	ADD	3.510.000,-
6	Pembangunan Jalan Telford	Dsn Sidorejo	PNPM-MP	155.155.800,-

Sumber : LPJ pembangunan Desa Parijatahwetan tahun 2011

Data dalam **Tabel 8.** Menunjukkan bahwa pembangunan fisik di Desa Parijatahwetan pada tahun 2011 yaitu sebanyak enam pembangunan fisik yang berupa pembangunan jalan telford di Dusun Sidorejo dengan anggaran sebesar Rp. 155.155.800 yang berasal dari PNPM. Pembangunan yang lainnya berupa pemavingan jalan di Dusun Parirejo, plengsengan jalan di Dusun Bongkoran serta pembuatan pintu pagar Kantor Desa Parijatahwetan yang tertera dalam **Gambar 14.** dibawah ini

**Gambar 14.** Pembangunan Jalan Telford di Dusun Sidorejo

Sumber: Data Penelitian

Tabel 9. Pembangunan Fisik Tahun 2012

N o.	Pembangunan Fisik	Lokasi	Sumber Dana	Jumlah Dana
1	Pembangunan Gapura Desa	Dsn Melik	ADD	15.261.100,-
2	Pemavingan Jalan	Dsn Parirejo Rt.02/1	ADD	22.808.800,-
3	Rabat Beton dan Pembuatan Taman Kantor Desa	Dsn Sumberjo	ADD	6.530.400,-
4	Rehab jembatan Pertanian	Dsn Sidorejo	ADD	18.312.300,-
5	Rabat Beton Jalan	Dsn Parirejo Rt.01/1	PNPM-MP	115.172.100,-
6	Pembangunan Plengsengan Jalan	Dsn Sumberjo	Reward	61.083.793,-
7	Pemavingan Jalan	Dsn Parirejo Rt.01/1	Reward	33.916.300,-

Sumber : LPJ pembangunan Desa Parijatahwetan tahun 2012

Data dalam **Tabel 9.** Menunjukkan bahwa pembangunan fisik di Desa Parijatahwetan pada tahun 2012 yaitu sebanyak tujuh pembangunan fisik yang berupa pembangunan dan plengsengan jalan di Dusun Semberjo dengan anggaran sebesar Rp. 61.083.793 yang bersumber dari dana Reward PBB. Selain itu juga pembangunan yang lain berupa pemavingan jalan di Dusun Parirejo, Rabat beton dan pembuatan taman kantor desa serta pembauatan gapura desa di Dusun Melik seperti pada **Gambar 15.** dibawah ini



Gambar 15. Gapura Desa Parijatahwetan di Dusun Melik

Sumber: Data Penelitian

Tabel 10. Pembangunan Fisik Tahun 2013

N o.	Pembangunan Fisik	Lokasi	Sumber Dana	Jumlah Dana
1	Pemavingan Jalan	Dsn Sumberjo Rt.05/1	ADD dan Swadaya Masyarakat	12.486.000,- 7.250.000,-
2	Pemavingan Jalan	Dsn Melik	ADD dan swadaya Masyarakat	26.352.000,- 2.750.000,-
3	Pemavingan Jalan	Dsn Sidorejo	ADD dan Swadaya Masyarakat	14.366.000,- 3.150.000,-
4	Pembangunan Plengsengan Jalan	Dsn Parirejo BO II	ADD dan Swadaya Msyarakat	12.211.000,- 4.600.000,-
5	Pembangunan Plengsengan Jalan	Dsn Melik	PNPM-MP	47.500.000,-
6	Pembangunan dan Plengsengan Jalan	Dsn parirejo Rt.03/2	Reward PBB dan Swadaya Masyarakat	29.108.700,- 3.650.000,-
7	Pemavingan Jalan makam	Dsn Sumberjo Rt.01/1	Reward PBB dan Swadaya Masyarakat	16.801.400,- 1.250.000,-
8	Pemavingan Jalan	Dsn Sidorejo Rt.02/2	Reward PBB dan Swadaya Masyarakat	22.966.900,- 5.350.000,-
9	Plengsengan Jalan Makam	Dsn Sumberjo Rt.01/1	Reward PBB	13.303.000,-

Sumber : LPJ pembangunan Desa Parijatahwetan tahun 2013

Data dalam **Tabel 10.** Menunjukkan bahwa pembangunan fisik di Desa Parijatahwetan pada tahun 2013 yaitu sejumlah sembilan pembangunan fisik yang berupa pemavingan jalan di Dusun Sumberjo, Dusun Melik dan Dusun Sidorejo. Pembangunan plengsengan jalan di Dusun Parirejo dan Dusun Melik serta pengsengan jalan dan pemavingan jalan makam di Dusun Sumberjo seperti pada

Gambar 16. dibawah ini



Gambar 16. Pemavingan dan Plengsengan jalan makam di Dusun Sumberjo

Sumber: Data Penelitian

b. Kemanfaatan

Hasil pelaksanaan program pembangunan di Desa Parijathwetan sangat memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai sarana yang ada serta dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya pembangunan jalan yang sudah terlaksana memberikan manfaat berupa kelancaran akses masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Selain itu juga dengan hasil pembangunan jembatan serta pembangunan drainase sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar yang mayoritasnya adalah seorang petani. Manfaat yang dirasakan diatas dibenarkan oleh beberapa tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Pembangunan berbagai prasarana infrastruktur fisik yang telah terlaksana memberikan manfaat bagi warga sekitar. Dengan adanya pembangunan yang melibatkan masyarakat, memperkecil jumlah pengangguran yang ada di Desa Parijathwetan, karena tenaga kerja yang dipakai adalah masyarakat desa sendiri. Selain itu juga dari hasil pembangunan yang telah terlaksana seperti jalan, jembatan, drainase, serta berbagai pembangunan fisik yang lain memberi manfaat terhadap kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat desa disini. Dengan adanya perbaikan jalan, masyarakat semakin mudah untuk mendistribusikan barang-barang pertanian. Selain itu juga dengan adanya pembangunan jembatan, masyarakat menjadi lebih mudah untuk berangkat ke sawah. Karena yang awalnya masyarakat yang mayoritas petani jika ingin pergi ke sawah harus memutar jalan yang lumayan jauh, dengan adanya jembatan yang baru ini sekarang masyarakat jadi lebih dekat, jadi tidak harus memutar jalan yang jaraknya lumayan jauh.”

Kutipan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan berbagai infrastruktur fisik yang sudah terlaksana memberikan banyak manfaat bagi semua masyarakat Desa Parijathwetan. Masyarakat menjadi semakin mudah dalam bermobilisasi. Kegiatan perekonomian menjadi lebih

lancar. Semua hasil yang telah dicapai dalam pembangunan tersebut tidak terlepas dari peran kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang berupa pembangunan prasarana fisik yang berguna bagi semua masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Parijatahwetan yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya. Salah satunya yaitu penyediaan fasilitas umum yang berupa pembangunan infrastruktur fisik penunjang Pembangunan berbagai infrastruktur fisik di desa ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua masyarakat Desa Parijatahwetan agar masyarakat semakin mudah dalam melakukan kegiatan perekonomian.”

Kutipan diatas menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa yang selalu berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat diharapkan memberikan manfaat bagi semua masyarakat dan terbukti dengan pembangunan fisik yang telah terlaksana memberikan banyak manfaat bagi semua masyarakat Desa Parijatahwetan. Selain itu juga partisipasi masyarakat yang secara bergotong royong saling membantu dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa mendapatkan apresiasi tersendiri. Kesadaran masyarakat akan pentingnya dan manfaat pembangunan yang berdampak terhadap kelancaran kegiatan perekonomian membuat masyarakat termotivasi untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah desa melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Dari berbagai manfaat yang dirasakan masyarakat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan fisik yang ada di desa memberikan manfaat berupa:

- 1) Dengan adanya pembangunan jalan mempermudah akses masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi maupun dalam melakukan aktivitas sehari-hari

- 2) Dengan adanya pembangunan yang melibatkan masyarakat, memperkecil jumlah pengangguran yang ada di Desa Parijatahwetan, karena tenaga kerja yang dipakai adalah masyarakat desa sendiri.
- 3) Dengan adanya jembatan mempermudah mobilisasi barang-barang pertanian dari sawah ke pabrik
- 4) Kelancaran irigasi pertanian, mempermudah proses produksi pertanian.

4. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik pedesaan di Desa Parijatahwetan

a. Faktor penghambat

Pembangunan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan demi terwujudnya suatu tujuan yang ingin dicapai. Untuk membangun segala aspek yang ada di negara ini bukanlah hal yang mudah. Pembangunan desa memiliki ruang lingkup pelaksanaan di pedesaan, maka dapat ditegaskan bahwa pembangunan desa adalah membangun prasarana, membangun usaha tani atau membangun pertanian. Pembangunan fisik adalah kebutuhan yang sangat mutlak dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan.

Pelaksanaan program pembangunan desa tidak serta merta dapat berjalan dengan lancar. Melainkan ada beberapa kendala maupun hambatan yang terjadi seiring berjalannya proses pelaksanaan pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap suatu kegiatan pasti menemui sebuah kendala yang merupakan bahan evaluasi untuk lebih baik kedepannya dengan mencari solusi pemecahan masalah.

Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Parijatahwetan ini beranekaragam. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan kendala yang menjadi faktor penghambat dalam berjalannya proses pelaksanaan pembangunan di Desa Parijatahwetan ada empat, yaitu:

- 1) Kondisi medan yang sulit
- 2) Keterlambatan bahan bangunan yang dikarenakan sulitnya mencari bahan alam tersebut
- 3) Cuaca yang tidak mendukung
- 4) Banjir yang sewaktu-waktu bisa datang, menyebabkan terhambatnya proses pengerjaan pembangunan, khususnya dalam pembangunan jembatan BOMO di Dusun Bongkoran.

Beberapa kendala diatas diungkapkan oleh ketua LPMD Desa Parijatahwetan yang selaku pelaksana kegiatan pembangunan yang ada di desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap ketua LPMD Desa Parijatahwetan yang mengatakan bahwa:

“Proses pelaksanaan pembangunan di desa ini tidak semulus seperti apa yang direncanakan, ada beberapa kendala yang dihadapi mulai dari kondisi medan yang sulit, keterlambatan bahan bangunan yang dikarenakan sulitnya mencari bahan alam tersebut. Selain itu juga faktor cuaca yang tidak mendukung. Khususnya dalam pembangunan jembatan yang ada di Dusun Bongkoran yang sering terkendala akibat banjir. Hal tersebut menjadi penghambat dalam proses pembangunan, karena pembangunan harus dilanjutkan setelah banjir sudah mulai surut. Meskipun tidak semua pembangunan mengalami kendala, tetapi Beberapa kendala yang terjadi diatas berdampak terhadap ketepatan waktu penyelesaian pembangunan tersebut. ” (wawancara pada tanggal 23 april 2014)

Dari kutipan diatas menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses

pelaksanaanya. Pernyataan diatas juga senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala Urusan Pembangunan Desa Parijatahwetan yang menuturkan bahwa:

“kondisi medan yang sulit serta kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi kendala yang sangat berpengaruh dalam proses pelaksanaan pembangunan di desa ini. Selain itu juga faktor-faktor yang lain seperti keterlambatan bahan baku pembangunan yang menjadikan proses pelaksanaan pembangunan menjadi terhambat” (wawancara pada tanggal 24 april 2014)

Beberapa kendala diatas menjadi suatu penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Parijatahwetan. Kendala yang dihadapi mengakibatkan keterlambatan waktu penyelesaian pembangunan tersebut, yang sebelumnya ditargetkan selesai dalam waktu seratus hari kerja dan karena terhambat oleh beberapa kendala yang ada mengakibatkan target waktu penyelesaian bisa lebih dari seratus hari tersebut.

b. Faktor pendukung

Selain faktor penghambat yang ada diatas terdapat juga faktor pendukung yang menjadikan proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Parijatahwetan yaitu:

- 1) Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Desa Parijatahwetan yang berbentuk:
 - a) Ikut serta dalam proses perencanaan hingga proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Parijatahwetan.
 - b) Bergotong-royong dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Parijatahwetan.

- c) Swadaya masyarakat dalam bentuk sumbangan uang untuk menambah modal pembiayaan pembangunan yang sedang berlangsung.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan. Sikap toleransi akan kehidupan sekitar serta nilai kebudayaan bergotong royong yang selalu identik dalam kehidupan di pedesaan menjadikan pelaksanaan pembangunan di desa ini dapat tercapai sesuai dengan harapan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pembangunan menjadi sebuah motivasi bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi membangun desanya. Tingkat kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Parijatahwetan sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat di Desa Parijatahwetan ini sangat tinggi, hal ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan juga berpartisipasi dengan ikut serta melakukan pembangunan bersama pemerintah desa secara bergotong royong. selain itu juga swadaya masyarakat yang berupa bantuan pendanaan untuk menambah modal pembangunan menjadikan apresiasi tersendiri bagi pemerintah desa.” (wawancara tanggal 18 april 2014)

Kutipan wawancara diatas senada dengan yang diungkapkan oleh Ketua LPMD selaku pelaksana proses pembangunan di Desa Parijatahwetan yang mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat desa disini memiliki sikap partisipasi yang sangat tinggi, hal itu dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pelaksanaan pembangunan yang sedang berlangsung. Masyarakat desa secara bergotong-royong bahu membahu membantu pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan. Karena masyarakat desa memiliki pekerjaan yang harus dikerjakan, sehingga untuk pelaksanaannya ketua RW setempat mengkoordinir masyarakat desa dengan cara dijadwal untuk bergotong royong, sehingga bisa bergantian. (wawancara pada tanggal 23 april 2014)

Dari kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa tingkat pasrtisi[asi masyarakat yang ditunjukkan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Parijatahwetan ini sangat tinggi. Tingginya tingkat pasrtisipasi dari masyarakat sekitar tidak terlepas dari peran kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Dengan memberikan dorongan, pengarahan tentang pentingnya sebuah pembangunan bagi kehidupan masyarakat yang berdampak terhadap perkembangan perekonomian desa.

C. Pembahasan

1. Kinerja Aparat Pemerintah Desa

a. Kedisiplinan Aparat

Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya. Disiplin berarti melatih batin dan watak supaya perbuatannya menaati tata tertib dan teratur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Pembinaan kedisiplinan perlu diadakan guna menciptakan suatu kinerja yang baik bagi seorang aparat pemerintah. Kinerja pemerintahan yang baik ditentukan dengan salah satunya sikap disiplin para aparatnya. Mulai dari disiplin dalam absensinya maupun kedisiplinan dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan.

Disiplin berkaitan dengan tingkat kepatuhan seorang aparat dalam hal ini terhadap berbagai peraturan dan perintah dari atasan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dari hasil pengamatan yang ada dilapangan dan wawancara yang dilakukan selama dua minggu, diketahui bahwa tingkat kedisiplinan aparat Desa

Parijatahwetan dalam menjalankan pemerintahan dapat dikatakan cukup baik. Kedisiplinan yang ditunjukkan oleh para Aparat Pemerintah Desa Parijatahwetan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prijodarminto (1994:54) yang mengatakan bahwa kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Karena sudah menyatu dengannya, maka sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana tidak berbuat sebagaimana lazimnya.

Sikap Aparat Desa Parijatahwetan yang dilakukan merupakan sebuah tanggung jawab atas pekerjaan yang menjadi tugasnya dan semua itu dilakukan semata-mata demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sikap dan perbuatan yang dilakukan bukan dirasakan sebagai beban, melainkan sebuah kesenangan tersendiri bagi para aparat karena dapat bekerja melayani masyarakat. Hal ini terlihat dari hasil kerja yang dicapai oleh aparat desa yang selalu tepat waktu dalam penyelesaiannya. Berbagai pekerjaan pemerintahan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semua itu dikarenakan rasa tanggungjawab sebagai seorang aparat pemerintah yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat, sehingga mendorong para aparat untuk bersikap disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Kedisiplinan aparat pemerintah desa dalam menjalankan segala tugas pemerintahan tersebut merupakan sisi positif yang baik, tetapi dalam pengamatan dilapangan ada sisi negatif yang ditunjukkan oleh aparat Desa Parijatahwetan. Sisi

negatifnya yaitu mengenai ketepatan waktu yang kurang dalam kehadiran di kantor desa. hal tersebut terlihat dari kondisi sebenarnya kantor Desa Parijatahwetan yang seharusnya menurut sumber yang peneliti peroleh bahwa ketentuan jam pelayanan pemerintahan dimulai pukul 07.00 WIB dan diharuskan pada jam itu para aparat desa harus sudah ada dikantor dan siap menjalankan tugas-tugas pemerintahan, seperti pelayanan kepada masyarakat maupun yang lain. Tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan berbeda. Pada hari kedua penelitian, peneliti sengaja datang lebih awal dari biasanya yaitu pukul 07.00 WIB. Betapa terkejutnya peneliti mendapati bahwa tidak ada seorangpun aparat desa yang hadir dikantor. Sekitar setengah jam kemudian barulah kepala desa hadir dikantor dan ketika jam menunjukkan pukul 08.00 WIB barulah semua aparat desa hadir di kantor.

Kondisi kedisiplinan aparat pemerintah desa diatas tentang tingkat kehadiran merupakan kinerja yang buruk. Dikatakan buruk karena sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh T.R. Mitchell (1978) yang dikutip Sedarmayanti (2001:51) menyebutkan lima (5) aspek yang dijadikan indikator atau ukuran dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja seseorang yang salah satunya yaitu tentang *Promptness* yaitu tingkat kehadiran yang baik. Jika teori tersebut dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja aparat desa parijatahwetan tentang tingkat kehadiran sangat buruk.

Fenomena keterlambatan aparat desa dalam kehadirannya dikantor desa memang sering terjadi. Menurut penuturan kepala desa dalam wawancara bahwa perangkat desa memang sering telat dalam kehadirannya dikantor. Keterlambatan

para aparat desa tersebut dikarenakan oleh beberapa alasan. Mulai dari alasan mengurus anaknya terlebih dahulu sebelum berangkat ke kantor, selain itu juga ada yang mengurus sawahnya terlebih dahulu. Tidak heran jika aparat desa sering terlambat, mereka memiliki kerja sampingan sebagai petani, oleh sebab itu mereka mengurus sawahnya terlebih dulu baru setelah itu berangkat ke kantor.

Meskipun terdapat sisi negatif dari kehadiran aparat desa di kantor, para aparat menutupi segala kekurangannya tersebut dengan bekerja secara disiplin dalam hal melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas yang diselenggarakan secara rutin setiap hari dilakukan secara maksimal. Aparat desa Parijatahwetan memegang prinsip untuk melayani masyarakat dengan semaksimal mungkin. Kepala desa secara rutin mengevaluasi perangkatnya dalam sebulan sekali mengenai kehadiran para perangkat di kantor desa. Kepala desa tidak segan untuk memberi surat peringatan bagi mereka yang sering terlambat. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi lagi keterlambatan para aparat desa dalam kehadirannya di kantor desa.

b. Kemampuan Kerja Aparat

Kinerja seorang aparat dalam menjalankan tugas sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh seorang aparat tersebut. Kemampuan dalam menjalankan tugas menjadi suatu indikator keberhasilan seorang aparat dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan. Fungsi dari aparatur pemerintah pada dasarnya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat keanekaragaman kebutuhan dan permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat membutuhkan suatu penanganan yang baik oleh

pemerintah, khususnya dalam hal ini yaitu pemerintah desa. Seorang aparat pemerintah dituntut memiliki kemampuan yang baik dalam segala bidang, mulai dari bidang pemerintahan maupun bidang pembangunan. Karena keberhasilan pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugasnya sangat tergantung dari seberapa baik kemampuan aparatnya dalam menangani segala kebutuhan dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kemampuan yang dimiliki aparat Pemerintah Desa Parijatahwetan jika dilihat dari segi kemampuan intelektual (*Intellectual Ability*) seperti yang dikemukakan oleh Robbins (2009:57), bahwa kemampuan intelektual yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental (berfikir, menalar dan memecahkan masalah) bisa dibilang cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil yang diperoleh pemerintah desa selama ini yang berupa rencana kerja yang tersusun dengan baik, selalu bekerja sama dengan masyarakat dalam sebuah forum untuk merumuskan suatu kebijakan pembangunan yang akan dijalankan. Serta evaluasi yang selalu diterapkan oleh Kepala Desa setiap bulannya terhadap masalah yang timbul dengan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari. Sehingga dapat meminimalisir resiko.

Jika dilihat dari segi kemampuan fisik (*Physical Ability*) seperti keterampilan, kekuatan dan karakteristik serupa yang diungkapkan oleh Robbins (2009:57), terlihat bahwa Aparat Pemerintah Desa Parijatahwetan memiliki keterampilan yang sangat baik. Tingkat pendidikan seseorang juga menjadi salah satu faktor seberapa baik kemampuan seseorang tersebut. Keterampilan dan

kemampuan aparat diperoleh dari pendidikan yang pernah dijalannya, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Meskipun latar belakang pendidikan Aparat Desa Parijatahwetan yang rata-rata hanya lulusan SMA dan hanya satu orang yang berpendidikan sarjana yaitu Kepala Desa. Tetapi kenyataan yang ada dilapangan menunjukkan bahwa meskipun lulusan SMA terbukti bahwa kemampuan dan ketrampilan Aparat Desa Parijatahwetan sangat baik. Bisa dikatakan baik karena jika dilihat dari segi *capability* seperti yang diungkapkan Sedarmayanti (2001:51), hasil kerja yang sudah terlaksana mulai dari rencana kerja yang tersusun dengan baik, laporan hasil kerja yang selalu selesai tepat waktu, serta hasil pembangunan yang sudah terlaksana dapat memberikan manfaat bagi masyarakat banyak.

Lebih lanjut jika dilihat dari segi kualitas layanan seperti yang diungkapkan oleh Dwiyanto (2006:50), pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan yang lainnya dilakukan secara optimal. Kemudian dari segi responsivitas dan responsibilitas, Pemerintah Desa Parijatahwetan mampu mengenali kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat desa, seperti pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai suatu infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian dan lainnya. Tetapi tidak semua kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh Pemerintah Desa, karena tidak mungkin banyaknya kebutuhan masyarakat mampu dilayani, sedangkan kemampuan seorang aparat juga terbatas. Selain itu juga dana yang digunakan untuk memenuhi semua hal tersebut terbatas.

Untuk meningkatkan kemampuan seorang aparat perlu ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya kepala desa. kepala desa wajib memberikan pengarahan kepada para perangkatnya tentang bagaimana menjalankan tugas pemerintahan desa, serta bagaimana cara yang baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selain itu juga dengan memberikan bimbingan teknis tentang penanganan berbagai permasalahan yang ada dilapangan serta bagaiman pelaksanaan pembangunan yang baik dalam hal ini yaitu pembangunan infrastruktur fisik. Semua hal diatas dimaksudkan agar aparat lebih memahami dan mampu menjalankan tugas pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.

c. Motivasi Aparat

Motivasi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dorongan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu karena kebutuhan atau mencapai suatu hal yang ingin diharapkan. Motivasi merupakan suatu hasrat yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan dirinya untuk melakukan suatu hal atau tindakan. Berbicara mengenai motivasi, menurut campbell dalam Purwanto (1992:73) yang mengatakan bahwa motivasi mencakup didalamnya arah dan tujuan tingkah laku, kekuatan respons dan kegigihan tingkah laku. Istilah tersebut mencakup kebutuhan (*need*) yang merupakan motivasi yang bersala dari dalam diri individu (*intern*) dan motivasi yang bersala dari luar (*ekstern*) yang berupa konsep dorongan (*drive*), rangsangan (*incentive*), Ganjaran (*reward*), penguatan (*reinforcement*), ketepatan tujuan (*goal setting*), harapan (*expectancy*) dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian dapat diketahui bahwa aparat Desa Parijatahwetan memiliki motivasi yang tinggi. Hal ini terlihat dari hasil yang diperoleh selama ini oleh pemerintah desa yaitu kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dalam berbagai bidang yang salah satunya dalam bidang pembangunan. Rasa ingin terpenuhi segala kebutuhannya (*need*) menjadi suatu motivasi atau dorongan bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dalam kaitannya ini, kebutuhan akan ekonomi dan sosial membuat para aparat pemerintah untuk melakukan tindakan yaitu melakukan pekerjaan agar mereka bisa memenuhi segala kebutuhannya. Memang tidak semua kebutuhan bisa terpenuhi, tetapi setidaknya sudah terpenuhi sebagian. Hal ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti bahwa *initiative* atau motivasi yang terdiri dari inisiatif dan rasa tanggung jawab atas pekerjaan yang diembannya berdampak terhadap peningkatan kerja yang diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.

Selain motivasi yang dimiliki dalam diri aparat sendiri, terdapat juga motivasi yang berasal dari luar (*ekstern*), mulai dari lingkungan hingga atasan. Lingkungan pekerjaan turut andil dalam menumbuhkembangkan motivasi seorang aparat, serta motivasi yang selalu diberikan oleh kepala desa yang berupa dorongan (*drive*) untuk selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menjadi salah satu tambahan tersendiri bagi seorang aparat. Pemerintah desa telah menyediakan lahan “bengkok” atau lahan garapan untuk para perangkat desa. Lahan tersebut berhak dikelola oleh semua aparat desa Parijatahwetan tanpa terkecuali. Langkah tersebut merupakan sebuah rangsangan (*insentive*) yang

diharapkan agar dapat meningkatkan motivasi aparat desa untuk semakin bersemangat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Hasilnya menunjukkan bahwa sudah banyak pembangunan yang sudah terlaksana di Desa Parijatahwetan, baik itu bersifat fisik maupun non fisik. Semua hal itu tidak terlepas dari motivasi aparat untuk membangun desa nya agar semakin sejahtera.

2. Proses Pelaksanaan Program

a. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan merupakan suatu acuan dalam pelaksanaan suatu program. Adanya suatu mekanisme atau prosedur menjadikan pelaksanaan pekerjaan lebih efektif dan efisien. Begitu juga dengan pembangunan fisik yang membutuhkan suatu mekanisme yang jelas dalam proses pelaksanaannya. Karena dengan mekanisme yang jelas akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Selain itu juga dengan adanya mekanisme pelaksanaan akan meminimalisir resiko yang akan terjadi, baik itu dalam hal proses pengerjaannya maupun dalam ketepatan waktu penyelesaian pembangunan fisik tersebut.

Mekanisme mempunyai arti yang cukup penting dalam suatu pelaksanaan program. Sebuah pembangunan tidak akan terlepas dari yang namanya suatu administrasi. Sejatinya administrasi merupakan suatu kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, dan tujuan yang telah disepakati dalam hal ini yaitu mendapatkan hasil pembangunan yang berdaya guna bagi seluruh masyarakat yang ada di Desa Parijatahwetan. Sebelum melangkah pada tahap pelaksanaan suatu pembangunan, terlebih dahulu ada proses administrasi dalam tahap perencanaan hingga tahap pencairan dana yang akan

digunakan sebagai biaya pembangunan yang akan berlangsung. Semua hal tersebut sudah ditetapkan dalam mekanisme pelaksanaan suatu program.

Sebuah pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu administrasi yang baik pula. Tanpa adanya suatu mekanisme yang terbentuk, proses administrasi tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Disini terlihat bahwa begitu penting sebuah mekanisme pelaksanaan atau prosedur pelaksanaan dalam suatu pemerintahan. Begitu juga dalam sebuah pembangunan, harus ada mekanisme yang jelas agar nantinya sebuah pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Menurut Ismail masya (1994 : 74) yang mengatakan bahwa “Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.

Dari hasil wawancara tentang mekanisme pelaksanaan program pembangunan yang diselenggarakan di Desa Parijatahwetan secara umum bahwa pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan hanya sebatas hingga pencairan dana. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) yang mengungkapkan bahwa mekanisme pelaksanaan suatu program harus didahului dengan perencanaan dan pengendalian serta spesifikasi teknis dan standarisasi. Semua itu terlihat dari pemerintah desa merencanakan segala bentuk pembangunan fisik yang akan dilaksanakan dengan menentukan standarisasi proses agar nantinya mudah dalam proses pengendaliannya. Untuk spesifikasi teknisnya pemerintah desa melakukan suatu musyawarah desa untuk merumuskan

pembangunan yang akan dijalankan ditahun tersebut. Setelah itu pemerintah desa memprioritaskan pembangunan apa saja yang sekiranya perlu dibangun diwaktu itu. Selanjutnya dari hasil prioritas tersebut dijadikan bahan untuk musyawarah ditingkat kecamatan. Pihak kecamatan kemudian memprioritaskan dari berbagai usulan dari semua desa yang ada di Kecamatan Srono. Setelah hasilnya diperoleh maka pihak kecamatan akan mengumumkan hasilnya, desa mana yang akan disetujui program pembangunannya.

Setelah usulan disetujui, pihak desa tinggal menunggu dana pembangunan cair. Perlu diketahui bahwa dana yang nantinya cair akan masuk langsung ke rekening bendahara desa. setelah dana cair, pihak desa menyerahkan dana tersebut kepada LPMD pembangunan desa dengan disertai surat keterangan penyerahan dana pembangunan. Pihak LPMD juga juga menyertai surat permohonan pencairan dana kepada kepala desa. setelah dana sudah diserahkan kepada LPMD, pemerintah desa menyerahkan segala proses pelaksanaan pembangunan kepada LPMD dan pemerintah desa tinggal menunggu hasil dari pembangunan yang akan dilaksanakan.

LPMD sebagai pelaksana kegiatan pembangunan di Desa Parijatahwetan langsung melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana kerja pembangunan yang sebelumnya telah dibuat dan disepakati oleh pemerintah desa. LPMD mulai mendatangkan tenaga kerja dan bahan serta alat yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bahan dan alat yang dipergunakan pun dimobilisasi secara bertahap. Mulai dari pasir, batu, semen dan bahan lainnya didatangkan secara bertahap sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat. Semua itu dilakukan

karena tempat untuk meletakkan bahan-bahan tersebut yang terbatas, sehingga pihak pelaksana hanya mendatangkan bahan-bahan tersebut secukupnya. Jika memerlukan bahan tambahan kemudian pihak pelaksana tinggal mendatangkan bahan lagi. Begitupun seterusnya hingga proses pelaksanaan pembangunan selesai.

Ketepatan waktu juga diperhitungkan dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut. Dalam pembangunan yang ada di Desa Parijatahwetan tidak semuanya murni dilakukan oleh LPMD, melainkan ada kerja sama dengan masyarakat maupun pihak swasta. Seperti dalam pembangunan jembatan di Dusun Bongkoran, untuk proses pembangunannya LPMD bekerja sama dengan masyarakat dengan bergotong royong membangun jembatan tersebut. Selain itu juga karena keterbatasan alat yang dimiliki, pihak pelaksana bekerja sama dengan swasta dalam pengadaan bahan besi penopang jembatan tersebut. Kerjasama dengan pihak swasta pun hanya sebatas pengadaan besi dan pemasangannya tersebut. Selanjutnya untuk pengerjaan yang lainnya dikerjakan oleh pihak pelaksana dan masyarakat secara bergotong royong hingga bangunan selesai dan siap digunakan.

b. Sumber Dana

Sebuah pembangunan tidak akan terlepas dari yang namanya sumber dana. Tanpa adanya dana yang mendukung, sebuah pembangunan tidak akan bisa terwujud. Secara umum, berdasarkan peraturan perundang undangan, sebenarnya desa dapat membangun daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri secara bottom up. Dimana desa terdiri dari kepala desa dan perangkatnya serta badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai legislatif Desa dan lembaga

kemasyarakatan. Di sisi lain, sumber pembiayaan bagi pembangunan desa yang dapat diambil berdasar perundang undangan yaitu dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten / Kota, dari penghasilan desa yang syah (BUMdes), serta kerjasama dengan pihak ketiga yaitu masyarakat maupun swasta.

Berdasarkan hasil wawancara tentang sumber dana yang diperoleh untuk melaksanakan pembangunan di Desa Parijatahwetan diperoleh data bahwa semua pembangunan di Desa Parijatahwetan yang dilaksanakan pada tahun 2009 hingga tahun 2013 pendanaanya berasal dari pemerintah pusat yang berbentuk PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), pemerintah kabupaten yang berbentuk ADD (Alokasi Dana Desa) dan Reward PBB, serta swadaya murni dari masyarakat. Sumber pendanaan diatas sesuai dengan pendapat Siswanto (1988:66) yang mengatakan bahwa sumber dana dalam penyelenggaraan pemerintah desa bersumber dari:

- 4) Swadaya masyarakat desa/kelurahan setempat baik berupa uang maupun tenaga
- 5) Bantuan pemerintah baik dari Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Tingkat I maupun dari Pemerintah Pusat.
- 6) Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu diketahui bahwa dana yang bersumber dari pemerintah kabupaten yang berupa Reward PBB hanya diberikan kepada desa-desa tertentu yang tercepat dalam pelunasan pajak PBB desanya. Tidak semua desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi mendapatkan Reward. Besaran dana reward juga ditentukan oleh rangking pelunasan pajak desa serta besaran pajak PBB yang ada di desa tersebut.

Desa Parijatahwetan dalam hal pembangunan dalam wawancara yang telah dilakukan bahwa sebenarnya desa bisa mendanai pembangunan yang telah diusulkan, asalkan besaran dana yang dibutuhkan dibawah angka 50 juta. Tetapi jika besaran angka yang dibutuhkan dalam pembangunan lebih dari 50 juta maka pemerintah desa mengusulkannya kepada pemerintah kabupaten melalui musyawarah rencana pembangunan kecamatan (MUSREMBANGCAM). Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah desa, sedangkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan yang lumayan banyak secara otomatis pihak desa mengusulkan pembiayaan kepada pemerintah kabupaten. Karena apabila tidak diupayakan seperti itu maka pembangunan di desa tidak akan berjalan dengan baik. Semua hal diatas didasarkan pada mekanisme ekonomi yang dikemukakan oleh Mardiasmo(2002). Jika pembangunan didanai oleh pendapatan desa yang sebenarnya pembangunan tersebut menelan biaya yang besar bahkan melebihi angka 50 juta pastinya akan merepotkan pemerintah desa sendiri karena harus mencari dana tambahan untuk pembangunan tersebut, baik itu dari swasta maupun dari masyarakat dalam bentuk penggalangan dana. Oleh sebab itu jika pembangunan yang membutuhkan biaya mencapai diatas 50 juta pemerintah desa mengusulkan pendanaan kepada pemerintah daerah.

Selain pembiayaan dari pemerintah, pembangunan di Desa Parijatahwetan juga bersumber dari swadaya murni masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah prasarana penunjang, mendorong masyarakat untuk memberikan swadaya dalam bentuk bantuan dana untuk pembangunan prasarana tersebut. Kesadaran masyarakat yang tersebut tidak serta merta terjalin begitu

saja. Kinerja pemerintah desa yang baik dengan dengan memberikan dorongan dan memberitahukan transparansi biaya pembangunan yang diperoleh untuk pembangunan menjadi pemicu semangat masyarakat untuk memberikan swadaya mereka. Terkadang dana yang diperoleh untuk pembangunan tidak mencukupi, sehingga dengan bantuan swadaya masyarakat meskipun tidak seberapa tetapi setidaknya bisa menambah pendanaan untuk proses pembangunan tersebut yang akhirnya mendapatkan hasil pembangunan yang sesuai dengan harapan semua masyarakat.

c. Pencairan Dana

Pencairan dana merupakan tahapan selanjutnya setelah mendapatkan sumber dana untuk pembangunan. Pencairan dana dilakukan dengan beberapa serangkaian tahapan. PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat (APBN) dan daerah (APBD) serta Reward PBB yang disalurkan ke rekening kolektif desa di kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai hibah untuk membangun sarana/ prasarana penunjang produktivitas desa, pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tentang pencairan dana pembangunan di Desa Parijatahwetan diperoleh bahwa dalam perihal pencairan dana dilakukan dengan berbagai tahapan. Pencairan dana dilakukan dengan menyertakan surat permohonan pencairan dana oleh pihak desa kepada kecamatan. Perihal pencairan dana diatas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 13 Tantang Pengelolaan

Keuangan daerah, pengertian SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Dalam hal pencairan dana tidak kesemuanya sumber dana yang diperoleh sama untuk pencairannya. Sebagai contoh yaitu dalam pencairan dana PNPM. Dana dari PNMPM akan turun secara bertahap, tidak 100% langsung dicairkan. Awalnya akan cair sebesar 40 %, setelah dana tersebut cair kemudian dikelola untuk melaksanakan pembangunan dengan yang telah direncanakan. Kemudian setelah dana tersebut habis pihak pelaksana melakukan musyawarah pertanggungjawaban yang pertama (MPJ 1) yang dijadikan bahan untuk pencairan dana selanjutnya yaitu sebesar 40%, setelah dana tersebut cair langkah selanjutnya sama dengan yang pertama yaitu melanjutkan pelaksanaan pembangunan dan setelah pembangunan mencapai 80% pihak pelaksana melakukan musyawarah pertanggungjawaban yang kedua (MPJ 2) yang dijadikan bahan untuk pencairan dana yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu sebesar 20%. Setelah pembangunan selesai dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana, pihak pelaksana kemudian menyerahkan hasil pembangunan tersebut ke pemerintah desa.

Tahapan pencairan dana diatas dimaksudkan agar mempermudah penelusuran. Rumitnya tahapan pencairan dana PNPM lain halnya dengan pencairan dana ADD dan Reward PBB. Untuk pencairan dana ADD dan Reward, pihak desa cukup menyampaikan surat permohonan pencairan dana kepada pemerintah kabupaten dan kemudian jika permohonan tersebut disetujui maka

desa tinggal menunggu waktu pencairan dana yang langsung 100%. Setelah dana turun pihak kepala desa menyerahkan kepada LPMD sebagai pihak pelaksana kegiatan pembangunan yang ada di desa dengan menyertakan surat penyerahan dana pembangunan. Selain itu juga ketua LPMD sebagai pelaksana juga menyertakan surat permohonan pencairan dana kepada kepala desa. pemerintah memberikan kewenangan kepada LPMD untuk melaksanakan kegiatan pembangunan.

d. Mobilisasi Tenaga Kerja, Bahan dan Alat

Proses pelaksanaan sebuah pembangunan ditunjang oleh beberapa faktor.

Selain faktor dana yang sudah disebutkan diatas, faktor yang lain yang juga berpengaruh yaitu faktor tenaga kerja, bahan dan alat. Mobilisasi tenaga kerja merupakan sebuah gerakan sosial yang muncul karena tersedianya faktor-faktor pendukungnya, seperti adanya sumber-sumber pendukung, tersedianya kelompok koalisi dan adanya dukungan dana, adanya tekanan dan upaya pengorganisasian yang efektif serta sumber daya yang penting berupa ideologi (Fakih, 2002:xxvii)

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh mengenai mobilisasi tenaga kerja, bahan dan alat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Parijatahwetan. Mobilisasi tenaga kerja, bahan dan alat yang dilakukan karena merupakan suatu kebutuhan, serta adanya dukungan dana dan tekanan serta upaya pengorganisasian. Mobilisasi tenaga kerja, bahan dan alat membutuhkan sebuah proses yang mana semua hal tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah dibuat. Sebuah pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya tenaga kerja dan bahan yang tersedia. Pemilihan bahan dan

alat yang tepat serta berkualitas bagus menjadi suatu keharusan jika mengharapkan sebuah hasil pembangunan yang berkualitas. Pemilihan bahan yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan merupakan bagian dari spesifikasi teknis dan standarisasi. Karena dengan standar bahan yang ditentukan dan diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan akan berdampak terhadap kualitas bangunan yang akan dilaksanakan

Dalam mobilisasi tenaga kerja atau yang biasa disebut dengan tukang oleh masyarakat sekitar, pemerintah desa memprioritaskan masyarakat desa sendiri sebagai tenaga kerja dalam proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Baik itu tukang batu maupun tukang kayu. Mobilisasi tenaga kerja yang memprioritaskan masyarakat desa merupakan bagian dari mekanisme sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Mardiasmo(2002) bahwa untuk mekanisme mobilisasi tenaga kerja yang diperlukan dalam proses pelaksanaan program pembangunan lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki. Langkah tersebut diambil sebagai upaya memberdayakan masyarakat desa agar lebih terampil dalam bidang pembangunan. Tetapi semua itu dilakukan dengan pengarahan seorang ahli dalam bidang pembangunan. Agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memperoleh hasil yang baik. Selain itu juga bermaksud untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Desa Parijatahwetan.

Partisipasi masyarakat Desa Parijatahwetan sangat tinggi dalam hal pembangunan pedesaan. Ini terlihat dari keikutsertaan masyarakat desa mulai dari perencanaan pembangunan hingga dalam tahap pelaksanaan pembangunan.

Sebagai contoh dalam pembangunan jembatan di Dusun Bongkoran, masyarakat bekerja sama dengan pemerintah desa secara bergotong royong membangun jembatan tersebut. Meskipun sudah ada tenaga kerja dalam pembangunan tersebut, masyarakat Dusun Bongkoran dengan sukarela membantu proses pelaksanaan dengan dikoordinir oleh kepala dusunnya. Setiap ketua RT mengkoordinir masyarakatnya untuk bergotong royong membangun jembatan tersebut berdasarkan jadwal piket. Semisal hari senin yaitu piketnya RT 1, jadi warga RT 1 pada hari itu melakukan “gugur gunung” dalam istilah di dusun itu untuk membantu proses pembangunan jembatan. Begitupun seterusnya dengan hari-hari berikutnya secara bergantian setiap RT mengkoordinir warganya untuk bergotong-royong. Begitupun sebaliknya dengan dusun-dusun yang lain yang ada di Desa Parijatahwetan yang memiliki karakteristik hampir sama dengan warga Dusun Bongkoran.

Sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Parijatahwetan perlu mendapat apresiasi tersendiri. Partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pembangunan pedesaan bisa menjadi referensi bagi desa-desa yang lain untuk menerapkan langkah tersebut. Selain berfungsi menciptakan kerukunan antar warga, warga juga dapat menjadi pengawas dalam proses pembangunan tersebut. Sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan dalam proses pembangunan yang berlangsung.

Selain faktor tenaga kerja diatas, sebuah pembanguna tidak akan terlepas dari yang namanya bahan dan alat. Pelaksana kegiatan pembangunan di Desa Parijatahwetan yang dalam hal ini yaitu LPMD dan TPK dalam mobilisasi bahan

dan alat dilakukan dengan cara lelang. Pihak pelaksana pembangunan akan mengundang beberapa penyedia bahan dan alat yang ada di desa untuk ditunjuk sebagai penyedia bahan yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang akan berlangsung. Para penyedia berlomba-lomba memberikan penawaran bahan dan alat yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan harga berdasarkan kualitas barang. Pihak pelaksana kemudian memilih penyedia yang memberikan penawaran barang yang murah tetapi memiliki kualitas yang cukup baik.

Pelaksana kegiatan bekerja sama dengan pemenang lelang dalam hal pengadaan barang. Setiap barang yang dibutuhkan dalam pembangunan pihak pelaksana tinggal menghubungi penyedia barang. Kemudian barang akan dikirim sesuai dengan pesanan. mobilisasi barang pun dilakukan secara bertahap, sesuai dengan keperluan dan begitu seterusnya hingga pembangunan selesai.

3. Realisasi

a. Wujud Pembangunan Fisik

Kemakmuran dan perkembangan desa identik dengan wujud pembangunan fisik desa. Upaya pengembangan desa tentu saja memerlukan berbagai penambahan fasilitas umum yang diharapkan dapat meningkatkan kondisi kesejahteraan dan potensi desa. Banyaknya fasilitas yang dibutuhkan masyarakat merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah desa untuk mewujudkannya. Tentu saja semua kebutuhan itu tidak dapat langsung dengan serta merta terwujud, karena harus disesuaikan dengan program kerja tahunan dan APBDesa.

Banyaknya usulan pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di desa tidak mungkin akan disetujui semuanya, karena terkendala oleh biaya dan waktu pelaksanaan. Dengan banyaknya usulan yang masuk, pemerintah desa perlu memprioritaskan pembangunan yang dirasa sangat dibutuhkan masyarakat di tahun tersebut. Dengan prioritas pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah desa, bukan berarti bahwa usulan-usulan yang lain tidak disetujui. Melainkan semua usulan yang belum disetujui tersebut disimpan untuk dijadikan referensi dalam musyawarah rencana pembangunan ditahun selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang diperoleh dalam penelitian tentang wujud pembangunan fisik di Desa Parijatahwetan diperoleh hasil bahwa, dalam rentan waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 Pemerintah Desa parijatahwetan berdasarkan prioritas yang telah disepakati telah berhasil melaksanakan berbagai pembangunan fisik. Dari data yang diperoleh bahwa pembangunan fisik yang telah dilaksanakan pada tahun 2009 hingga tahun 2013 Pemerintah Desa Parijatahwetan telah berhasil melaksanakan 37 pembangunan fisik, mulai dari pembangunan jalan aspal, jalan telford, jembatan orang, jembatan pengairan, pemavingan jalan, saluran pengairan, MCK serta rehab sekolahan dan lain-lain.

Banyaknya hasil pembangunan yang dilaksanakan di Desa Parijatahwetan tersebut tidak terlepas dari kinerja aparat pemerintah desa yang selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya. Pembangunan nasional pada dasarnya berawal dari pembangunan pedesaan, oleh karena itu pembangunan

pedesaan dirasa sangat penting. Pemerintah desa sadar akan kebutuhan pembangunan fisik bagi warganya, oleh sebab itulah pemerintah desa berupaya membangun berbagai prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh warganya tersebut. Masyarakat desa yang umunya bermata pencaharian sebagai seorang petani memerlukan sebuah pembangunan fisik sebagai prasarana penunjang kegiatan perekonomian, seperti jalan untuk mempermudah akses, jembatan untuk menghubungkan antar daerah, serta saluran irigasi yang sangat penting bagi pengairan pertanian serta prasarana yang lain yang berguna bagi masyarakat pedesaan.

b. Kemanfaatan

Pembangunan prasarana fisik yang dilaksanakan oleh pemerintah pada dasarnya merupakan sebuah pelayanan kepada masyarakatnya. Segala bentuk pembangunan fisik yang telah berhasil diwujudkan diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua orang. Dengan adanya prasarana yang telah dibangun diharapkan akan mempermudah kegiatan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang ada dilapangan tentang kemanfaatan pembangunan fisik yang telah terlaksana di Desa Parijatahwetan menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa dengan adanya pembangunan fisik yang telah terbangun memberikan dampak baik bagi kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat desa. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Adisasmita (2013: 58) sasaran umum yang harus dicapai dalam pembangunan pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya infrastruktur fisik dan sosial yang mencakup jaringan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah.
2. Terlaksananya pembangunan ekonomi yang mencakup ketersediaan sumber-sumber penghasilan, produktivitas pertanian yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pemanfaatan sumber daya alam
3. Terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi terciptanya kesadaran akan arti pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak, dan adanya upaya nyata untuk menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi.
4. Terwujudnya penguatan kelembagaan yang mencakup prosedur perencanaan yang melibatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan local yang semakin berdaya mampu.
5. Percepatan pertumbuhan dari desa swadaya menjadi desa swakarya dan seterusnya menjadi desa swasembada.
6. Peningkatan keterampilan dalam berproduksi (pertanian, industri kecil, dan lainnya) dan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha produktif.

Pencapaian sasaran pembangunan yang terlaksana di Desa Parijatahwetan dengan dibangunnya berbagai prasarana fisik seperti pembangunan jaringan jalan, pemavingan jalan yang berdampak bagi kelancaran akses masyarakat serta distribusi barang-barang perekonomian masyarakat. Selain itu juga dengan dibangunnya jembatan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang umumnya seorang petani untuk berangkat kerja serta mendistribusikan hasil pertaniannya ke

pabrik. Kelancaran akses yang dirasakan oleh masyarakat berdampak terhadap peningkatan perekonomian. Karena dengan adanya jembatan penghubung yang lebih dekat, sehingga masyarakat desa bisa lebih menekan pengeluaran transportasi distribusi barang-barang dan hasil pertanian. Hal ini merupakan sasaran kedua dalam pembangunan pedesaan sesuai dengan yang diungkapkan oleh Adisasmita (2013:53)

Perlu diketahui bahwa sebagian besar ladang perswahan masyarakat Desa Parijatahwetan berada didesa seberang yang dipisahkan oleh sungai yang lebar. Sebelumnya memang sudah ada jembatan penghubung, tetapi ukurannya tidak cukup lebar untuk dilewati kendaraan roda empat. Selain itu juga karena faktor usia yang membuat jembatan tersebut dirasa tidak kokoh lagi. Tetapi dengan dibangunnya jembatan baru yang bisa dilewati oleh kendaraan roda empat, sekarang masyarakat semakin mudah mendistribusikan barang-barang pertaniannya kesawah tanpa harus memutar jalan yang jaraknya lumayan jauh.

Manfaat lainnya yang dirasakan masyarakat yaitu terciptanya kelestarian lingkungan yang meliputi kesadaran akan pentingnya lingkungan, berkembangnya kepedulian lingkungan semua pihak karena masyarakat secara bergotong royong membangun berbagai infrastruktur fisik penunjang kegiatan masyarakat desa. Dengan koordinasi yang dilakukan, masyarakat bisa lebih hidup rukun dengan yang lainnya. Selain itu juga berkat keikutsertaan masyarakat desa dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa menimbulkan rasa memiliki terhadap berbagai fasilitas yang telah dibangun. Sehingga masyarakat terdorong untuk saling menjaga dan melestarikan berbagai pembangunan yang telah terlaksana.

Semua hasil yang telah dicapai dalam pembangunan tersebut tidak terlepas dari peran kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang berupa pembangunan prasarana fisik yang berguna bagi semua masyarakat. Selain itu juga partisipasi masyarakat yang secara bergotong royong saling membantu dalam proses pelaksanaan pembangunan yang ada di desa mendapatkan apresiasi tersendiri. Kesadaran masyarakat akan pentingnya dan manfaat pembangunan yang berdampak terhadap kelancaran kegiatan perekonomian membuat masyarakat termotivasi untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah desa melaksanakan pembangunan yang ada di desa.

4. Faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan pembangunan fisik pedesaan di Desa Parijajah Wetan

a. Faktor penghambat

Pembangunan dalam proses pelaksanaan tidak akan terlepas dari yang namanya penghambat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah proses pelaksanaan suatu pembangunan pasti mengalami berbagai kendala atau penghambat. Baik itu yang bersifat kecil maupun besar. Penghambat dalam proses pelaksanaan perlu ditangani dengan benar dan secara serius. Karena apabila penghambat tersebut dibiarkan akan menimbulkan masalah baru yang akan menjadi hambatan yang lebih besar. Selain itu juga, penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut bisa menjadi suatu bahan evaluasi untuk pembangunan kedepannya.

Pembangunan yang sudah terlaksana di Desa Parijatahwetan berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh secara umum bahwa penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang sudah terlaksanakan beraneka ragam. yaitu:

- 1.) Kondisi medan yang sulit
- 2.) Keterlambatan bahan bangunan yang dikarenakan sulitnya mencari bahan alam tersebut
- 3.) Cuaca yang tidak mendukung
- 4.) Banjir yang sewaktu-waktu bisa datang, menyebabkan terhambatnya proses pengerjaan pembangunan, khususnya dalam pembangunan jembatan BOMO di Dusun Bongkoran.

Semua hal diatas menjadi faktor penghambat dalam berjalannya proses pembangunan. Pelaksana kegiatan tidak tinggal diam dalam menanggapi segala permasalahan tersebut. Pelaksana pembangunan selalu berupaya mencari solusi atas segala permasalahan yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut.

LPMD sebagai pelaksana kegiatan maklum tentang hambatan seperti cuaca yang tidak mendukung serta banjir, itu adalah faktor alam yang tidak dapat diperkirakan manusia kapan datangnya. Tetapi untuk faktor lain seperti kondisi medan yang sulit serta keterlambatan bahan masih bisa diatasi dengan berbagai cara. Semangat kerja yang ditunjukkan oleh pelaksana kegiatan untuk mengatasi berbagai masalah yang menjadi penghambat merupakan sikap yang baik. Semua itu dilakukan demi menciptakan sebuah pembangunan yang baik, serta tepat waktu dalam penyelesaiannya.

b. Faktor pendukung

Selain faktor penghambat yang ada di atas terdapat juga faktor pendukung yang menjadikan proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Parijatahwetan yaitu:

1. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Desa Parijatahwetan yang berbentuk:

- a. Ikut serta dalam proses perencanaan hingga proses pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Parijatahwetan.
- b. Bergotong-royong dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Parijatahwetan.
- c. Swadaya masyarakat dalam bentuk sumbangan uang untuk menambah modal pembiayaan pembangunan yang sedang berlangsung.

Tingginya tingkat partisipasi masyarakat Desa Parijatahwetan menjadi faktor pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan. Sikap toleransi akan kehidupan sekitar serta nilai kebudayaan bergotong royong yang selalu identik dalam kehidupan di pedesaan menjadikan pelaksanaan pembangunan di desa ini dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sebuah pembangunan menjadi sebuah motivasi bagi masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi membangun desanya. Partisipasi masyarakat pun beraneka ragam, mulai dari keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui usulan-usulan dalam musyawarah desa, saling bergotong royong membantu pemerintah

desa dengan terjun langsung dilapangan membantu proses pembangunan dengan bahu membahu demi terwujudnya sebuah pembangunan yang dikehendaki. Selain itu juga partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan dana yang berupa swadaya masyarakat.

Tingginya tingkat partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Parijatahwetan perlu mendapatkan apresiasi tersendiri. Hal ini juga dapat dijadikan contoh bagi desa-desa yang lain dalam melaksanakan pembangunan di desanya. Dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam proses pelaksanaan program pemerintah khususnya dalam hal pembangunan. Tingginya tingkat pasrtisipasi dari masyarakat sekitar tidak terlepas dari peran kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Dengan memberikan dorongan, pengarahan tentang pentingnya sebuah pembangunan bagi kehidupan masyarakat yang berdampak terhadap perkembangan perekonomian desa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Kinerja pemerintah desa adalah hasil yang dicapai oleh pemerintah desa dari seluruh proses kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada. Kinerja Pemerintah Desa Parijatahwetan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memperoleh informasi dan data-data yang ada di lapangan berkaitan dengan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan fisik pedesaan sebagai berikut:

1. Kinerja pemerintah desa dalam pembangunan fisik yang meliputi kemampuan kerja aparat dan motivasi aparat lumayan cukup baik namun terdapat sisi negatifnya. Kedisiplinan aparat Desa parijatahwetan dalam hal kehadiran dikantor sangat rendah, itu terlihat dari sering terlambatnya para aparat dalam hadir dikantor desa, yang sebenarnya menurut aturan jam masuk kantor pukul 07.00 WIB tetapi dalam kenyataannya para perangkat desa hadir dikantor lewat dari jam tersebut bahkan sampai terlambat satu jam dengan berbagai alasan. Keterlambatan para pegawai tersebut berbeda disaat mereka mengerjakan tugas-tugasnya. Dalam mengerjakan tugas kedisiplinan aparat sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari hasil yang dicapai yaitu selalu menyelesaikan tugas-tugas dengan baik dan tepat waktu. Kemampuan kerja aparat sangat baik, terbukti dengan hasil kerja yang telah dicapai oleh pemerintah desa yaitu kepuasan masyarakat atas kinerja

pemerintah desa yang selalu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat mulai dari pelayanan pemerintahan maupun berbagai penyediaan infrastruktur penunjang pembangunan. Motivasi yang dimiliki oleh aparat sangat tinggi, rasa tanggung jawabnya terhadap tugas yang telah diemban serta dorongan dari lingkungan menjadikan aparat lebih giat dalam melaksanakan tugas pemerintahan.

2. Proses pelaksanaan program yang meliputi mekanisme pelaksanaan, sumber dana, pencairan dana dan mobilisasi tenaga kerja/bahan dan alat. Mekanisme pelaksanaan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan pembangunan. Mekanisme pelaksanaan dibuat oleh tim pelaksana pembangunan yaitu LPMD. Didalamnya memuat tentang persiapan pelaksanaan yang meliputi mobilisasi tenaga kerja/bahan/alat, hingga proses pelaksanaan mulai dari awal sampai selesainya pembangunan. Sumber dana yang diperoleh dalam pembangunan fisik di Desa Parijatahwetan berasal dari APBN yang berbentuk PNPM, APBD dalam bentuk dana ADD dan Reward PBB serta swadaya murni masyarakat desa Parijatahwetan. Setelah diperoleh sumber dana yang akan digunakan dalam pembangunan tahap selanjutnya yaitu proses pencairan dana. Pencairan dana dilakukan melalui beberapa tahapan. Diawali dengan pengajuan surat permohonan pencairan dana dari desa ke daerah maupun pusat. Setelah permohonan disetujui dana akan dicairkan ke rekening kolektif bendahara desa. Untuk pencairan dana dari pemerintah desa ke LPMD sebagai pelaksana pembangunan tahapannya yaitu ketua LPMD mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada

kepala desa, kemudian kepala desa menyerahkan dana tersebut beserta surat keputusan pelaksanaan kepada ketua LPMD sebagai pelaksana kegiatan. Setelah pecairan dana dilakukan LPMD melakukan mobilisasi tenaga kerja, bahan dan alat. Tenaga kerja yang dipekerjakan dalam pembangunan di Desa Parijatahwetan memprioritaskan masyarakat desa sendiri dengan dipandu oleh tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Mobilisasi bahan dan alat dilakukan dengan cara lelang, dimana pihak pelaksana nantinya akan menyuplai bahan dan alat dari pemenang lelang tersebut. Dalam pelaksanaan pembangunan, mobilisasi bahan dan alat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, hal tersebut dilakukan karena terkendala oleh tempat penyimpanan bahan tersebut.

3. Pembangunan fisik yang meliputi wujud pembangunan fisik dan kemanfaatan. Pembangunan fisik yang sudah terlaksana di Desa Parijatahwetan pada rentang waktu tahun 2009 hingga 2013 telah berhasil melaksanakan pembangunan fisik sebanyak melaksanakan 37 pembangunan fisik, mulai dari pembangunan jalan aspal, jalan telford, rabat beton, jembatan penyebrangan, jembatan pengairan, pemavingan jalan, saluran pengairan, MCK , plengsengan jalan serta rehab sekolahan dan lain-lain. Banyaknya hasil pembangunan yang dilaksanakan di Desa Parijatahwetan tersebut tidak terlepas dari kinerja aparat pemerintah desa yang selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya. Pemerintah desa sadar akan kebutuhan pembangunan fisik bagi warganya, oleh sebab

itulah pemerintah desa berupaya membangun berbagai prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh warganya tersebut.

4. Faktor penghambat dan faktor pendukung. Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi diketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Parijatahwetan yaitu bermacam-macam, mulai dari (1).kendala cuaca yang tidak menentu, (2) keterlambatan bahan bangunan, (3) kondisi medan yang sulit serta (4) banjir menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut.. Tetapi dari sekian banyak kendala yang ada dilain sisi Pemerintah Desa Parijatahwetan diuntungkan oleh masyarakat desa yang memiliki partisipasi yang sangat tinggi. Masyarakat desa secara bergotong royong saling bahu membahu membantu pemerintah desa melaksanakan pembangunan tersebut dengan cara ikut terjun langsung membantu proses pembangunan selain itu juga partisipasi masyarakat terlihat dari swadaya masyarakat dalam bentuk bantuan pendanaan. Tingginya tingkat partisipasi dari masyarakat sekitar tidak terlepas dari peran kinerja pemerintah desa dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Dengan memberikan dorongan, pengarahan tentang pentingnya sebuah pembangunan bagi kehidupan masyarakat yang berdampak terhadap perkembangan perekonomian desa.

B. Saran

Pada bagian ini merupakan bentuk tanggung jawab peneliti untuk tidak hanya mengamati fenomena yang ada, tetapi turut pula memberikan masukan

berupa saran kepada pihak yang berkepentingan. Adapun saran yang diberikan peneliti yaitu:

1. Kepala desa sebagai seorang pemimpin di desa sebaiknya memberikan contoh yang baik kepada aparatnya mengenai kedisiplinan dalam bekerja. Kepala desa harus hadir dikantor tepat waktu serta tegas dalam mengambil sikap, apabila ada perangkatnya yang terlambat datang ke kantor harus diberi teguran dan kalau perlu diberi surat peringatan agar tidak mengulangi lagi.
2. Ketua LPMD sebagai pihak pelaksana pembangunan membuat perjanjian dengan pemenang lelang sebagai pihak penyedia bahan-bahan pembangunan dalam proses pelaksanaan pembangunan yang berlangsung yang dilaksanakan oleh LPMD. LPMD membuat sebuah surat perjanjian apabila bahan yang diperlukan dalam proses pembangunan tidak bisa dipenuhi dengan tepat waktu, pihak LPMD berhak mencari bahan dari sumber lain. Dengan begitu diharapkan pihak pemenang lelang sebagai penyedia bahan-bahan bangunan selalu berupaya mendapatkan bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan yang dilaksanakan LPMD dengan tepat waktu. Sehingga tidak terjadi lagi keterlambatan pengiriman bahan bangunan.
3. Pemerintah desa harus lebih bersikap responsiv terhadap kebutuhan masyarakat desa. Tentang pembangunan yang dirasa sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya pembangunan fisik penunjang pertanian seperti pembangunan saluran drainase atau saluran tersier, baik itu pembangunan

drainase baru maupun perbaikan drainase yang sudah ada. karena mayoritas masyarakat di Desa Parijatahwetan bermatapencapaian sebagai petani, oleh sebab itu saluran drainase sangat penting bagi kelancaran proses produksi pertanian. Sehingga dengan pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan akan mensejahterakan masyarakat.

4. Pemerintah Desa hendaknya merencanakan pembangunan di musim kemarau. Mengingat jika pembangunan dilakukan dimusim penghujan, selalu menimbulkan kendala seperti masalah banjir, hujan yang datang dengan tiba-tiba sehingga proses pelaksanaan pembangunan menjadi tertunda



DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R.2013. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Admin. 2013. Kependudukan dan Naker. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (<http://www.banyuwangikab.go.id/profil/kependudukan-dan-naker.html>) diakses tanggal 5 maret 2013
- Atmosudirdjo ,P. 2003. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Kaunika
- Badudu, J.S. dan Zaid, S.M. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.
- Dwiyanto, Agus. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: gadjah Mada University Press
- Effendi, Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*.Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, Uhaiindo Media dan Offset
- Fakih, Mansoer. 2002. Studi Tentang Ideologi, Isu Strategi dan Dampak Gerakan. Yogyakarta: Insist Press
- Mangkunegara, A.P. 2005. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung : Refika Aditama
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UMM Press
- Moleong , Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Ndraha, Tailiziduhu. 1984. *Dimensi-dimensi Pemerintah Desa*. Jakarta:Bina aksara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Bupati Banyuwangi No. 20 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyuwangi
- Prijodarminto, Soegeng. 1994. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: Abadi
- Purwanto, Ngalim. 1992. *Psikologi Pengajaran*. Jakarta: Gramedia
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Robbins Stephen P. 2009. *Perilaku Organisasi*. Indonesia: Macanan Jaya Cemerlang
- Siagian, S.P. 1979. *Administrasi pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Siswanto, Joko. 1988. *Administrasi Pemerintah Desa*. Bandung: CV Armico
- Sedarmayanti. 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja*. Jakarta: Mandar Maju

- Sudarto, Amman. 1999. *Analisis Kinerja* , Diklat Provinsi Daerah Tingkat I Surabaya, Jawa Timur
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suwignyo. 1986. *Administrasi Pembangunan Desa Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta. Bina Aksara
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1974. *.Pengantar administrasi pembangunan*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wibowo. 2007. *Manajemen kinerja.(ed.1)*. Jakarta: raja grafindo persada
- Wibisono. 2009. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers
- Widjaja, HAW. 2002. *pemerintah desa/marga*. Jakarta : Karya Grafindo Perkasa



CURRICULUM VITAE

- Nama : Angga Amda Pratama
- Nomor Induk Mahasiswa : 105030101111032
- Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 18 Oktober 1991
- Pendidikan : 1. SD Negeri 3 Parijatahwetan Tamat tahun 2004
2. SMP Negeri 1 Srono Tamat tahun 2007
3. SMA Negeri 1 Rogojampi Tamat tahun 2010
- Pekerjaan : -
- Publikasi atau karya ilmiah : Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Fisik Pedesaan (Studi di Desa Parijatahwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi)



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Program kerja Pemerintah Desa Parijatahwetan apa saja?
2. Program apa saja yang sudah terlaksana?
3. Program pembangunan fisik berupa apa saja?
4. Bagaimana kinerja aparat pemerintah desa?
 - a. Kedisiplinan aparat desa dalam melaksanakan tugas
 - b. Kemampuan kerja aparat dalam melaksanakan tugas
 - c. Motivasi aparat dalam melaksanakan tugas
5. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk meningkatkan kedisiplinan aparat desa?
6. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk meningkatkan kemampuan aparat desa?
7. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kepala desa untuk meningkatkan motivasi aparat desa?
8. Sumber dana yang digunakan dalam proses pembangunan fisik di Desa Parijatahwetan berasal dari mana saja?
9. Bagaimana proses pencairan dana yang digunakan dalam program pembangunan yang ada di Desa Parijatahwetan?
10. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa agar mendapatkan dana Reward PBB?
11. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan di Desa Parijatahwetan?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Program pembangunan fisik apa saja yang sudah terlaksana pada tahun 2009-2013 di Desa Parijatahwetan?
2. Wujud pembangunan fisik yang sudah terlaksana pada tahun 2009-2013 berupa apa saja?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Parijatahwetan?
 - a. Sumber dana dalam program pembangunan
 - b. Pencairan dana
 - c. Mobilisasi tenaga kerja
 - d. Mobilisasi bahan dan alat
4. Kemanfaatan dari pembangunan fisik yang sudah terlaksana apa saja?
5. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Parijatahwetan?
6. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Parijatahwetan?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan

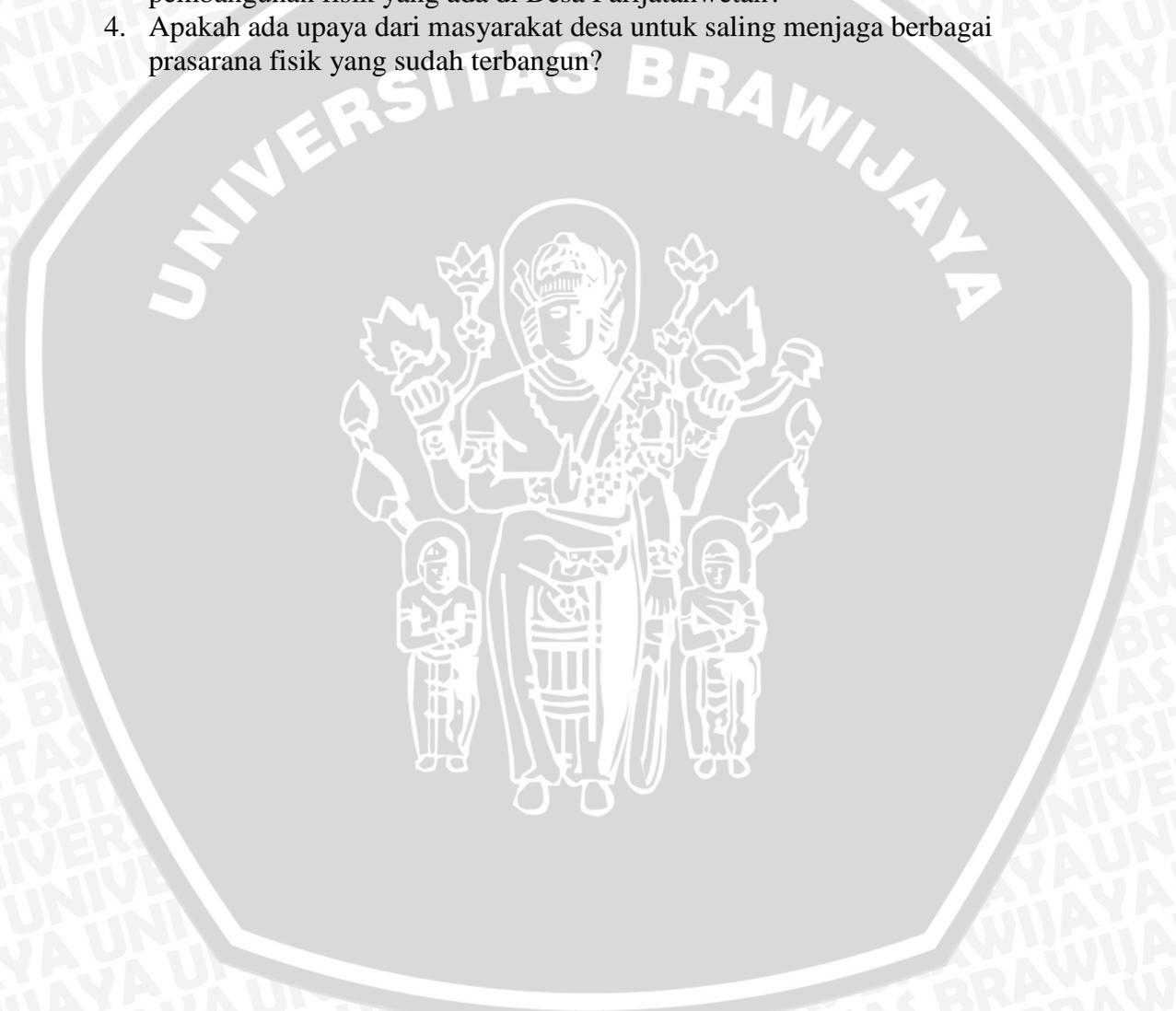
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Parijatahwetan?
 - a. Sumber dana dalam program pembangunan
 - b. Pencairan dana
 - c. Mobilisasi tenaga kerja
 - d. Mobilisasi bahan dan alat
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Parijatahwetan?
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Parijatahwetan?
4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban LPMD atas pembangunan fisik yang dilaksanakan?



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Manfaat apa saja yang dirasakan masyarakat dengan dibangunnya berbagai prasarana fisik di Desa Parijatahwetan?
2. Pembangunan apa saja yang dirasa sangat dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat Desa Parijatahwetan?
3. Bentuk partisipasi dari masyarakat berupa apa saja dalam kaitannya pembangunan fisik yang ada di Desa Parijatahwetan?
4. Apakah ada upaya dari masyarakat desa untuk saling menjaga berbagai prasarana fisik yang sudah terbangun?



LAMPIRAN



Gambar 17. Pemavingan Dusun Parirejo

Sumber: Data Penelitian



Gambar 18 Rabat Beton Dusun Sumberjo

Sumber: Data Penelitian



Gambar 19. Pemavingan Dusun Sumberjo

Sumber: Data Penelitian



Gambar 20. Plengsengan jalan dan MCK Dusun Melik
Sumber: Data Penelitian



Gambar 21. Pemavingan jalan Dusun Melik
Sumber: Data Penelitian



Gambar 22. Jembatan Dusun Sidorejo
Sumber: Data Penelitian



Gambar 23. Pemavingan Dusun Sidorejo

Sumber: Data Penelitian



Gambar 24. Gapura dan Pagar Kantor Kepala Desa Parijatahwetan

Sumber: Data Penelitian



Gambar 25. Pendopo Kantor Desa

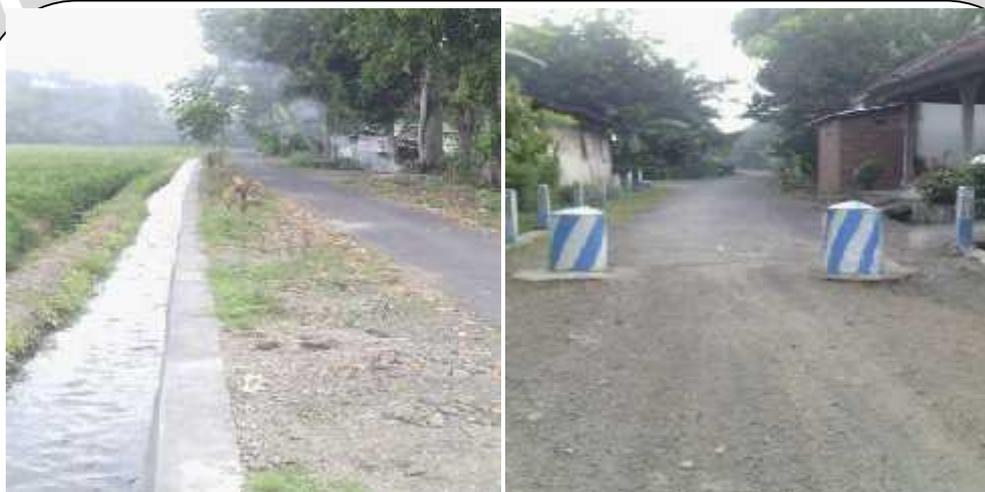
Sumber: Data Penelitian



Gambar 26. Plengsengan jalan Dusun Sumberjo
Sumber: Data Penelitian



Gambar 27. Pemavingan jalan makam Dusun Sumberjo
Sumber: Data Penelitian



Gambar 28. pengaspalan jalan dan Plengsengan Jalan Dusun Bongkoran
Sumber: Data Penelitian



Gambar 29. pembangunan Jembatan Sidoodadi Dusun Bongkoran
Sumber: Data Penelitian





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 ; Fax. +62-341-558227
E-mail : fi@ub.ac.id <http://www.fi.ub.ac.id>

Program Studi : • Sastra - Ilmu Administrasi Publik - Administrasi Pemerintahan - Perencanaan Pembangunan - Ilmu Perpustakaan - Ilmu Administrasi Bisnis
• Perpajakan - Bisnis Internasional - Hospitality dan Pariwisata
• Magister - Ilmu Administrasi Publik - Ilmu Administrasi Bisnis • Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 4243 /UN10.3/PG/2014
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey
Kepada : Yth. Kepala Desa Parijatah Wetan
Jl. Prajurit Syakur No. 1 Parijatah Wetan

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Angga Amda Pratama
Alamat : Desa Parjatah Wetan Rt.3/Rw.2, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi
NIM : 105030101111032
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : -
Tema : Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Fisik.
Lamanya : 2 (dua) minggu.
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 27 Maret 2014

a.n. Dekan

Ketua Prodi Administrasi Publik


LELY INDAH MINDARTI, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SRONO
DESA PARIJATAHWETAN
Jl. Prajurit Syakur No. 1 Telp. 0333 – 634 685

Parijatahwetan, 18 Juni 2014

Nomor	: 420/ 248 /429.510.06/2014	Kepada:
Lamp	: -	Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Sifat	: Penting	Universitas Brawijaya Malang
Perihal	: <u>Keterangan Pernah Riset</u>	Di-
		MALANG

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa :

Nama : ANGGA AMDA PRATAMA
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuwangi, 18 Oktober 1991
Pendidikan : Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu
Adminitrasi
NIM : 105030101111032
Alamat : Dusun Bongkoran Rt. 03 Rw. 02
Desa Parijatahwetan Kec. Srono Kab. Banyuwangi

Telah melakukan Riset di Desa kami tentang Kinerja Pemerintah Desa
Dalam Pembangunan Fisik Pedesaan. Pada tanggal 16 s/d 23 Maret 2014.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Parijatahwetan, 18 Juni 2014

Kepala Desa Parijatahwetan



SUHARYONO, SH.

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN DESA

(LPPDes)



DESA : PARIJATAHWETAN
KECAMATAN : SRONO
KABUPATEN : BANYUWANGI

TAHUN ANGGARAN 2013

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DESA
(LPPDes)

DESA : PARIJATAHWETAN
KECAMATAN : SRONO
KABUPATEN : BANYUWANGI
TAHUN : 2013

BAB. I
PENDAHULUAN

I. Keadaan umum desa parijatahwetan meliputi :

- Luas Wilayah : 566,363 Ha.
- Batas Wilayah :
 - * Sebelah Utara : Kecamatan Rogojampi
 - * Sebelah Timur : Desa Wonosobo
 - * Sebelah Selatan : Desa Kepundungan
 - * Sebelah Barat : Desa Parijatahkulon
- Tanah Pekarangan / Perumahan : 59.557 Ha.
- Sawah : 415.123 Ha.
- Tegalan : 44.252 Ha.
- Lain - lain : 47.431 Ha.
- Geografi dan Topografi Desa :
 - a. Tinggi tempat dari permukaan Laut : 50 M.
 - b. Curah Hujan Rata - rata per Tahun : 1.243 Mm
 - c. Keadaan suhu Minimum/Maksimum: 29 C^o/ 24 C^o.
 - e. Dataran : 415.123 Ha.
 - f. Perbukitan : -
- Orbitasi :
 - a. Jarak Ke Kecamatan : 6 Km
 - b. Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten : 28 Km
 - c. Jarak Ke Ibu Kota Propinsi : 287 Km
 - d. Jarak Tempuh Ke Kecamatan : 1 Jam
 - e. Jarak Tempuh Ke Kabupaten : 2 Jam
 - f. Jarak Tempuh Ke Propinsi : 6 Jam

Jumlah Dusun Desa Parijatahwetan terdiri dari 5 Dusun yaitu :

- Dusun Sumberjo
 - Dusun Melik
 - Dusun Bongkoran
 - Dusun Parirejo
 - Dusun Sidorejo
- Jumlah Penduduk : 8.057 Jiwa.
- Laki – laki : 3.946 Jiwa.
 - Perempuan : 4.111 Jiwa.

- Keadaan sosial ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa :

Masyarakat Desa Parijatahwetan merupakan masyarakat yang agraris sehingga penopang kehidupan utamanya merupakan pola hidup bercocok tanam sebagai petani, yang masih dalam tingkatan kelas ekonomi menengah ke bawah, walaupun demikian masih banyak juga masyarakat yang hidupnya dibawah kecukupan.

Selain hal tersebut diatas Masyarakat Desa Parijatahwetan masih tergolong masyarakat yang berbudaya dan masih melestarikannya, dan sekarang telah dimodifikasi dengan kegiatan keagamaan yang telah dilaksanakan secara serentak di Mushola dan di Masjid diseluruh Desa Parijatahwetan, dan juga masih dilestarikan kekayaan seni Budaya seperti masih adanya Goup Kesenian Jaranan, Gandrung, Hadrah, Aklung Daerah dan Janger yang selama ini masih berkembang di masyarakat.

- **Prasarana Pemerintahan**

- Jumlah Balai Desa : 1 Unit
- Jumlah Kantor Desa : 7 Unit
- Kantor PKK : 1 Unit
- Kantor HIPPA : 1 Unit
- Kantor BPD : 1 Unit
- Mushola : 1 Unit
- Balai Dusun : 1 Unit
- Luas Tanah Kas Desa : 155,161 M2.

- **Prasarana Pendidikan**

- PAUD : 2 Unit
- TK : 5 Unit
- SD : 4 Unit
- MI : 2 Unit
- MTS : 1 Unit
- SMP Plus : 1 Unit
- SMK : 1 Unit
- Pondok Pesantren : 4 Unit

- Prasarana Kesehatan antara lain

- Tempat Posyandu : 9 Unit
- Puskesmas Pembantu : 1 Unit
- Pondok Bersalin : 2 Unit
- Bidan : 2 Orang
- Mantri : 2 Orang
- Dukun Bayi : 11 Orang

- Sarana Perhubungan

Sarana perhubungan pada dasarnya telah terpenuhi dengan adanya jalan Desa dan jalan – jalan yang menghubungkan Dusun yang satu dengan yang lain, namun masih belum adanya transportasi umum seperti angkutan pedesaan yang meliputi di Desa Parjatahwetan, Wonosobo, dan Desa Sukamaju sarana lain yang ada hanyalah ojek Sepeda Motor.

- Jalan Aspal : 5,7 Km
- Jalan Tanah : 3,67 Km
- Jalan diperkeras : 5,1 Km
- Ojek : - Orang

- Sarana Perekonomian.

Lembaga – lembaga perekonomian yang ada di Desa Parjatahwetan dibidang cukup lumayan misalnya :

- BKD : 1 Unit
- KUD : 1 Unit
- KSP : 3 Unit
- Koperasi Khusus Perempuan : 1 Unit

Namun lembaga – lembaga tersebut masih belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat karena keterbatasan finansial maupun SDM, lebih – lebih adanya Pasar Desa yang jauh dari kesempurnaan.

- Sarana Keagamaan

Kegiatan keagamaan di Desa Parjatahwetan terutama agama Islam cukup berkembang dan tumbuh subur diseluruh pelosok Desa, namun masih perlu pembinaan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas jenis kegiatan.

- Jumlah Masjid : 9 Buah
- Mushola : 54 Buah
- Jumlah Kelompok Tahliil : 50 Kelompok
- Kelompok Pengajian : 37 Kelompok
- Majelis Taklim : 5 Kelompok
- Kelompok Manakip : 10 Kelompok

BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

A. Bidang Pemerintahan

I. Organisasi Pemerintahan Desa :

Secara umum penyelenggaraan Pemerintahan Desa Parijatahwetan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta melaksanakan petunjuk Tingkat atas yaitu Kecamatan dan Kabupaten.

- Susunan Organisasi Pemerintah Desa Parijatahwetan terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa.

Yang dimaksud Perangkat Desa adalah :

- a. Unsur Staf yaitu Sekretaris Desa, dan atau tata usaha sebagai unsur pelayanan
- b. Unsur pelaksanaan yaitu seksi Pamong Tani dan seksi keamanan.
- c. Unsur wilayah yaitu Kepala Dusun sebagai unsur pembantu Kepala Desa di wilayah sebagian Desa, sedangkan struktur organisasi Pemerintah Desa Parijatahwetan terlampir.

II. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

BPD sebagai Mitra kerja Pemerintah Desa telah dibentuk pada tanggal 08 April 2012 dan telah dilantik oleh Bupati banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2012 sedangkan Pembentukan BPD mengacu pada Perda No 9 Tahun 2006 tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa , daftar nama – nama anggota BPD terlampir.

III. Peraturan Desa.

- Dalam Tahun 2013 Pemerintah Desa Parijatahwetan telah membuat Peraturan Desa sebanyak 4 Peraturan :
 1. Peraturan Desa Parijatahwetan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pungutan Desa
 2. Peraturan Desa Parijatahwetan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)
 3. Peraturan Desa Parijatahwetan Nomor 02 Tahun 2013 tentang program kerja Tahunan Desa.(RKPDes)
 4. Peraturan Desa Parijatahwetan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa (LKPJ)
- Keputusan Kepala Desa :
 1. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan nomor 01 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2013.
 2. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penunjukan Sdr Sairi sebagai Ketua Rt 01 Dsn Sumberjo Desa Parijatahwetan

3. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
4. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pokja Profil Desa
5. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penetapan Bendahara Desa & Rekening.
6. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua Rt/Rw se Desa Parijatahwetan
7. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
8. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penetapan Pengurus Barang pada Sekretariat
9. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penetapan Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana.
10. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengunduran Diri Sdr Suharyono, SH sebagai Kepala Dusun Sumberjo
11. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengunduran Diri Sdr Nurhasim sebagai Ketua Rt 01/2 Dusun Sidorejo
12. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penetapan Sdr Bambang sebagai Ketua Rt 01/2 Dsn Sidorejo
13. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penetapan Sdr Kasidi sebagai Kepala Dusun Sumberjo
14. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tim Pelaksana Pembangunan kepada Desa yang Lunas PBB Tahun 2013
15. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penetapan Sdr Salamun Kasublok Wil Reksojoyo
16. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Sdr Suparman Kasublok Wil BO II Dsn Parirejo
17. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Sdr Jamhari Kasublok Wil BO I Dsn Bengkoran
18. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Sdr. Ali Mashud Kasublok Wil Marem 2 Kiri Dsn Sumberjo
19. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Sdr Hasyim sebagai Kenna Rt 03/02 Dsn Sumberjo
20. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penetapan Pokmas Parwet Jaya Dusun Melik Desa Parijatahwetan

IV. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa :

Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa telah diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan dijabarkan pada Peraturan Desa Parijatahwetan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013.

V. Sumber Pendapatan Desa

Sumber Pendapatan Desa Parijatahwetan didapati dari :

1. Pendapatan Asli Desa / Tanah kas Desa
2. Swadaya dan Partisipasi Masyarakat.
3. Pendapatan yang bersal dari bantuan Pemerintah.
4. Pendapatan lain – lain yang sah

VI. Pungutan Desa

Pungutan Desa Parijatahwetan bersumber dari :

1. Pemilik Perusahaan
2. Surat menyurat
3. Pasar Desa
4. Bantuan dari pihak lain
5. Bantuan spontanitas.

VII Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parijatahwetan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parijatahwetan Tahun Anggaran 2013 Nomor 1 Tahun 2013 persetujuan BPD pada Tanggal 20 Februari Tahun 2013 ,telah dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan hasil sbb :

1. Penerimaan sebesar	Rp. 577.011.600,-
Realisasi sebesar	Rp. 367.458.250,-
2. Belanja Langsung	Rp. 211.886.100,-
Renlisasi sebesar	Rp. 207.421.800,-
3. Belanja Tidak Langsung	Rp. 365.125.550,-
Realisasi sebesar	Rp. 360.036.450,-

VIII. Kelembagaan

Lembaga – lembaga yang ada di Desa Parijatahwetan berkembang dan berjalan cukup baik kerja sama dengan Desa cukup mantap, adapun lembaga – lembaga yang ada di Desa parijatahwetan sbb ;

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Nahdhotul Ulama* (N U) | 7. Ipnu |
| 2. Ansor | 8. Remaja Masjid |
| 3. Muslimat | 9. LPMD |
| 4. Fatayat | 10. BPD |
| 5. Banser | 11. PKK |
| 6. Pagar Nusa | 12. MUI (Majelis Ulama' Indonesia) |

IX. Penyelenggaraan Administrasi Desa

Secara Umum penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa Parajatah wetan telah kami laksanakan sesuai dengan petunjuk tingkat atasan baik administrasi umum, Penduduk, administrasi keuangan serta administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Guna untuk mentertibkan surat menyurat / Pelayanan surat menyurat selalu melalui pengantar Rt, Rw, dan Kepala Dusun serta menerapkan prinsip sinkronisasi dan koordinasi. /Pelayanan Satu Pintu sesuai dengan Petunjuk atasan.

Secara Periodik setiap 1 bulan sekali selalu mengadakan pembinaan administrasi terhadap Rt,Rw dan Kepala Dusun.

X. Data Umum (Lampiran – lampiran)

1. Data Aparat Pemerintah Desa
2. Data BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3. Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk
4. Data Peraturan Desa
5. Data Kekayaan Desa
6. Data Inventaris Desa

B. Bidang Pembangunan

I. Pembangunan di Bidang Sosial

- Secara lebih detil pembangunan di bidang sosial telah dilaksanakan seiring dan bersama – sama dengan perkembangan masyarakat Desa melalui berbagai organisasi sosial kemasyarakatan seperti NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, organisasi Pemuda dan Remaja Masjid, hal ini bisa di buktikan dengan adanya kegiatan keagamaan seperti Tadarus Alqur'an, Tahlil, malam lailatul Idjtimak Manakib dll.
- Telah dapat dilaksanakan kegiatan penyantunan anak yatim piatu sebanyak 50 anak dengan Dana Rp. 5.000.000,- sumbangan dari masyarakat.
- Untuk tahun 2013 telah dapat dilaksanakan Pembangunan Sebanyak 9 Proyek. Dengan Dana Rp.223.077.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pemavingan Jalan Dusun Melik Rt 03/2 dengan bantuan Dana ADD Rp. 26.352.000,- dan Swadaya Murni Masyarakat sebesar Rp. 7.250.000,-
 2. Pemavingan Jalan Dusun Sumberjo Rt 05/1 dengan bantuan dana ADD Rp. 12.468.000 dan Swadaya murni dari masyarakat Rp. 2.750.000,-
 3. Pemavingan Jalan Dusun Sidorejo Rt 02/1 dengan bantuan Dana ADD Rp. 14.366.000,- dan Swadaya Murni Masyarakat Rp. 3.150.000,-
 4. Pembangunan Plensengan Jalan Wilayah EO II Dsn Parirejo dengan Bantuan Dana ADD Rp. 12.211.000,- Swadaya Murni Masyarakat Rp. 4.600.000,-

5. Pembangunan Plensengan Jalan Dusun Melik dengan Bantuan Dana dari PNPB Rp. 47.500.000,-
6. Pemavingan dan Plensengan Jalan Dusun Parirejo Rt 02/02 dengan Bantuan Dana Reward PBB sebesar Rp. 29.108.700,- dan Swadaya Murni Masyarakat Rp. 3.650.000,-
7. Pemavingan Jalan Dusun Sumberjo Rt 01/1 dengan Bantuan Dana Reward PBB sebesar Rp. 16.801.400,- dengan swadaya murni masyarakat Rp. 1.250.000,-
8. Pemavingan Jalan Dsn Sidorejo Rt 02/2 dengan Bantuan Dan Reward PBB sebesar Rp. 22.966.900,- dengan swadaya murni masyarakat Rp. 5.350.000,-
9. Plensengan Jalan Makom Dusun Sumberjo Rt 01/2 dengan Bantuan Dana Reward PBB sebesar Rp. 13.303.000,-

II. Pembangunan di Bidang Ekonomi

Di samping pembangunan Fisik Desa Parijatahwetan di dukung dengan adanya BKD,KUD ,KSP, KOPWAN & Kelompok SPP yang bergerak pada Koperasi Simpan Pinjam.

III. Pembangunan di Bidang Budaya

Secara Umum masyarakat Desa Parijatahwetan masih menghargai dan Melestarikan budaya kekayaan bangsa baik dalam kehidupan sehari – hari Maupun budaya kekayaan bangsa yang berupa kesenian tradisional dan Tradisi – tradisi yang berkembang dalam kehidupan sehari – hari yang dianggap baik dan layak untuk dikembangkan.

IV. Pembangunan di bidang ketertiban dan keamanan

- Guna menciptakan ketertiban dan keamanan yang lebih kondusif Dan menjaga kenyamanan masyarakat Desa Parijatahwetan telah dibentuk Hansip sebanyak 45 personil yang siap menjalankan tugas sebagaimana Mestinya.
- Telah dibentuk Pam Swakursa yang terdiri dari Anggota Hansip, Banser, Pagar Nusa dan Tokoh Masyarakat.
- untuk menjaga keamanan di Balai Desa telah dilaksanakan jaga malam secara bergiliran yang terdiri dari Perangkat Desa Hansip dan K. BLOK.

C. Permasalahan yang di hadapi dan Upaya Penyelesaian

I. Permasalahan-Permasalahan

1. Masih banyak SPPT yang salah nama dan dobel, sehingga setiap tahun Desa mengalami ketekoran untuk pelunasan PBB.
3. Banyak Tanah – tanah yang sudah dibalik nama dan sudah bersertifikat namun SPPT Masih keluar nama yang lama sehingga hal ini akan mempersulit Pemasukan PBB.

II. Upaya Penyelesaian.

1. Upaya – upaya yang dilakukan Desa sudah berupaya untuk mengembalikan atau mengusulkan pada dinas pendapatan namun setiap tahun masih tidak ada Perubahan.
2. Memberi pengertian kepada masyarakat lewat pelaksanaan Pengajian , tilik Dusun agar masyarakat lebih mengerti dan paham tentang arti pembangunan.

BAB III PENUTUP.

A. KESIMPULAN.

Bahwa dalam tahun anggaran 2013 secara keseluruhan, bidang pemerintahan, bidang pembangunan dan bidang kesejahteraan rakyat telah kami laksanakan sesuai dengan peraturan desa dan petunjuk atasan, walaupun disektor fisik masih ada yang belum terjangkau secara keseluruhan.

B. SARAN

Perlu adanya pembinaan / penataran terhadap lembaga-lembaga yang ada di Desa Parijatahwetan seperti : BPD, LPMD, dan lembaga-lembaga yang lainnya karena pada dasarnya masih banyak anggota lembaga yang masih kurang mengerti terhadap tugas dan fungsinya, hal ini supaya ada kesinkronan dalam pelaksanaan tugas Kepala Desa dengan lembaga-lembaga tersebut.

Parijatahwetan, 31 Desember 2013

Kepala Desa



SUHARYONO,SH

FORMAT B



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
 KECAMATAN SRONO
 KEPALA DESA PARIJATAHWETAN
 Jl. Prajurit Syakur Nomor 1 Telf 0333 – 634 685

Parijatahwetan, 08 Mei 2012

Nomor : 900/Ab/429.510.06/1112
 ifat : Penting / Amat Segera
 ampiran : 1 (satu) bendel
 erihal : Permohonan Pencairan Alokasi
 Dana Desa (ADD)
 Parijatahwetan Kecamatan
 Srono Tahun Anggaran 2012

Ke pada
 Yth. Sdr. BUPATI BANYUWANGI
 Cq.
 Sdr. Ka. Badan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Banyuwangi

di -
 BANYUWANGI

Berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi tanggal 11 April 2012 Nomor : 188/415/429.011/2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012, bersama ini mohon dicairkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Parijatahwetan Kecamatan Srono Tahun Anggaran 2012 :

Sebesar	Rp.158.843.000,- (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah)
Alokasi ADD	Rp.158.843.017,13 (Seratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Belas Rupiah Tiga Belas sen.)
Realisasi	:Rp. 0,- (nol)
Sisa	:Rp. 17. 13,- (Tujuh Belas Rupiah Tiga Belas Sen)
Melalui	: Bendahara Desa
Rekening pada	: PT (Persero) Bank Jatim
Nomor Rekening	: 0021016455



Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan pula :

1. Surat Permohonan Pencairan	Ada / Tidak ada
2. Peraturan desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2012	Ada / Tidak ada
3. Rencana Penggunaan Dana (Format A1 dan A2)	Ada / Tidak ada
4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus kegiatan fisik	Ada / Tidak ada
5. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Bendahara Desa dan Penetapan Rekening Desa	Ada / Tidak ada
6. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Desa	Ada / Tidak ada
7. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa pada Sekretariat Desa	Ada / Tidak ada
8. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Barang pada Sekretariat Desa	Ada / Tidak ada
9. Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Penetapan Tim Pelaksana ADD	Ada / Tidak ada
10. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penanggung jawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana fisik desa	Ada / Tidak ada
11. Buku Profil Desa Tahun 2011	Ada / Tidak ada
12. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2011	Ada / Tidak ada
13. Surat Keterangan Laporan SPJ Penggunaan dana ADD Tahun Anggaran 2011	Ada / Tidak ada
14. Kwitansi Penerimaan	Ada / Tidak ada

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT SRONO



Des. H. ABDUL GHOFUR, MM
Pembina Tingkat I
NIP195606061986031021



H. AHMAD MUSAIRI



KEPALA DESA
Parjatah Wetan
Kec. Srono

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
 DESA PARIJATAHWETAN KECAMATAN SRONO
 KABUPATEN BANYUWANGI**

Parijatahwetan, 24 Agustus 2013

: 141/ /429.510.06/2013

Kepada;

: Segera

Yth. Sdr. Kepala Desa Parijatahwetan

: 1 (satu) berkas

selaku Ketua Tim Pelaksana

: Pengajuan Pencairan Dana

ADD Tahun 2013

Pembangunan Sarana dan

Di -

Prasarana Fisik Desa

PARIJATAHWETAN

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pemavingan Jalan Dusun Sumberjo Rt 05/1 yang didanai dari Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Parijatahwetan Kecamatan Srono Tahun Anggaran 2013, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan dana guna pelaksanaan pekerjaan dimaksud sebesar Rp. 12.465.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) .

Bersama ini pula kami lampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

Demikian untuk menjadi akhun dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

Ketua

Sekretaris




ABDUL QOTSAM



M. YUNUS

**BERITA ACARA PENYERAHAN ALOKASI DANA DESA
DESA: PARIJATAHWETAN KECAMATAN SRONO
TAHUN ANGGARAN 2013**

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu tiga belas bertempat di balai Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono dalam rapat desa dan berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/415/KEP/429.011/2013 Tahun 2013, telah dilaksanakan penyerahan dana ADD yang diterima Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono

- : ABDUL QOTSAM
- : Ketua LPMD
- Kegiatan : Pemavingan Jalan Dsn Sumberjo Rt 05/1
- Dana yang diserahkan : Rp.12.468.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Penerima dana sebagaimana tersebut diatas, berkewajiban untuk bertanggungjawabkan penggunaan Dana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kepada Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana

Yang Menerima Penyerahan
LPMD Desa Parijatahwetan



ABD. QOTSAM

Yang Menyerahkan
KEPALA-DESA



M. LYONO, S.AP

Penata

NIP. 19650712 198703 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SRONO
KEPALA DESA PARIJATAHWETAN
Jl. Prajurit Syakur No.1 Telp. 0333-634 685 Kode Pos 68471

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR: 141/ 05 /429.510.06/2013

A. Dasar: Pelaksanaan

1. Keputusan Bupati Banyuwangi tanggal 31 Mei 2013 Nomor 188/415/KEP/429.011/2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013
2. Peraturan Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono tanggal 17 Pebruari 2013 Nomor 01 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono Tahun Anggaran 2013
3. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono Nomor 188/08/KEP/429.510.06/2013 tentang Penetapan Tim Pelaksana ADD Parijatahwetan Kecamatan Srono Tahun 2013.
4. Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan tanggal 03 Mei 2013 Nomor: 188/13/429.510.06/2013 tentang penetapan Penanggung Jawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Desa dari Dana Alokasi Dana Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono Tahun Anggaran 2013.

hari ini Senin tanggal dua belas bulan Agustus tahun Dua Ribu tiga belas, yang
tangan dibawah ini :

: Mulyono, S.AP
: Pj.Kepala Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono selaku Ketua Tim Pelaksana ADD Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono Nomor 188/08/KEP/429.510.06/2013 tentang Penetapan Tim Pelaksana ADD Parijatahwetan Kecamatan Srono Tahun 2013 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

berikan perintah kerja kepada

: ABDUL QOTSAM
: Ketua Penanggungjawab Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono Tanggal 03 Mei 2013 Nomor 188/13/KEP/429.510.06/2013 tentang Penetapan Penanggung Jawab kegiatan pembangunan Saran dan Prasarana Fisik Desa dari Alokasi Dana Desa Parijatahwetan Kecamatan Srono Tahun 2013 yang



melaksanakan ::

Pekerjaan Pemavingan Jalan Dusun Sumberjo Rt 05/1 nilai harga Pekerjaan sebesar Rp. 12.468.000,- (Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan ketentuan waktu pelaksanaan ditetapkan selama 11 hari kalender, terhitung mulai tanggal 06 s/d 22 Agustus sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
Melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan fisik tersebut kepada Kepala Desa secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surat Perintah Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan : Parijatahwetan
Tanggal : 12 Agustus 2013

PIHAK KEDUA
TANGGUNG JAWAB
KEGIATAN



ABDUL OOTSAM

PIHAK KESATU
KEPALA DESA



MULYONO, S.AP

Penata
NIP. 19650712 198703 1 015

Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana (Rupiah)		
		ADD (Rp)	Swadaya (Rp)	Jumlah (Rp)
2	3	4	5	6
OKASI DANA	201.807.917	158.843.017	42.964.900	201.807.917
DISELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	55.078.300	47.652.900	7.425.400	55.078.300
Operasional Pemerintah Desa	38.122.400	38.122.400	5.225.400	43.347.800
Belanja Bahan Pakai Habis	5.501.100	4.668.400	832.700	5.501.100
Belanja pengadaan ATK	3.646.500	3.646.500	-	3.646.500
Belanja Perangko, Materi & Benda Pos Lainnya	561.000	561.000	-	561.000
Belanja Penggandaan	460.800	460.800	-	460.800
Biaya Penyusunan Keputusn, Peraturan Kades dan Perdes	2.290.000	2.290.000	-	2.290.000
Mamir Mamrat	1.560.000	1.560.000	-	1.560.000
Belanja Cetak dan Penggandaan	730.000	730.000	-	730.000
Biaya Perjalanan Dinas Aparat Pemerintahan Desa	6.395.000	5.880.000	515.000	6.395.000
Perjalanan Dinas dim. Jaerah di Luar Wilayah Kecamatan	5.015.000	4.500.000	515.000	5.015.000
Perjalanan Dinas Dalam Wilayah Kecamatan	1.380.000	1.380.000	-	1.380.000
Biaya Pengisian / Pemeliharaan Peralatan & Perlengkapan Kantor Desa	12.215.700	9.444.000	2.771.700	12.215.700
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	6.165.700	3.294.000	2.771.700	6.165.700
Belanja Pengadaan Peralatan Kantor	6.050.000	6.050.000	-	6.050.000
Kegiatan Operasional Pemerintah Desa lainnya	16.346.000	15.840.000	1.106.000	16.346.000
Biaya Musrenbangdes	1.640.000	1.640.000	-	1.640.000
Biaya Tim Dusun	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
Biaya rapat-rapat Koordinasi	1.609.000	1.000.000	609.000	1.609.000
Biaya lembur harian Perangkat Desa	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000
Biaya publikasi dan media masa	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000
Biaya Penunjang Kegiatan HLT RI	2.000.000	1.500.000	500.000	2.000.000
Biaya penunjang Pelatihan Aparat Permdis	500.000	500.000	-	500.000
Biaya Peningkatan TKD	3.300.000	3.500.000	-	3.500.000
Biaya Entry Data Musrenbangdes dan Kemiskinan	500.000	500.000	-	500.000
Biaya Kegiatan Keagamaan	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000
Biaya Operasional BPD	11.730.500	9.530.500	2.200.000	11.730.500
Biaya Honorarium Sidang / rapat BPD	7.880.000	7.880.000	-	7.880.000
Biaya makanan dan minuman sidang rapat BPD	825.000	825.000	-	825.000
Biaya pengadaan ATK	825.500	825.500	-	825.500
UMBERDAYAAN MASYARAKAT	146.725.600	111.190.100	35.539.500	146.729.600
Biaya Modal Pengadaan sarana dan prasarana Fisik	73.556.800	71.956.800	1.600.000	73.556.800
Bangunan Gapuro Desa Dan Meik	15.261.100	15.261.100	-	15.261.100
Pavingan Jalan Dan Parrejo	22.808.800	22.058.800	750.000	22.808.800
Cat Beton & Pembuatan Taman Kantor Desa	6.530.400	6.530.400	-	6.530.400
Pengadaan Internet Desa	9.000.000	9.000.000	-	9.000.000
Pembuatan Monumen Babekant@mas	1.644.200	1.644.200	-	1.644.200
Pembangunan Jembatan Pertanian	18.312.300	17.462.300	850.000	18.312.300
Biaya Honorarium Tim Pelaksana ADD	5.559.000	5.559.000	-	5.559.000
Biaya penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan desa lainnya	67.613.800	33.674.300	33.939.500	67.613.800
Pusatkan musyawarah	2.240.000	2.240.000	-	2.240.000
Bantuan kepada LPMD	10.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000
Bantuan kepada RT/RW	3.534.300	3.534.300	-	3.534.300



Uraian	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana (Rupiah)		
		ADD (Rp)	Swadaya (Rp)	Jumlah (Rp)
2	3	4	5	6
Penunjang kegiatan lomba desa	500,000	500,000	-	500,000
Operasional menuju ke lokasi keamanan & kenyamanan	-	-	-	-
Perbaikan Lurah ibac' in Dan Sidang	3,500,000	3,500,000	-	3,500,000
Penunjang kegiatan Linmas / Hansip	21,800,000	5,000,000	16,800,000	21,800,000
Penunjang kegiatan Pemuda dan olahraga	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
Green and Clean	750,000	750,000	-	750,000
Perustakan Desa	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
Bantuan Hukum BUMDes	450,000	450,000	-	450,000
Penunjang Pendidikan Dasar	500,000	500,000	-	500,000
Penunjang Kegiatan FKPM	13,639,500	1,500,000	12,139,500	13,639,500
Penunjang Kegiatan FKPM	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
Kegiatan HARJABA	1,200,000	1,200,000	-	1,200,000
	500,000	500,000	-	500,000
Jumlah			17	
Penggunaan dana setelah dikurangi sisa mati	201,807,900	158,843,000	42,964,900	201,807,900



 Kepala Desa Bendahan
 H. AHMAD MUSAIRI

Parapat/awetan, 30 April 2012
 Bendahan, Desa

 NUR ANI





**PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERDESAAN (PNPM – MPd)
SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB)**



Nomor : 009/SPPB/UPK-PNPM - MPd/SRN/01/2012
Tanggal : 23 Februari 2012

Yang bertanda tangan dibawah ini kami

- I. Nama : **SISHADI WIYONO, SE**
Jabatan : Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM - MPd), Kecamatan Seono , Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan Musyawarah Antar Desa Pendanaan (Musrenbangdes) Tanggal 20 Pebruari 2012, bertindak atas nama Forum, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

- II. Nama : **MOHAMMAD YUNUS**
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM - MPd), Desa Parijatabwetan, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa Sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2011 ditunjuk selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan PNPM - MPd, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pihak Pertama, menyetujui pembayaran dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Mandiri Perdesaan (PNPM - MPd) kepada Pihak Kedua sebesar Rp 139.654.700,- (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah)

- (2) Dana ini disetujui untuk membiayai kegiatan berikut :
 - (a) Nama Kegiatan : Simpan Pinjam Kelompok Perempuan
Jumlah Dana : Rp 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Jasa Pinjaman : 1,5 persen per bulan
Sifat Bantuan : Pinjaman

 - (b) Nama Kegiatan : Pembangunan Strata: Prasarana
Jumlah Dana : Rp 115.172.000,- (Seratus Lima Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)
Sifat Bantuan : Bantuan Lepas
Waktu Penyelesaian : 3 Bulan.

 - (d) Biaya administrasi dan Operasional UPK sebesar Rp 2.793.100,-

 - (e) Biaya administrasi dan Operasional TPK sebesar Rp 4.189.600,-



Sedangkan Pada tahun 2012 desa Parjatahwetan mendapatkan usulan kegiatan Sarpras yang berupa Jalan Rabat Beton yang berlokasi di dusun Parirejo dengan volume 638 x 2,5 meter dan 2 unit plat duker kegiatan Sarpras tersebut mendapatkan dana dari program PNPM-MP sebesar Rp 121.233.700,- sedangkan untuk kelompok SPP ada 2 kelompok yaitu kelompok Fatayat dan kelompok Al Taqwa sebesar Rp 18.421.000,-

Jenis Kegiatan untuk Desa Parjatahwetan yang di danai PNPM – MP Tahun 2007 s/d 2012 adalah :

Jenis Kegiatan yang didanai PNPM	Lokasi Desa /Dusun/ Kelompok	Dana Kegiatan 95% (Rp)	Biaya Operasional TPK 3%	Biaya Operasional Upk 2%	Total Dan PNPM - MP (Rp)	Swadaya (Rp)	Jumlah pemanfaat	Pelestarian Berjalan/ tidak
Pelatihan Bordir	Dusun Parirejo	15.200.000	480.000	320.000	16.000.000	100.000	20 Orang	Berjalan
MCK, Tandon, Septic dan Talud '09	Dusun Melik	116.596.500	3.682.000	2.454.700	122.733.200	7.424.000	750 Orang	berjalan
Pelatihan Bordir'10	Dusun Parirejo	28.350.000	596.800	895.300	29.842.100	402.500	20 Orang	Berjalan
Pemb. Jemb. Gel Besi'10	Dusun Bongkoran	332.500.000	10.500.000	7.000.000	350.000.000	229.492.500	7.500 Orang	berjalan
SPP '11	3 Kelompok	14.000.000	442.100	294.700	14.736.800	100.000	7 Orang	Berjalan
Pelatihan Bordir'11	Dusun Parirejo	29.950.000	945.800	630.500	31.526.300	770.000	20 Orang	Berjalan
Rabat Beton'12	Dusun Parirejo	115.172.000	3.637.000	2.424.700	121.233.700	6.481.500	2.017 Orang	Berjalan
SPP '12	2 Kelompok	17.500.000	552.600	368.400	18.421.000	200.000	15 Orang	Berjalan

REKAP RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN

Propinsi Jawa Tengah
Kabupaten Banyuwangi
Kecamatan Sirono
Desa Pajastrowetan
Kegiatan Jalan Rabat Beton

NO	Jenis Kegiatan	Volume	RENCANA			REALISASI				
			Satuan	PNPM	Sumber Biaya Swadaya	Satuan	PNPM	Sumber Biaya Swadaya		
1	Rabat Beton	638 x 2,5	Meter	108.688.500	5.544.000	114.132.500	Meter	108.688.100	7.019.000	115.707.100
2	Piat Dukker	1 x 3,5 x 0,5	2 Unit	6.363.500	937.500	7.521.000	2 Unit	6.483.800	807.000	7.290.800
Jumlah 1 + 2 = 3 + 4				115.172.000	6.481.500	121.653.500		115.172.000	7.826.000	122.998.000
Operasional LPK				2.424.700	0	2.424.700		2.424.700	0	2.424.700
Operasional TPK				3.637.000	0	3.637.000		3.637.000	0	3.637.000
TOTAL BIAYA				121.233.700	6.481.500	127.715.200		121.233.700	7.826.000	129.059.700

Diteliti
DOK
IDA DZULSTYANI, SH
No. 14230125 148013 2 004

Mengabdi,
Fasilitator Kecamatan

Dibuat Oleh
Ketua TPK
Muhammad Yunus, BA

Suhera Widada, ST

Suharyono, SH

